



GRAHA APARATU
YERRY YANUAR

LAPORAN KEUANGAN 2023 (AUDITED)

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT**

Jalan Ternate No. 2 Kel. Citarum, Kec. Bandung Wetan,
Kota Bandung Telp. (022) 4203900
Website: bkd.jabarprov.go.id
E-Mail: bkd@jabarprov.go.id Instagram : [bkd.jabar](https://www.instagram.com/bkd.jabar)

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pimpinan Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Perangkat Daerah meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Badan Kepegawaian Daerah adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun 2023 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Neraca menyajikan informasi tentang posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.
2. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, dan Pembiayaan.
3. Laporan Operasional menunjukkan informasi Pendapatan-LO dan Beban.
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/(Defisit)-LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir.
5. Catatan atas Laporan Keuangan memberikan uraian tentang kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun 2023 ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu, kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bandung, 21 Mei 2024

Kepala Badan Kepegawaian Daerah



H. Sumasna, ST., MUM

Pembina Utama Madya

NIP. 19681216 199803 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Lampiran	v
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
Ringkasan	vii
Laporan Realisasi Anggaran	xii
Neraca	xiii
Laporan Operasional	xiv
Laporan Perubahan Ekuitas	xv
Catatan atas Laporan Keuangan	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3 Informasi Umum tentang Entitas Akuntansi	3
1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	4
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN STRATEGIS, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD ...	7
2.1 Ekonomi Makro	7
2.2 Kebijakan Strategis	7
2.3 Kebijakan Keuangan	9
2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	10
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	11
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target APBD	11
3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	15
3.3 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan	16
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	17
4.1 Entitas Akuntansi	17
4.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	18
4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	19

4.4	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	19
4.5	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP.....	30
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	31
5.1	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	31
5.1.1	Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran.....	31
5.1.2	Penjelasan per Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	34
5.1.3	Catatan Penting Lainnya.....	53
5.2	Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.....	54
5.2.1	Penjelasan Umum Neraca.....	54
5.2.2	Penjelasan per Pos Neraca.....	54
5.2.3	Catatan Penting Lainnya.....	65
5.3	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.....	66
5.3.1	Penjelasan Umum Laporan Operasional.....	66
5.3.2	Penjelasan per Pos Laporan Operasional.....	66
5.3.3	Catatan Penting Lainnya.....	75
5.4	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	74
5.4.1	Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas.....	75
5.4.2	Penjelasan per Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	75
5.4.3	Catatan Penting Lainnya.....	78
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI NON-KEUANGAN PD.....	79
BAB VII	PENUTUP	80
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Lampiran	2	Daftar Piutang Pajak
Lampiran	3	Daftar Piutang Retribusi
Lampiran	4	Daftar Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Lampiran	5	Daftar Beban Dibayar Dimuka
Lampiran	6	Daftar Persediaan
Lampiran	7	Daftar Saldo Persediaan
Lampiran	8	Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
Lampiran	9	Daftar Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
Lampiran	10	Daftar Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Daerah
Lampiran	11	Penambahan dan Pengurangan Daftar Aset Lainnya Daerah
Lampiran	12	Daftar Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya
Lampiran	13	Daftar Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Lampiran	14	Daftar Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Lampiran	15	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka
Lampiran	16	Rincian Pendapatan-LO
Lampiran	17	Keterkaitan LRA, LO, dan Neraca – Perhitungan Beban Pegawai, Pemeliharaan, Perjalanan Dinas, Hibah, Bantuan Sosial, dan Lain-lain
Lampiran	18	Keterkaitan LRA, LO, dan Neraca – Perhitungan Beban Persediaan
Lampiran	19	Keterkaitan LRA, LO, dan Neraca – Perhitungan Beban Jasa
Lampiran	20	Keterkaitan LRA, LO, dan Neraca – Perhitungan Beban Penyusutan
Lampiran	21	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Neraca dan LRA
Lampiran	24	Utang Belanja

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Neraca; (c) Laporan Operasional (LO); (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bandung, 21 Mei 2024

Kepala Badan Kepegawaian Daerah



H. Sumasna, ST., MUM

Pembina Utama Madya

NIP. 19681216 199803 1 003

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 189 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah ini telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (*audited*). Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 Unreviu ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran I.

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 *Audited* ini disusun dari laporan keuangan seluruh satuan kerja yang berada di bawah Badan Kepegawaian Daerah.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran Tahun 2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.373.950,00 atau sebesar 195,42 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp2.750.000,00 Jumlah realisasi Pendapatan-LRA tersebut seluruhnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah-LRA.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA pada Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00 persen dari yang dianggarkan, Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp2.750.000,00 atau mencapai 100,00 persen dari yang dianggarkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA sebesar Rp 2.623.950,00 atau mencapai 0,00 persen dari yang dianggarkan.

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp72.429.597.869,00 atau mencapai 97,89 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp73.993.330.116,00 . Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp67.842.616.091,00 atau 98,12 persen dari yang dianggarkan dan Belanja Modal sebesar Rp4.586.981.778,00 atau 94,57 persen dari yang dianggarkan. Berdasarkan realisasi Pendapatan-LRA sebesar Rp5.373.950,00 dan Belanja sebesar Rp72.429.597.869,00 diperoleh Surplus/(Defisit)-LRA sebesar (Rp72.424.223.919,00).

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah) :

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)		Tahun Anggaran 2022 (Audited)	
	Anggaran Perubahan	Realisasi	Anggaran Perubahan	Realisasi
Pendapatan-LRA	2.750.000,00	5.373.950,00	300.640.000,00	300.640.000,00
Pendapatan Asli Daerah-LRA	2.750.000,00	5.373.950,00	300.640.000,00	300.640.000,00
Pendapatan Pajak Daerah-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA	0,00	2.623.950,00	297.890.000,00	297.890.000,00
Belanja	73.993.330.116,00	72.429.597.869,00	70.701.864.480,00	61.940.413.465,00
Belanja Operasi	69.143.137.818,00	67.842.616.091,00	70.199.729.937,00	61.442.138.184,00
Belanja Pegawai	42.345.057.076,00	41.727.957.027,00	45.849.089.265,00	37.974.994.564,00
Belanja Barang dan Jasa	26.798.080.742,00	26.114.659.064,00	24.350.640.672,00	23.467.143.620,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	4.850.192.298,00	4.586.981.778,00	502.134.543,00	498.275.281,00
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.752.199.093,00	1.704.393.778,00	502.134.543,00	498.275.281,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.097.993.205,00	2.882.588.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus/(Defisit)-LRA	-73.990.580.116,00	-72.424.223.919,00	-70.401.224.480,00	-61.639.773.465,00

2. NERACA

Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp38.405.487.889,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp52.709.000,00 , Aset Tetap sebesar Rp38.048.238.414,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp304.540.475,00 .

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp209.055.620,00 yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp38.201.397.103,00 .

Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 dapat disajikan pada tabel berikut dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Aset Lancar	52.709.000,00	108.653.715,00
Aset Tetap	38.048.238.414,00	9.469.327.774,00
Aset Lainnya	304.540.475,00	304.540.475,00
Jumlah Aset	38.405.487.889,00	9.882.521.964,00
Kewajiban Jangka Pendek	209.055.620,00	261.535.770,00
Jumlah Kewajiban	209.055.620,00	261.535.770,00
Ekuitas	38.196.432.269,00	9.620.986.194,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	38.405.487.889,00	9.882.521.964,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menunjukkan kinerja sesungguhnya Badan Kepegawaian Daerah dalam Tahun Anggaran 2023. Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp64.951.950,00 , Beban Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp69.691.304.531,00 , Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran Rp0,00 dan Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp69.626.352.581,00).

Ringkasan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Pendapatan-LO	64.951.950,00	62.328.000,00
Beban	69.691.304.531,00	63.124.874.500,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-69.626.352.581,00	-63.062.546.500,00
Pos Luar Biasa	0,00	0,00
Surplus/(Defisit)-LO	-69.626.352.581,00	-63.062.546.500,00

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/(defisit)-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.620.986.194,00, Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp69.626.352.581,00) , RK PPKD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp72.424.223.919,00 , RA PPKD (Perolehan) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp29.232.553.025,00 , RA PPKD (Penyusutan) Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp3.431.211.382,00) , Ekuitas Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp23.766.906,00) , dan Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp38.196.432.269,00 .

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Ekuitas Awal	9.620.986.193,13	10.736.403.918,57
Surplus/(Defisit)-LO	(Rp69.626.352.581)	-63.062.546.500,00
RK PPKD	72.424.223.919,00	61.639.773.465,00
RA PPKD (Perolehan)	29.232.553.025,00	-2.022.933.960,14
RA PPKD (Penyusutan)	(3.431.211.382,00)	1.971.958.102,69
Ekuitas	(23.766.906,00)	358.331.167,01
Ekuitas Akhir	38.196.432.269,00	9.620.986.193,13

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang terdiri dari Pendapatan – LRA, Belanja dan Pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah. Sementara itu, dalam penyajian Laporan Operasional yang terdiri dari Pendapatan – LO dan Beban; Neraca yang terdiri dari Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah.

Dalam CaLK ini diungkapkan juga kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 31-Des-2023 Audited	Lebih / (Kurang)	%	Realisasi 31-Des-2022 Audited
1	2	3	7	8 = 7 - 3	9 = 7 / 3 * 100	10
4	Pendapatan					
4.1	Pendapatan Asli Daerah	2.750.000,00	5.373.950,00	2.623.950,00	195,42	300.640.000,00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	2.750.000,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	2.623.950,00	2.623.950,00	0,00	297.890.000,00
4.2	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pajak (DBH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.02	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.02.01	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Jumlah Pendapatan	2.750.000,00	5.373.950,00	2.623.950,00	195,42	300.640.000,00
5	Belanja					
5.1	Belanja Operasi	69.143.137.818,00	67.842.616.091,00	-1.300.521.727,00	98,12	61.442.138.184,00
5.1.01	Belanja Pegawai	42.345.057.076,00	41.727.957.027,00	-617.100.049,00	98,54	37.974.994.564,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.798.080.742,00	26.114.659.064,00	-683.421.678,00	97,45	23.467.143.620,00
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Belanja Modal	4.850.192.298,00	4.586.981.778,00	-263.210.520,00	94,57	498.275.281,00
5.2.01	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	1.752.199.093,00	1.704.393.778,00	-47.805.315,00	97,27	498.275.281,00
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	3.097.993.205,00	2.882.588.000,00	-215.405.205,00	93,05	0,00
5.2.04	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01	Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Pajak ke Kab/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jumlah Belanja	73.993.330.116,00	72.429.597.869,00	-1.563.732.247,00	97,89	61.940.413.465,00
	SURPLUS / (DEFISIT) - LRA	-73.990.580.116,00	-72.424.223.919,00	1.566.356.197,00		-61.639.773.465,00
6	Pembiayaan					
6.1	Penerimaan Pembiayaan					
6.1.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan					
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-73.990.580.116,00	-72.424.223.919,00	1.566.356.197,00		-61.639.773.465,00

Bandung, 21 Mei 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



NERACA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

No	Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)
1	2	4	5
1	ASET		
1.1	ASET LANCAR		
1.1.1	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
	Kas di BLUD	0,00	0,00
	Kas Lainnya	0,00	0,00
1.1.3	Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
1.1.4	Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
1.1.5	Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	70.200.000,00
1.1.7	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.1.8	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.1.9	Bagian Lancar Piutang Sewa	0,00	0,00
1.1.10	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
1.1.11	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang BLUD	0,00	0,00
1.1.12	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
1.1.13	Persediaan	52.709.000,00	38.453.715,00
	Persediaan BLUD	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	52.709.000,00	108.653.715,00
1.2	ASET TETAP		
1.2.1	Tanah	29.003.280.000,00	3.393.780.000,00
1.2.2	Peralatan dan Mesin	26.269.156.341,00	24.543.316.403,00
1.2.3	Gedung dan Bangunan	8.931.579.615,00	2.645.732.540,00
1.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	205.841.367,00	205.841.367,00
1.2.5	Aset Tetap Lainnya	144.512.055,00	144.512.055,00
1.2.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.2.7	Akumulasi Penyusutan	-26.506.130.964,00	-21.463.854.591,00
	Jumlah Aset Tetap	38.048.238.414,00	9.469.327.774,00
1.3	ASET LAINNYA		
1.3.1	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
1.3.2	Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.3.3	Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.3.4	Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa	0,00	0,00
1.3.5	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.3.6	Aset Tidak Berwujud	145.500.000,00	145.500.000,00
1.3.7	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-145.500.000,00	-145.500.000,00
1.3.8	Aset Lain-lain	3.508.083.848,00	3.508.083.848,00
1.3.9	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-3.203.543.373,00	-3.203.543.373,00
	Jumlah Aset Lainnya	304.540.475,00	304.540.475,00
	JUMLAH ASET	38.405.487.889,00	9.882.521.964,00
2	KEWAJIBAN		
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2.1.2	Pendapatan Diterima Dimuka	173.769.167,00	231.905.763,00
2.1.3	Utang Belanja	35.286.453,00	29.630.007,00
2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	209.055.620,00	261.535.770,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	209.055.620,00	261.535.770,00
3	EKUITAS	38.196.432.269,00	9.620.986.194,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	38.405.487.889,00	9.882.521.964,00

Bandung, 21 Mei 2024
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT


H. Sumasna, ST., MUM
NIP. 19681216 199803 1 003

LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	TAHUN ANGGARAN 2023 (AUDITED)	TAHUN ANGGARAN 2022 (AUDITED)	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7 = (4/5)x100%
I	KEGIATAN OPERASIONAL					
I.1	PENDAPATAN	5.4.2.1				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.2.1.1				
	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.2.1.1.2	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	5.4.2.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lain-lain PAD Yang sah	5.4.2.1.1.4	62.201.950,00	59.578.000,00	2.623.950,00	4,40
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		64.951.950,00	62.328.000,00	2.623.950,00	4,21
I.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.4.2.1.2				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	5.4.2.1.2.1				
	Dana Bagi Hasil Pajak	5.4.2.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.4.2.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Alokasi Umum	5.4.2.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Alokasi Khusus	5.4.2.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Penyesuaian	5.4.2.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	TRANSFER ANTAR DAERAH	5.4.2.1.2.2				
	Bantuan Keuangan	5.4.2.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer		0,00	0,00	0,00	0,00
I.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.4.2.1.3				
	Pendapatan hibah	5.4.2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Lainnya	5.4.2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN		64.951.950,00	62.328.000,00	2.623.950,00	4,21
II	BEBAN					
II.1	BEBAN OPERASI	5.4.2.2				
	Beban Pegawai	5.4.2.2.1	41.720.418.467,00	37.974.994.564,00	3.745.423.903,00	9,86
	Beban Persediaan	5.4.2.2.2	3.945.354.478,00	3.043.754.504,00	901.599.974,00	29,62
	Beban Jasa	5.4.2.2.3	12.074.062.122,00	12.939.822.546,00	-865.740.424,00	-6,69
	Beban Pemeliharaan	5.4.2.2.4	1.375.732.662,00	890.481.799,00	485.250.863,00	54,49
	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.2.5	8.808.980.963,00	6.496.688.385,00	2.312.292.578,00	35,59
	Beban Bunga	5.4.2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Subsidi	5.4.2.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Hibah	5.4.2.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.2.10	1.666.478.049,00	1.772.223.942,00	-105.745.893,00	-5,97
	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Transfer	5.4.2.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Lain-lain	5.4.2.2.13	100.257.790,00	6.908.760,00		1.351,17
	Jumlah Beban Operasi		69.691.304.531,00	63.124.674.500,00	6.566.430.031,00	10,40
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	5.4.2.3	-69.626.352.581,00	-63.062.546.500,00	-6.563.806.081,00	10,41
II.2	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.2.4				
	SURPLUS NON OPERASIONAL	5.4.2.4.1				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Surplus Non Operasional		0,00	0,00	0,00	0,00
II.3	DEFISIT NON OPERASIONAL	5.4.2.4.2				
	Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Defisit Non Operasional		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	5.4.2.5	-69.626.352.581,00	-63.062.546.500,00	-6.563.806.081,00	10,41
III	POS LUAR BIASA	5.4.2.6				
III.1	PENDAPATAN LUAR BIASA					
	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
III.2	BEBAN LUAR BIASA					
	Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
	POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
IV	SURPLUS/DEFISIT LO	5.4.2.7	-69.626.352.581,00	-63.062.546.500,00	-6.563.806.081,00	10,41

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Bandung, 21 Mei 2024
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
H. Sumasna, ST., MUM
NIP. 19681216 199803 1 003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

URAIAN	AUDITED 2023	AUDITED 2022
EKUITAS AWAL	9.620.986.194,00	10.736.403.918,57
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	-69.626.352.581,00	-63.062.546.500,00
RK PPKD	72.424.223.919,00	61.639.773.465,00
RA PPKD (Nilai Perolehan)	29.232.553.025,00	-2.022.933.960,14
RA PPKD (Akumulasi Penyusutan)	-3.431.211.382,00	1.971.958.102,69
EKUITAS	-23.766.906,00	358.331.167,01
KOREKSI SALDO AWAL KAS	0,00	0,00
KAS LAINNYA (BLUD)	0,00	0,00
KOREKSI SETORAN KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN TAHUN LALU	0,00	0,00
KOREKSI SETORAN KAS DI BP TAHUN LALU	0,00	0,00
KOREKSI PIUTANG	0,00	6.406.237,00
KOREKSI PENYISIHAN PIUTANG	0,00	0,00
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	-1.441.404,00	0,00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	157,06
KOREKSI INVESTASI PERMANEN	0,00	0,00
KOREKSI KEMITRAAN PIHAK KETIGA	0,00	0,00
KOREKSI BAGIAN LANCAR PIUTANG SEWA	0,00	0,00
KOREKSI BAGIAN LANCAR PIUTANG TPA	0,00	0,00
KOREKSI BAGIAN LANCAR PIUTANG TGR	0,00	0,00
EKUITAS - KOREKSI KDP	0,00	0,00
EKUITAS - KOREKSI PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	0,00	0,00
KOREKSI PENCATATAN PENYERTAAN MODAL DAERAH	0,00	0,00
KOREKSI NILAI ASET TETAP	0,00	118,99
KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	55.413.058,00	356.049.666,62
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
KOREKSI NILAI ASET TAK BERWUJUD	0,00	0,00
KOREKSI NILAI ASET LAIN-LAIN	0,00	11,08
KOREKSI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	0,00	-4.125.000,00
KOREKSI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN	0,00	-23,74
KOREKSI KEWAJIBAN	0,00	0,00
KOREKSI UTANG BELANJA	-7.538.560,00	0,00
KOREKSI LAIN-LAIN PAD YANG SAH	0,00	0,00
KOREKSI KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-70.200.000,00	0,00
KOREKSI BEBAN BARANG DAN JASA	0,00	0,00
KOREKSI NILAI EKSTRAKOMTABEL	0,00	0,00
LAIN - LAIN	0,00	0,00
PEMBAYARAN PIUTANG BAGIAN LANCAR TGR	0,00	0,00
PEMBAYARAN PIUTANG LAIN-LAIN	0,00	0,87
EKUITAS AKHIR	38.196.432.269,00	9.620.986.194,00

Bandung, 21 Mei 2024

KETUA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Perangkat Daerah, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan Perangkat Daerah yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, pengambilan keputusan serta menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Berbasis Akrual;
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 160 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat;
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3 INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS AKUNTANSI

Domisili dan Bentuk Hukum Entitas serta Jurisdiksi Tempat Entitas Berada

Badan Kepegawaian Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inpektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan pada tanggal 19 November 2008 beralamat di Jalan Ternate No. 2 Telepon (022) 4235026, Faximile : (022) 4203960 Bandung – 40115.

Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokok

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dimana Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, mutasi dan promosi, pengembangan aparatur serta penilaian kinerja aparatur dan penghargaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- b. Penyelenggaraan perencanaan yang menjadi kewenangan daerah provinsi
- c. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Badan
- d. Penyelenggaraan administrasi Badan

- e. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- f. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan kegiatan operasionalnya di bidang kepegawaian berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi .

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan laporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, dengan beberapa modifikasi dan penambahan yang dianggap perlu untuk tujuan kelengkapan dalam pelaporan keuangan, sebagai berikut:

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Informasi Umum tentang Entitas Akuntansi
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Strategis, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Strategis
- 2.3 Kebijakan Keuangan
- 2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target APBD
- 3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.3 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi
- 4.2 Pendekatan penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.3.1 Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.3.2 Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.3.3 Catatan Penting Lainnya
- 5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
 - 5.3.4 Penjelasan Umum Neraca
 - 5.3.5 Penjelasan Per Pos Neraca
 - 5.3.6 Catatan Penting Lainnya
- 5.3 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - 5.3.1 Penjelasan Umum Laporan Operasional
 - 5.3.2 Penjelasan Per Pos Laporan Operasional
 - 5.3.3 Catatan Penting Lainnya
- 5.4 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.4.1 Penjelasan Per Pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.4.2 Catatan Penting Lainnya

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non-Keuangan Perangkat Daerah

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN STRATEGIS, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Indikator makro yang mempengaruhi perumusan strategi dan penyusunan anggaran Badan Kepegawaian Daerah adalah sasaran, indikator sasaran, dan program yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJ Perangkat Daerah) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat serta Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	6
2	Program Kepegawaian Daerah	4
JUMLAH		10

2.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Salah satu instrumen untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan prima adalah perumusan perencanaan strategik. Dengan perumusan perencanaan strategik yang dikomunikasikan kepada seluruh lapisan pegawai, maka diharapkan tantangan perubahan zaman dapat disikapi dengan arif dan bijak.

Perencanaan strategik Badan Kepegawaian Daerah merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Dalam

rangka mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, dengan visi yaitu :

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan pelayanan pemerintahan umum berdasarkan asas otonomi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, menjadi bagian dari Perangkat Daerah yang mengemban amanah untuk mewujudkan misi ke 5 Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu:

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintahan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota”.

Dalam lingkup bidang kepegawaian, misi ini mengisyaratkan perlunya Badan Kepegawaian Daerah selaku unsur penunjang bidang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan reformasi birokrasi pad bidang manajemen ASN, dengan fokus antara lain: sinergitas manajemen ASN, pengembangan kompetensi, peningkatan disiplin, evaluasi jabatan, penerapan sistem penilaian kinerja individu, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen talenta, penyesuaian pola, lingkungan dan tempat kerja.

Untuk pencapaian hal tersebut, telah diterjemahkan dalam beberapa strategi yang ditempuh oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah diatas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan upaya sebagai-berikut :

1. Penyempurnaan Penerapan Sistem Merit menuju target 390 di Tahun 2023;
2. Pembangunan UPTD Manajemen Talenta dan Pengembangan Kompetensi;;
3. Penerapan Kebijakan Manajemen Talenta;
4. Pembangunan *Big Data* Kepegawaian;
5. *Human Capital Development Strategy*;
6. Integrasi Sistem Kepegawain Provinsi dengan Sistem Pusat dan Kab Kota;
7. Transfer sistem informasi *e-government* ke Kabupaten/Kota
8. Pengembangan fitur layanan kepegawaian berbasis elektronik;
9. Transformasi Kelembagaan dan Mekanisme Kerja Baru.;

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Badan Kepegawaian Daerah, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan Badan Kepegawaian Daerah yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, pengambilan keputusan serta menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

2.3 KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2023 didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sedangkan kebijakan pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Berbasis Akrua;
3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 160 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

2.4 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Gubernur Provinsi Jawa Barat) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dibawah ini adalah Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2018 - 2023 :

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran IKU	Target
1.	Mewujudkan ASN yang Profesional, Berintegritas, Netral dan Berkinerja Tinggi.	Indeks Sistem Merit	390

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari Perencanaan Kinerja Tahunan sangat penting dilakukan oleh Pimpinan Instansi di lingkungan pemerintahan, karena merupakan wahana proses dalam memberikan perspektif mengenai hal yang diinginkan untuk dihasilkan Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan Perencanaan Kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Badan Kepegawaian Daerah akan lebih baik. Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2018 - 2023, dan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET APBD

Pendapatan-LRA

Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.373.950,00 atau 195,42 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp2.750.000,00 . Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp2.750.000,00 Pendapatan Transfer sebesar Rp0,00 dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp2.623.950,00 .

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA sebesar Rp5.373.950,00 atau 195,42 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp2.750.000,00 , terdiri dari:

1. Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .
2. Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp2.750.000,00 atau 100,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp2.750.000,00 .
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp0,00 atau 0,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .
4. Lain-lain PAD yang Sah-LRA sebesar Rp2.623.950,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .

Ringkasan Laporan Realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun Anggaran 2023	%	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%	6
1	Pendapatan Asli Daerah-LRA	2.750.000,00	5.373.950,00	195,42	300.640.000,00
	- Pendapatan Pajak Daerah-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	2.750.000,00	2.750.000,00	100,00	2.750.000,00

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun Anggaran 2023	%	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)
	- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Lain-lain PAD yang Sah - LRA	0,00	2.623.950,00	0,00	297.890.000,00
2	Pendapatan Transfer – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pajak (DBH)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Bantuan keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Pendapatan Lainnya Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		2.750.000,00	5.373.950,00	195,42	300.640.000,00

Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2022, berarti realisasi Pendapatan-LRA Tahun anggaran 2023 turun sebesar (Rp295.266.050,00) atau -98,09 persen dibanding Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp300.640.000,00 .

Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp72.429.597.869,00 atau 97,89 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp73.993.330.116,00 .

Rincian Belanja Tahun Anggaran 2023 berdasarkan jenis belanjanya adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar Rp67.842.616.091,00 atau 98,12 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp69.143.137.818,00 , terdiri dari:
 1. Belanja Pegawai sebesar Rp41.727.957.027,00 atau 98,54 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp42.345.057.076,00 .
 2. Belanja Barang dan jasa sebesar Rp26.114.659.064,00 atau 97,45 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp26.798.080.742,00 .
- b. Belanja Modal sebesar Rp4.586.981.778,00 atau 94,57 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp4.850.192.298,00 , terdiri dari:
 1. Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.704.393.778,00 atau 97,27 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp1.752.199.093,00 .
 2. Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.882.588.000,00 atau 93,05 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp3.097.993.205,00 .

Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun Anggaran 2023	%	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} \times 100\%$	6
1	Belanja Operasi	69.143.137.818,00	67.842.616.091,00	98,12	61.442.138.184,00
	- Belanja Pegawai	42.345.057.076,00	41.727.957.027,00	98,54	37.974.994.564,00
	- Belanja Barang & jasa	26.798.080.742,00	26.114.659.064,00	97,45	23.467.143.620,00

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun Anggaran 2023	%	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)
	- Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal	4.850.192.298,00	4.586.981.778,00	94,57	498.275.281,00
	- Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Peralatan dan Mesin	1.752.199.093,00	1.704.393.778,00	97,27	498.275.281,00
	- Belanja Gedung dan Bangunan	3.097.993.205,00	2.882.588.000,00	93,05	0,00
	- Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Pajak ke Kab/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		73.993.330.116,00	72.429.597.869,00	0,00	61.940.413.465,00

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp61.940.413.465,00 , berarti realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 meningkat sebesar Rp10.489.184.404,00 atau 16,93 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

tidak mengalami perubahan Realisasi penyerapan belanja pada tahun 2023 belum optimal disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Terdapat penambahan anggaran yang sifatnya penyediaan untuk belanja modal pembangunan Gedung Assesment Center
2. Jadwal kegiatan pelaksanaan yang banyak mengalami perubahan diakibatkan kebijakan dari internal maupun eksternal, dan
3. Ketidaksesuaian uraian rincian objek belanja (komponen) yang dibutuhkan dalam kode rekening.

Surplus/(Defisit)-LRA

Surplus/(Defisit)-LRA Tahun Anggaran 2023 dihasilkan dari pengurangan antara Realisasi Pendapatan-LRA dan Realisasi Belanja, yaitu Surplus/(Defisit)-LRA sebesar (Rp72.424.223.919,00).

3.2 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Pendapatan-LO

Realisasi Pendapatan-LO pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp64.951.950,00 yang semuanya merupakan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO, terdiri dari:

- a. Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp2.750.000,00 .
- b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO sebesar Rp62.201.950,00 .

Beban

Beban pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp69.691.304.531,00. Rincian berdasarkan jenis beban adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Beban Pegawai	41.720.418.467,00	37.974.994.564,00
Beban Persediaan	3.945.354.478,00	3.043.754.504,00
Beban Jasa	12.074.082.122,00	12.939.822.546,00
Beban Pemeliharaan	1.375.732.662,00	890.481.799,00
Beban Perjalanan Dinas	8.808.980.963,00	6.496.688.385,00
Beban Hibah	0,00	0,00

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.666.478.049,00	1.772.223.942,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Lain-lain	100.257.790,00	6.908.760,00
Jumlah	69.691.304.531,00	63.124.874.500,00

3.3 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITENTUKAN

Persentase Realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2023 sebesar 195,42 persen.

Persentase Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar 97,89 persen. Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, hal ini disebabkan karena:

1. Jadwal kegiatan pelaksanaan yang banyak mengalami perubahan diakibatkan kebijakan dari internal maupun eksternal;
2. Ketidaksesuaian uraian rincian objek belanja (komponen) yang dibutuhkan dalam kode rekening;

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI

Badan Kepegawaian Daerah beserta jenjang struktural di bawahnya merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Untuk Tahun Anggaran 2023, entitas akuntansi pada Badan Kepegawaian Daerah mencakup:

No	Bidang/Bagian/Satker	Jumlah Subbid/Subbag/Subsatker
1	Kepala Badan	-
2	Sekretariat	1 Subbag
3	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	-
4	Bidang Mutasi dan Promosi	-
5	Bidang Pengembangan Aparatur	-
6	Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Fungsional	-
Jumlah Subbid/Subbag/Subsatker		0 Subbid/ 1 Subbag/ 0 Seksi

Sedangkan penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang meliputi pencatatan barang milik daerah (aset tetap dan persediaan) dalam rangka menghasilkan akun laporan neraca dilakukan oleh Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu, yang mencakup:

No	Pengelola BMD	Jumlah
1	Kasubbag Umum/Pegawai	1 Orang
2	Pengurus Barang	1 Orang

3	Pengurus Barang Pembantu	2 Orang
Total		4 Orang

4.2 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Badan Kepegawaian Daerah yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah disusun berdasarkan proses akuntansi yang menghasilkan data/laporan keuangan dari seluruh satuan kerja beserta jenjang struktural dibawahnya yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah.

Laporan Keuangan yang disajikan dihasilkan melalui proses akuntansi keuangan dan proses pencatatan barang milik daerah.

Proses akuntansi dan pencatatan tersebut dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran seluruh unit kerja yang berada dibawah Badan Kepegawaian Daerah. Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan-LRA dan Belanja

2. Neraca

Neraca disusun berdasarkan perhitungan akuntansi yang menghasilkan saldo akun-akun neraca dari seluruh unit kerja yang berada dibawah Badan Kepegawaian Daerah.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional disusun berdasarkan perhitungan akuntansi yang menghasilkan saldo akun-akun Laporan Operasional dari seluruh unit kerja yang berada di bawah Badan Kepegawaian Daerah. Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Surplus dan Defisit-LO.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan perhitungan akuntansi yang menghasilkan saldo akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas seluruh unit kerja yang berada di bawah Badan Kepegawaian Daerah.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta dalam rangka pengungkapan yang memadai.

4.3 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah disusun menggunakan basis akrual untuk pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas pada Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, yaitu diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian yang berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan dari Kas Umum Daerah.

Sedangkan untuk pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan menggunakan basis kas pada Laporan Realisasi Anggaran, yaitu diakui pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Daerah atau di Bendahara Penerimaan Badan Kepegawaian Daerah atau saat kas dibayar dari Kas Umum Daerah.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

4.4 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak

pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau SK PERANGKAT DAERAH atau entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas dicatat berdasarkan azas bruto tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pendapatan-LRA dinilai sebesar nilai tercatat. Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas Pendapatan-LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Belanja dinilai sebesar nilai tercatat. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas Belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

(3) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO dicatat sebesar nilai yang tertera pada dokumen pendukung pendapatan berdasarkan azas bruto. Pendapatan-LO dinilai sebesar nilai tercatat. Pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi sumber pendapatan.

Dengan basis akrual, Pendapatan-LO diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan;
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi berupa penerimaan kas di Bendahara Penerimaan atau di Rekening Kas Umum Daerah maupun sumber daya ekonomi non kas yang diterima oleh entitas.

(4) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan. Beban disajikan pada Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonomi.

(5) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak memenuhi kriteria tersebut, dikategorikan sebagai aset non lancar.

1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika (1) diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan, atau (2) berupa kas dan setara kas.

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, dan beban dibayar di muka.

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal neraca.

Investasi Jangka Pendek dicatat sebesar nilai perolehan, yaitu jumlah uang yang ditempatkan atau dikeluarkan untuk memperoleh investasi tersebut. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri, ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga (saham dan obligasi jangka pendek) diperoleh tanpa biaya perolehan maka investasi itu dinilai berdasarkan nilai wajar yaitu harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham (deposito jangka pendek) diukur sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Pengukuran **Piutang** dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi yang menjadi hak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Piutang dinilai sebesar jumlah yang dapat direalisasikan, setelah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih, dan penghapusan piutang. Piutang pada tanggal Neraca disajikan secara wajar sesuai dengan nilai piutang yang dapat ditagih (net realizable value). Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak.

Untuk menghasilkan nilai piutang secara wajar maka dilakukan **Penyisihan Piutang Tak Tertagih**. Pada akhir periode anggaran dilakukan analisis atas kemungkinan nilai piutang yang dapat ditagih maupun yang tidak dapat ditagih. Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang didasarkan pada umur piutang, dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan, karena jenis piutang sangat bervariasi

dan kemungkinan tidak tertagih juga sangat bervariasi, tergantung pada karakteristik piutang yang bersangkutan.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penyisihan piutang yang tidak dapat ditagih dilakukan setiap akhir periode pelaporan. Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih menggunakan pendekatan neraca (balance sheet), yaitu dengan cara perhitungan daftar umur piutang (aging schedule). Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debeturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat:

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; atau
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah

Pengukuran Persediaan adalah sebagai berikut:

- a. Harga perolehan jika Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;

- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*);
- d. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Persediaan dinilai dengan metoda Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) atau *First In First Out* (FIFO).

Persediaan biologis adalah persediaan yang mengalami pertumbuhan, seperti hewan dan tumbuhan. Pada saat perolehan pertama kali, aset biologis diukur dengan:

- a. Harga perolehan, atau
- b. Nilai wajar jika harga perolehan tidak tersedia.

Pada saat terjadi transformasi biologis, maka aset biologis akan diukur sebesar nilai wajar. Contohnya sapi yang melahirkan anak maka anak sapi tersebut diukur sebesar nilai wajar.

Persediaan biologis diukur setiap akhir periode akuntansi berdasarkan nilai wajar. Selisih nilai wajar akibat transformasi biologis akan diakui sebagai:

- a. Pendapatan non operasional, jika terjadi penambahan nilai wajar; dan
- b. Beban non operasional, jika terjadi pengurangan nilai wajar.

Nilai Wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Beban Dibayar Dimuka merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang merupakan klaim pihak tertentu yang pelunasannya dalam bentuk selain kas. Beban Dibayar Dimuka timbul akibat pembelian (belanja) barang/Jasa atau aktiva lain yang belum diterima atau belum sepenuhnya diterima oleh Pemda.

2. Aset Non Lancar

Aset Non Lancar meliputi semua aset selain yang termasuk pada dua kriteria aset lancar. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tidak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang

digunakan masyarakat umum. Aset Non Lancar meliputi Investasi jangka panjang, Aset tetap, Dana Cadangan dan Aset lainnya.

4. **Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi non permanen dan investasi permanen.

(i) **Investasi Non Permanen**

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi Non Permanen meliputi:

- (1) pinjaman kepada perusahaan negara;
- (2) pinjaman kepada perusahaan daerah;
- (3) pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya;
- (4) investasi dalam surat utang negara;
- (5) investasi dalam proyek pembangunan;
- (6) investasi nonpermanen lainnya.

(ii) **Investasi Permanen**

Investasi Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen terdiri dari penyertaan modal di perusahaan daerah dan di perusahaan negara.

Investasi Permanen dinilai menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penilaian investasi permanen dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu:

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan Metode biaya; Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

- Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

5. Aset Tetap

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset Tetap dilaporkan pada neraca Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2023 berdasarkan harga perolehan dan/atau berdasarkan penilaian kembali oleh Tim Penertiban Aset BMD.

Aset Tetap dinilai sebesar biaya perolehan. Apabila biaya perolehan aset tetap tidak tersedia, maka nilai aset tetap dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Belanja Modal yang nilainya dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap, tidak disajikan sebagai aset tetap di Neraca, namun dicatat tersendiri sebagai *Extracomptable*.

Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Suatu pengeluaran dikapitalisasi menjadi aset tetap, jika memenuhi kriteria :

- a. Dibayarkan melalui mekanisme belanja modal;
- b. Jumlah pengeluaran minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) unit barang;
- c. Jumlah pengeluaran minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk per grup;
- d. Aset yang diperoleh memenuhi kriteria aset tetap.

Aset tetap, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, disusutkan untuk menunjukkan penurunan nilai dan manfaatnya. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu

aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus.

6. Dana Cadangan

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Pembentukan Dana Cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

7. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak berwujud, dan Aset Lain-lain.

Tagihan Jangka Panjang terdiri atas Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dan Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa.

(i) **Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran** menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

(ii) **Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

(iii) **Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa**

menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari sewa aset pemerintah daerah kepada pihak ketiga yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca. Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dan Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Aset Lainnya.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga dapat berupa Pihak Ketiga-Sewa yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) yang dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji, Bangun Guna Serah (BGS)/ *Build Operate Transfer* (BOT) yang dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut, atau Bangun Serah Guna (BGS)/ *Build Transfer Operate* (BTO) yang dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Aset kerjasama/kemitraan selain tanah dilakukan penyusutan dengan metode garis lurus. Masa manfaat dan nilai residu dipersamakan dengan masa manfaat dan nilai residu jenis aset yang sama di Aset Tetap

Aset Tidak Berwujud adalah aset nonkeuangan, termasuk hak atas kekayaan intelektual, yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki oleh Pemerintah Provinsi untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

Aset Tidak Berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tidak Berwujud, suatu aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Aset nonkeuangan;
- b. Tidak berwujud;
- c. Biaya perolehan dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

- f. Dapat diidentifikasi;
- g. Dapat dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- h. Mempunyai potensi manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan lebih dari dua belas bulan

Terhadap aset tidak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi kedalam *Aset Lain-lain*. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Di samping itu, piutang macet Perangkat Daerah yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional; perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah; kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya dan Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya; kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek yaitu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, dan Utang Belanja.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai ***Kewajiban Jangka Panjang*** jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas diakui pada saat terjadi kenaikan atau penurunan hak pemerintah atas kekayaan pemerintah, yang diakibatkan oleh adanya surplus/(defisit)-LO, SiLPA/SiKPA, serta penutupan saldo Perubahan SAL. Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

4.5 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP ENTITAS AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas pos-pos Laporan Keuanganseluruhnya sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.373.950,00 atau 195,42 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp2.750.000,00 .

Realisasi Pendapatan - LRA pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.373.950,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp300.640.000,00 . Hal ini berarti realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2023 menurun sebesar (Rp295.266.050,00) dibanding Tahun Anggaran 2022.

Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.373.950,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LRA sebesar Rp2.750.000,00 ,Pendapatan Transfer-LRA sebesar Rp0,00 , Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LRA sebesar Rp2.623.950,00 . Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.373.950,00 atau 195,42 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp2.750.000,00 , terdiri dari:

- a. Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 ;
- b. Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp2.750.000,00 atau 100,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp2.750.000,00 ;
- c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LRA sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 ;
- d. Lain-lain PAD yang Sah-LRA sebesar Rp2.623.950,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .

Realisasi Pendapatan Transfer-LRA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 , terdiri dari :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 ;
- b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 ;

- c. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .

Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LRA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 , terdiri dari :

- a. Pendapatan Hibah sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 ;
- b. Pendapatan Lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp0,00 atau 0,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .

Trend realisasi Pendapatan selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik Trend Realisasi Pendapatan
Tahun Anggaran 2019 s.d 2023



Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp72.429.597.869,00 atau 97,89 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp73.993.330.116,00 . Realisasi Belanja ini berasal dari Belanja Operasi sebesar Rp67.842.616.091,00 , Belanja Modal sebesar Rp4.586.981.778,00 , Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0,00 , dan Belanja Transfer sebesar Rp0,00 .

Belanja Operasi sebesar Rp67.842.616.091,00 atau 98,12 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp69.143.137.818,00 , terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp41.727.957.027,00 atau 98,54 dari yang dianggarkan sebesar Rp42.345.057.076,00 ;

- 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp26.114.659.064,00 atau persen 97,45 dari yang dianggarkan sebesar Rp26.798.080.742,00 ;
- 2) Belanja Bunga sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 ;
- 3) Belanja Subsidi sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 ;
- 4) Belanja Hibah sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 ;
- 5) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .

Belanja Modal sebesar Rp4.586.981.778,00 atau 94,57 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp4.850.192.298,00 , terdiri dari:

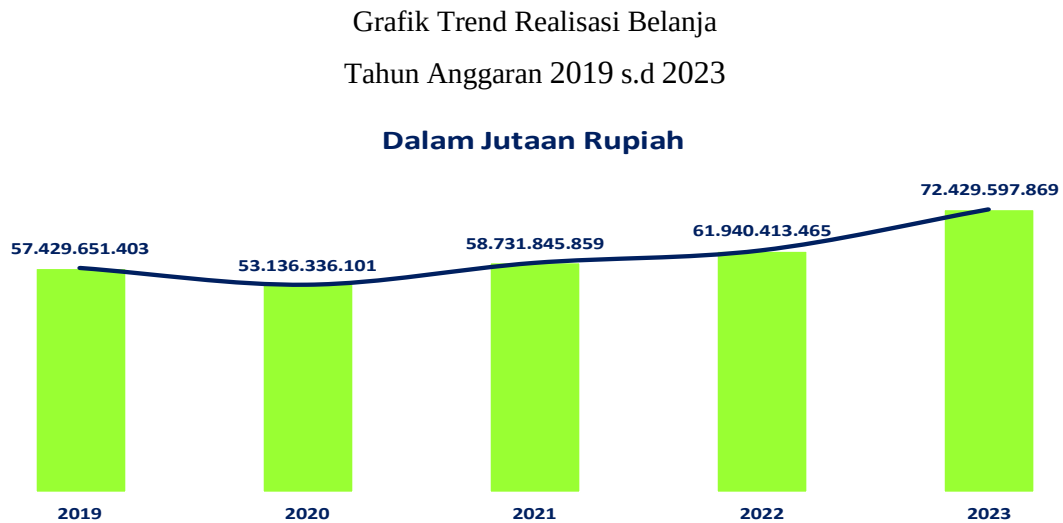
- 1) Belanja Modal Tanah sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 ;
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.704.393.778,00 atau 97,27 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp1.752.199.093,00 ;
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.882.588.000,00 atau 93,05 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp3.097.993.205,00 ;
- 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 ;
- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 ;

Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0,00 atau 0,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00

Belanja Transfer sebesar Rp0,00 atau 0,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 , terdiri dari :

- 1) Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota sebesar Rp0,00 atau 0,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 ;
- 2) Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp0,00 atau 0,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .

Trend realisasi Belanja selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 meningkat dibandingkan Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan realisasi Pendapatan-LRA sebesar Rp5.373.950,00 dan realisasi Belanja sebesar Rp72.429.597.869,00 maka terjadi Surplus/(Defisit)-LRA sebesar (Rp72.424.223.919,00).

5.1.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.2.1 Pendapatan-LRA

Realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.373.950,00 atau 195,42 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp2.750.000,00 .

Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp300.640.000,00 , berarti realisasi Pendapatan-LRA menurun dibanding Tahun Anggaran 2022 sebesar -98,21 persen atau sebesar (Rp295.266.050,00).

Realisasi pendapatan pada tahun 2023 tercapai sebesar 100,00 persen, disebabkan beberapa hal diantaranya yang paling signifikan yaitu:

1. Pendapatan Retribusi - LRA yang berasal dari sewa tempat bersifat tetap setiap bulannya sehingga yang terealisasi sama dengan yang dianggarkan

5.1.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA

Realisasi Pendapatan Asli Daerah(PAD)-LRA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.373.950,00

atau 195,42 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp2.750.000,00 . Apabila dibandingkan dengan realisasi PAD-LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp300.640.000,00 , berarti realisasi PAD-LRA menurun sebesar (Rp295.266.050,00) atau -98,21 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Realisasi PAD-LRA sebesar Rp5.373.950,00 ini terdiri dari:

- Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 ;
- Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp2.750.000,00 atau 100,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp2.750.000,00 ;
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LRA sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 ;
- Lain-lain PAD yang Sah-LRA sebesar Rp2.623.950,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .

5.1.2.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .

5.1.2.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.750.000,00 atau 100,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp2.750.000,00 .

Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LRA adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2023	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100
1	Retribusi Jasa Umum	0	0	0,00
2	Retribusi Jasa Usaha	2.750.000	2.750.000	100,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	0	0	0,00
Jumlah		2.750.000	2.750.000	100,00

Pencapaian realisasi Pendapatan Retribusi - LRA tercapai 100,00 persen dari pagu disebabkan beberapa hal, diantaranya yang paling signifikan yaitu:

1. Pendapatan Retribusi - LRA yang berasal dari sewa tempat bersifat tetap setiap bulannya sehingga yang terealisasi sama dengan yang dianggarkan

Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp2.750.000,00 berarti Pendapatan Retribusi Daerah-LRA tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Realisasi Pendapatan Daerah-LRA Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam Rp):

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	%
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
1	Retribusi Jasa Umum	0	0	0,00
2	Retribusi Jasa Usaha	2.750.000	2.750.000	0,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	0	0	0,00
Jumlah		2.750.000	2.750.000	0,00

Pertumbuhan realisasi Pendapatan Retribusi - LRA tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dibanding Tahun Anggaran 2022, hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya yang paling signifikan yaitu tarif sewa retribusi dan jumlah item yang disewakan sama dengan tahun 2022 sehingga tidak mengalami perubahan

5.1.2.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp0,00.

5.1.2.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LRA

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.623.950,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Lain - lain PAD yang Sah-LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp297.890.000,00 , berarti realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA dibanding Tahun Anggaran 2022 menurun sebesar Rp295.266.050,00 atau (99,12) persen.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam Rp):

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	%
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - LRA	2.623.950	0	0,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LRA	0	297.890.000	-100,00
3	Hasil Kerja Sama Daerah – LRA	0	0	0,00
4	Jasa Giro - LRA	0	0	0,00
5	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LRA	0	0	0,00
6	Pendapatan Bunga - LRA	0	0	0,00
7	Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LRA	0	0	0,00
8	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	0	0	0,00
9	Pendapatan Denda Pajak Daerah – LRA	0	0	0,00
10	Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LRA	0	0	0,00
11	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LRA	0	0	0,00
12	Pendapatan Dari Pengembalian – LRA	0	0	0,00
13	Pendapatan BLUD – LRA	0	0	0,00
14	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan – LRA	0	0	0,00
15	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LRA	0	0	0,00
16	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan - LRA	0	0	0,00
Jumlah		2.623.950,00	297.890.000	0,0008

Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LRA meningkat sebesar Rp295.266.050,00 atau 0,0008 persen dibanding Tahun Anggaran 2022, hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya yang paling signifikan yaitu adanya hasil penjualan bangunan dari bongkaran gedung tubagus ismail

5.1.2.2 Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp72.429.597.869,00 atau 97,89 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp73.993.330.116,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen pagu disebabkan beberapa hal diantaranya yang paling signifikan yaitu:

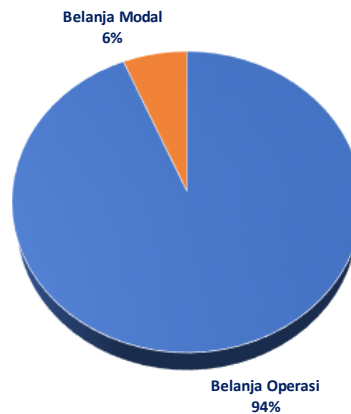
1.
Terdapat beberapa anggaran yang sifatnya penyediaan seperti belanja pegawai dan belanja yang sifatnya tetap;
2.
Terdapat beberapa kegiatan yang mengalami perubahan jadwal pelaksanaan menjadi tahun 2024 karena kebijakan dari instansi pembina terkait.

Realisasi Belanja sebesar Rp72.429.597.869,00 berasal dari Belanja Operasi sebesar Rp67.842.616.091,00 , Belanja Modal sebesar Rp4.586.981.778,00 , Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp0,00 . Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp61.940.413.465,00 , berarti realisasi Belanja meningkat sebesar Rp10.489.184.404,00 atau 16,93 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Realisasi penyerapan Belanja pada Tahun Anggaran 2023 meningkat dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, disebabkan beberapa hal diantaranya yaitubeberapa kegiatan telah diupayakan pelaksanaannya sesuai dengan anggaran yang tersedia sehingga persentase realisasi belanjanya lebih baik dibanding tahun 2023.

Berikut ini disajikan grafik komposisi realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023.

Grafik Komposisi Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2023



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi terbesar dari Belanja berasal dari Belanja Operasi yaitu belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yaitu sebesar Rp67.842.616.091,00 atau 94 persen dari Total Belanja.

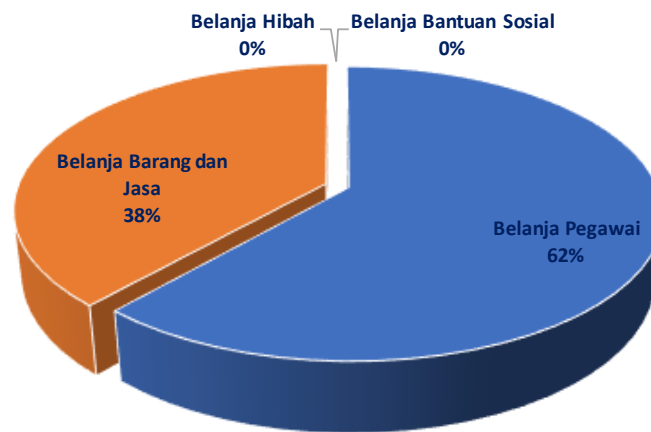
5.1.2.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp67.842.616.091,00 atau 98,12 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp69.143.137.818,00 . Realisasi Belanja Operasi ini berasal dari Belanja Pegawai sebesar Rp41.727.957.027,00 , Belanja Barang dan jasa sebesar Rp26.114.659.064,00 , Belanja Bunga sebesar Rp0,00 , Belanja Subsidi sebesar Rp0,00 , Belanja Hibah sebesar Rp0,00 , dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp0,00 .

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp61.442.138.184,00 , berarti realisasi Belanja Operasi meningkat sebesar Rp6.400.477.907,00 atau 10,42 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Berikut ini disajikan grafik komposisi realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023.

Grafik Komposisi Realisasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2023



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi terbesar dari Belanja Operasi berasal dari Belanja Pegawai yaitu sebesar Rp41.727.957.027,00 atau 62 persen dari Total Belanja Operasi.

5.1.2.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp41.727.957.027,00 atau 98,54 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp42.345.057.076,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain

.....belanja pegawai bersifat penyediaan untuk mengakomodir pegawai yang mengalami mutasi masuk atau keluar sehingga menyebabkan anggaran tidak sepenuhnya direalisasikan

Rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2023	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.222.256.226	9.140.734.490	99,12
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	6.438.699.260	6.398.422.560	99,37
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	655.261.888	650.389.490	99,26
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	221.600.000	216.500.000	97,70
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	470.883.884	452.434.000	96,08

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 – Audited

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2023	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	190.940.000	187.745.000	98,33
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	399.861.141	397.513.380	99,41
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.338.964	10.949.207	96,56
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	92.596	90.712	97,97
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	780.460.808	774.121.368	99,19
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	13.279.419	13.142.190	98,97
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	39.838.266	39.426.583	98,97
5.1.01.01.13	Belanja Jaminan Hari Tua ASN	0	0	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	33.122.800.850	32.587.222.537	98,38
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	24.222.304.361	24.035.354.271	99,23
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	0	0	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.377.206.536	4.318.846.741	98,67
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	0	0	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	4.523.289.953	4.233.021.525	93,58
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0	0	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	0	0	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0	0	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	0	0	0,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	0	0	0,00
Jumlah		42.345.057.076	41.727.957.027	98,54

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp37.974.994.564,00 , berarti realisasi Belanja Pegawai meningkat sebesar Rp3.752.962.463,00 atau 9,88 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Realisasi belanja pegawai pada tahun 2023 meningkat sebesar 0,00 persen disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu:

1.Terdapat penambahan pegawai dengan nominal belanja pegawai yang cukup signifikan

2. Realisasi belanja pegawai untuk kode rekening Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN meningkat karena bertambahnya pegawai yang mendapatkan penghargaan Employee of The Month (EOTM) dan bertambahnya penghargaan untuk ketua Team of Teams (ToTs)

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	%
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.140.734.490	8.552.596.686	6,88
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	6.398.422.560	6.028.225.280	6,14
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	650.389.490	602.626.881	7,93
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	216.500.000	233.960.000	-7,46
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	452.434.000	333.160.000	35,80
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	187.745.000	197.030.000	-4,71
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	397.513.380	375.135.600	5,97
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.949.207	7.223.372	51,58
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	90.712	89.551	1,30
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	774.121.368	725.910.052	6,64
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	13.142.190	12.308.984	6,77
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	39.426.583	36.926.966	6,77
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0	0	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	32.587.222.537	29.422.397.878	10,76
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	24.035.354.271	22.136.703.017	8,58
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	0	0	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.318.846.741	3.811.508.691	13,31
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	0	0	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	4.233.021.525	3.474.186.170	21,84
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0	0	0,00

Kode Rekening	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	%
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	0	0	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0	0	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	0	0	0,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	0	0	0,00
Jumlah		41.727.957.027	37.974.994.564	9,88

Dari nilai belanja pegawai sebesar Rp41.727.957.027,00 , terdapat belanja pegawai BLUD sebesar Rp0,00

5.1.1.1.1 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp26.114.659.064,00 atau 97,45 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp26.798.080.742,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain :

1.Terdapat belanja yang bersifat penyediaan seperti listrik, telepon, dan biaya tetap lainnya.
2.Terdapat beberapa kegiatan yang mengalami perubahan jadwal pelaksanaan menjadi tahun 2024 karena kebijakan dari instansi pembina terkait

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2023	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.1.02.01	Belanja Barang	3.634.270.892	3.512.422.263	96,65
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.634.270.892	3.512.422.263	96,65
5.1.02.02	Belanja Jasa	12.450.285.036	12.043.425.676	96,73
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.070.344.606	8.903.303.317	98,16

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 – Audited

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2023	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100 %
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	41.974.080	40.250.959	95,89
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.342.281.350	1.317.995.000	98,19
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	92.580.000	91.500.000	98,83
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	48.956.000	40.484.900	82,70
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.141.005.000	963.250.000	84,42
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	713.144.000	686.641.500	96,28
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.289.005.335	1.277.642.662	99,12
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	182.532.882	178.817.250	97,96
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	586.180.000	586.040.000	99,98
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	520.292.453	512.785.412	98,56
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.952.331.979	8.808.980.963	98,40
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.870.593.379	8.727.242.363	98,38
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	81.738.600	81.738.600	100,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	472.187.500	472.187.500	100,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	447.187.500	447.187.500	100,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.000.000	25.000.000	100,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0	0	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0	0	0,00
Jumlah		26.798.080.742	26.114.659.064	97,45

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp23.467.143.620,00 , berarti realisasi Belanja Barang dan jasa meningkat sebesar Rp2.647.515.444,00 atau 11,28 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun 2023 tidak mengalami perubahan disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Terdapat kegiatan yang membutuhkan anggaran yang besar menyebabkan realisasi meningkat

seperti Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) dan Pekan Olahraga Pemerintah Daerah (PORPEMDA)

2. Terdapat beberapa kegiatan baru pada tahun 2023 yang belum ada di tahun 2022

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	%
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.1.02.01	Belanja Barang	3.512.422.263	2.590.289.722	35,60
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.512.422.263	2.590.289.722	35,60
5.1.02.02	Belanja Jasa	12.043.425.676	12.913.741.731	-6,74
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.903.303.317	9.037.759.795	-1,49
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	40.250.959	101.231.936	-60,24
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	0	0	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.317.995.000	1.369.110.000	-3,73
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	91.500.000	128.320.000	-28,69
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	0	0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0	0	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	40.484.900	49.034.000	-17,44
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0	98.200.000	-100,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0	0	0,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	963.250.000	1.779.616.000	-45,87
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	686.641.500	350.470.000	95,92
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0	0	0,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0	0	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.277.642.662	988.558.782	29,24
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	178.817.250	0	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	586.040.000	472.167.182	24,12
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	512.785.412	516.391.600	-0,70
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0	0,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0	0	0,00

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 – Audited

Kode Rekening	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	%
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.808.980.963	6.566.888.385	34,14
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.727.242.363	6.566.888.385	32,90
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	81.738.600	0	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	472.187.500	407.665.000	15,83
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	447.187.500	407.665.000	9,69
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.000.000	0	0,00
5.1.02.05.03	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0	0	0,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0	0	0,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0	0	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0	0	0,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0	0	0,00
Jumlah		26.114.659.064	23.467.143.620	11,28

Dalam realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp26.114.659.064,00 terdapat realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS sebesar Rp26.114.659.064,00 dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	%
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.1.02.01	Belanja Barang	3.512.422.263	2.590.289.727	35,60
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.512.422.263	2.590.289.727	35,60
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0	0,00	0,00
5.1.02.01.03	Belanja Barang Bekas Dipakai	0	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	12.043.425.676	12.913.741.731	(6,74)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.903.303.317	9.037.759.795	(1,49)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	40.250.959	101.231.936	(60,24)
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	0	0	0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.317.995.000	1.369.110.000	(3,73)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	91.500.000	128.320.000	(28,69)
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	0	0
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0	0	0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	40.484.900	49.034.000	(17,44)
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0	98.200.000	(100)

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 – Audited

Kode Rekening	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	%
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0	0	0
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	963.250.000	1.799.616.000	(45,87)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	686.641.500	350.470.000	95,92
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0	0	0
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0	0	0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.277.642.662	988.558.782	29,24
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	178.817.250	0	0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	586.040.000	472.167.182	24,12
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	512.785.412	516.391.600	(0,70)
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0	0
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0	0	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.808.980.963	6.566.888.385	34,14
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.727.242.363	6.566.888.385	34,14
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	472.187.500	407.665.000	15,83
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	447.187.500	390.750.000	6,61
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.000.000	16.915.000	80,90
5.1.02.05.03	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0	0	0
Jumlah		26.114.659.064	23.467.143.620	11,28

5.1.1.1.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.586.981.778,00 atau 94,57 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp4.850.192.298,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain karenaterdapat anggaran yang bersifat penyediaan

Realisasi Belanja Modal ini berasal dari Belanja Tanah sebesar Rp0,00 , Belanja Peralatan

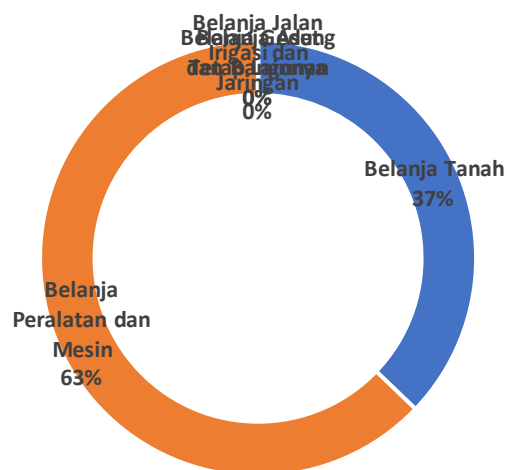
dan Mesin sebesar Rp1.704.393.778,00 , Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.882.588.000,00 , Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp0,00 , Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0,00 .

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp498.275.281,00 , berarti realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 meningkat sebesar Rp4.088.706.497,00 atau 820,57 persen.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 meningkat disebabkan beberapa hal diantaranya yaitumelakukan pembangunan dan rehabilitasi gedung Center of Excelent untuk Aessment Center BKD

Berikut ini disajikan grafik komposisi realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023.

Grafik Komposisi Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2023



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi terbesar dari Belanja Modal berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu sebesar 63 persen dari Total Belanja Modal.

Dalam realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.586.981.778,00 terdapat realisasi Belanja Modal BOS sebesar Rp0,00

5.1.2.2.1 Belanja Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .

5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.704.393.778,00 atau 97,27 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp1.752.199.093,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain

.....terdapat belanja bersifat penyediaan dan akan direalisasikan pada tahun 2024

Rincian realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2023	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0	0	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0	0	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0	0	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0	0	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	940.031.093	915.764.179	97,42
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	27.675.000	26.498.250	95,75
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	837.356.093	815.015.929	97,33
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	75.000.000	74.250.000	99,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	549.400.000	535.778.000	97,52
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	510.150.000	500.780.000	98,16
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	39.250.000	34.998.000	89,17
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0	0	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0	0	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	192.768.000	183.076.999	94,97
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	179.000.000	170.176.998	95,07
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	13.768.000	12.900.001	93,70
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	70.000.000	69.774.600	99,68

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2023	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.2.02.11.01	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	0	0	0,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	70.000.000	69.774.600	99,68
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	0	0	0,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0	0	0,00
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0	0	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0	0	0,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	0	0	0,00
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0	0	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu - Rambu	0	0	0,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0	0	0,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0	0	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0	0	0,00
Jumlah		1.752.199.093	1.704.393.778	97,27

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp498.275.281,00 , berarti realisasi Belanja Peralatan dan Mesin meningkat sebesar Rp1.206.118.497,00 atau 242,06 persen dibanding Tahun Anggaran 2022. Hal ini disebabkan oleh

terdapat realisasi untuk rehabilitasi gedung dan kantor untuk peralatan pada gedung Center of Excelent

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	%
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0	0	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0	0	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0	0	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0	0	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	915.764.179	108.436.037	744,52
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	26.498.250	31.159.000	-14,96
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	815.015.929	77.277.037	954,67

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	%
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	74.250.000	0	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	535.778.000	34.440.000	1.455,69
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	500.780.000	7.840.000	6.287,50
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	34.998.000	26.600.000	31,57
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0	0	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0	0	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	183.076.999	355.399.244	-48,49
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	170.176.998	259.350.000	-34,38
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	12.900.001	96.049.244	-86,57
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	69.774.600	0	0,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	69.774.600	0	0,00
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	0	0	0,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0	0	0,00
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0	0	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0	0	0,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	0	0	0,00
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0	0	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu - Rambu	0	0	0,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0	0	0,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0	0	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0	0	0,00
Jumlah		1.704.393.778	498.275.281	242,06

5.1.2.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.882.588.000,00 atau 93,05 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp3.097.993.205,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain terdapat belanja bersifat penyediaan dan akan direalisasikan pada tahun 2024

Rincian realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 – Audited

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2023	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	3.097.993.205	2.882.588.000	93,05
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.097.993.205	2.882.588.000	93,05
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	0	0	0,00
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	0	0	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	0	0,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0	0	0,00
Jumlah		3.097.993.205	2.882.588.000	93,05

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 , berarti realisasi Belanja Gedung dan Bangunan meningkat sebesar Rp2.882.588.000,00 atau 0,00 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 meningkat disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu terdapat realisasi belanja modal untuk rehabilitasi gedung dan kantor pada gedung Center of Excelent

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	%
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	2.882.588.000	0	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.882.588.000	0	0,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	0	0	0,00
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	0	0	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	0	0,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0	0	0,00
Jumlah		2.882.588.000	0	0,00

5.1.2.2.5 Surplus/(Defisi) – LRA

Berdasarkan realisasi Pendapatan – LRA dan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surplus/(Defisit) - LRA Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar (Rp72.424.223.919,00), dengan perhitungan sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Pendapatan – LRA	2.750.000,00	300.640.000,00
Belanja - LRA	72.429.597.869,00	61.940.413.465,00
Surplus/ (Defisit) – LRA	-72.424.223.919,00	-61.639.773.465,00

5.1.2.5 Perhitungan Anggaran

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar (Rp72.424.223.919,00). Perhitungan Anggaran diperoleh dari selisih antara anggaran dengan realisasinya. Jumlah keseluruhan selisih merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Rincian realisasi Perhitungan Anggaran adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Kekurangan Pendapatan/Pelampauan – LRA	0,00	0,00
Penghematan Belanja	-1.563.732.247,00	9.059.341.015
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00
Penghematan Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	-72.424.223.919,00	-61.639.773.465,00

5.1.2.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar (Rp72.424.223.919,00). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran diperoleh dari selisih realisasi Pendapatan – LRA, Belanja, dan Pembiayaan Netto tahun berkenaan. Jumlah keseluruhan selisih realisasi merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Berdasarkan Defisit–LRA sebesar (Rp72.424.223.919,00), Realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp0,00 , maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar (Rp72.424.223.919,00), dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (<i>Audited</i>)	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (<i>Audited</i>)
Pendapatan – LRA	5.373.950,00	300.640.000,00
Belanja - LRA	72.429.597.869,00	61.940.413.465,00
Surplus / (Defisit) – LRA	-72.424.223.919,00	-61.639.773.465,00
Pembiayaan Netto	0,00	0,00
SILPA	-72.424.223.919,00	-61.639.773.465,00

Dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 .

5.1.3 CATATAN PENTING LAINNYA

-

5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

5.2.1 PENJELASAN UMUM NERACA

Ringkasan Komposisi Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Aset Lancar	52.709.000,00	108.653.715,00
Aset Tetap	38.048.238.414,00	9.469.327.774,00
Aset Lainnya	304.540.475,00	304.540.475,00
Jumlah Aset	38.405.487.889,00	9.882.521.964,00
Kewajiban Jangka Pendek	209.055.620,00	261.535.770,00
Jumlah Kewajiban	204.090.786,00	261.535.770,00
Ekuitas	38.196.432.269,00	9.620.986.194,00
Jumlah Ekuitas	38.196.432.269,00	9.620.986.194,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	38.405.487.889,00	9.882.521.964,00

Jumlah Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp38.405.487.889,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp52.709.000,00, Aset Tetap sebesar Rp38.048.238.414,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp304.540.475,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp209.055.620,00 seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp38.405.487.889,00.

5.2.2 PENJELASAN PER POS NERACA

5.2.2.1 Aset Lancar

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp52.709.000,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp108.653.715,00. Hal ini berarti aset lancar menurun sebesar -Rp55.944.715,00 atau -51,49 persen.

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Jenis Aset Lancar	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00

Jenis Aset Lancar	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	70.200.000,00
Piutang Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
Bagian Lancar Piutang Sewa	0,00	0,00
Piutang Lain-lain	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Penyisihan Piutang BLUD	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	52.709.000,00	38.453.715,00
Persediaan BLUD	0,00	0,00
Jumlah	52.709.000,00	108.653.715,00

5.2.2.1.2 Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 , sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp70.200.000,00 .

Rincian Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
temuan BPK atas kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas.	0	70.200.000
Jumlah	0	70.200.000

5.2.2.1.3 Piutang Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah

Saldo Piutang Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 , sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 .

5.2.2.1.4 Bagian Lancar Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 , sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 .

5.2.2.1.5 Bagian Lancar Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Piutang Bagian Lancar Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 , sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 .

5.2.2.1.6 Persediaan

Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp52.709.000,00 , sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp38.453.715,00 . Hal ini berarti persediaan meningkat sebesar Rp14.255.285,00 atau 37,07 persen.

Rincian Persediaan terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Barang/perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah	52.709.000	38.453.715,00
Bahan/perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi	0	
Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	
Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah	0	
Jumlah	52.709.000	38.453.715,00

Rincian Persediaan berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

NO	JENIS PERSEDIAAN	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
	BARANG PAKAI HABIS	52.709.000	38.453.715
	BAHAN	0	0
	SUKU CADANG	0	0
	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	52.709.000	38.453.715
1	Alat Tulis Kantor	24.324.000	11.487.015
2	Kertas Dan Cover	0	0
3	Bahan Cetak	28.385.000	26.966.700
	OBAT-OBATAN	0	0
	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	0	0
	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA	0	0
	NATURA DAN PAKAN	0	0
	PERSEDIAAN PENELITIAN	0	0

NO	JENIS PERSEDIAAN	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
	PERSEDIAAN DALAM PROSES	0	0
	BARANG TAK HABIS PAKAI	0	0
	KOMPONEN	0	0
	P I P A	0	0
	BARANG BEKAS DIPAKAI	0	0
	KOMPONEN BEKAS DAN PIPA BEKAS	0	0
	JUMLAH PERSEDIAAN	52.709.000	38.453.715

Rekap persediaan menurut jenisnya yaitu sebagai berikut:

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
1.	Barang Pakai Habis	52.709.000	38.453.715
	- Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	52.709.000	38.453.715
2.	Barang Tak Habis Pakai	0	0
3.	Barang Bekas Dipakai	0	0
	Jumlah	52.709.000	38.453.715

5.2.2.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp38.048.238.414,00 , sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.469.327.774,00 . Hal ini berarti Aset Tetap meningkat sebesar Rp25.908.502.875,00 atau 273,60 persen.

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp Rp38.048.238.414,00 dan Rp9.469.327.774,00 . Rincian Aset Tetap terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Tanah	29.003.280.000,00	3.393.780.000,00
Peralatan dan Mesin	26.269.156.341,00	24.543.316.403,00
Gedung dan Bangunan	8.931.579.615,00	2.645.732.540,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	205.841.367,00	205.841.367,00
Aset Tetap Lainnya	144.512.055,00	144.512.055,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	-26.506.130.964,00	-21.463.854.591,00
Jumlah	38.048.238.414,00	9.469.327.774,00

5.2.2.2.1 Tanah

Nilai Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp29.003.280.000,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.393.780.000,00 . Hal ini berarti jumlah asset tetap Tanah meningkat sebesar Rp25.609.500.000,00 atau 754,60 persen.

5.2.2.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.269.156.341,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp24.543.316.403,00 . Hal ini berarti jumlah asset tetap Peralatan dan Mesin meningkat sebesar Rp1.725.839.938,00 atau 7,03 persen.

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Jenis	Saldo Akhir 2022	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
				Tambah	Kurang	
1	Alat Besar					
2	Alat Angkutan	7.742.295.285,00				
2.1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7.742.295.285,00	7.742.952.85,00	392.026.200,00	397.710.000,00	7.736.611.485,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur					
4	Alat Pertanian					
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.962.703.566,00	7.962.703.566,00	943.027.381,00		8.905.730.947,00
5.1	Alat Kantor.	3.684.753.112,00	3.684.753.112,00	29.970.000,00	0,00	3.741.723.112,00
5.2	Alat Rumah Tangga	3.812.904.854,00	3.812.904.854,00	106.784.000,00	0,00	3.919.688.854,00
5.3	Meubelair	465.045.600,00	465.045.600,00	806.273.381,00		1.271.891.950,00
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1.809.593.420,00	1.809.593.420,00	543.250.864,00		2.352.845.284,00
6.1	Alat Studio.	1.278.700.470,00	1.278.700.470,00	508.252.864,00		1.786.953.334,00
6.2	Alat Komunikasi	530.892.950,00	530.892.950,00	34.998.000,00		565.891.950,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	68.596.000,00	68.596.000,00			68.596.000,00
7.2	Alat Kesehatan Umum	68.596.000,00	68.596.000,00			68.596.000,00
8	Alat Per-senjataan	64.500.000,00	64.500.000,00			64.500.000,00
8.1	Persenjataan Non Senjata Api	64.500.000,00	64.500.000,00			64.500.000,00
9	Komputer	8.219.439.839,00	8.219.439.839,00	224.729.136,00		8.444.168.975,00
9.2	Komputer Unit	6.064.862.803,00	6.064.862.803,00	224.729.136		6.289.591.939,00
9.2	Peralatan Komputer	2.154.577.036,00	2.154.577.036,00			2.154.577.036,00
10	Rambu - Rambu					
11	Peralatan Olah Raga					

Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin tersebut adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Saldo Awal	24.543.316.403,00
Penambahan:	
Realisasi Belanja Modal Yang Menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin (*)	1.704.393.778,00
Penerimaan dari OPD lain (Mutasi masuk antar OPD)	438.163.950,00
Pengembangan (Kapitalisasi)	101.000.000,00
Koreksi Pencatatan	
Jumlah Penambahan	2.143.299.938,00
Pengurangan:	
Penghapusan	
Penyerahan Aset Tetap ke OPD Lain (Mutasi Keluar Antar OPD)	417.460.000,00
Koreksi Pencatatan	
Jumlah Pengurangan	417.460.000,00
Jumlah Per 31 Des 2023	26.269.156.341,00

(*) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.725.839.938,00 berasal dari:

- 1) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada LRA Tahun 2023 Anggaran adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Koding	Uraian	31 Desember 2023
5.2.02	BM Peralatan dan Mesin	1.704.393.778,00
Jumlah Belanja		1.704.393.778,00

- 2) Ditambah Realisasi Belanja Modal selain Peralatan dan Mesin pada LRA Tahun Anggaran 2023 yang menjadi BM Peralatan dan Mesin, yaitu berasal dari (dalam rupiah):

Koding	Uraian	31 Desember 2023
5.2.01	BM Tanah	
5.2.03	BM Gedung dan Bangunan	101.000.000,00
5.2.04	BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	
5.2.05	BM Aset Tetap Lainnya	
5.2.06	BM Aset Lainnya	
Jumlah Belanja		

- 3) Dikurangi Realisasi Belanja Modal PM pada LRA Tahun Anggaran 2023 yang menjadi persediaan sebesar Rp0,00 .
- 4) Dikurangi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada LRA Tahun Anggaran 2023 yang menjadi BM Jenis Aset Tetap Yang Lain, yaitu menjadi (dalam rupiah)

Koding	Uraian	31 Desember 2021
5.2.3	BM Tanah	
5.2.3	BM Gedung dan Bangunan	
5.2.3	BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	
5.2.3	BM Aset Tetap Lainnya	
5.2.3	BM Aset Lainnya	
5.2.3	Persediaan	

Koding	Uraian	31 Desember 2021
5.2.3	Aset Tak Berwujud	
Jumlah Belanja		

- 5) Dikurangi Realisasi Belanja Modal yang menjadi persediaan sebesar Rp0,00 .
- 6) Dikurangi Realisasi Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp100.257.790,00 .

Penambahan Peralatan dan Mesin tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan adanya realisasi belanja modal yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp100.257.790,00 dan terdapatnya penambahan Peralatan dan Mesin yang tidak dipengaruhi oleh belanja modal.

Penambahan yang tidak dipengaruhi oleh belanja modal merupakan penambahan melalui transaksi mutasi/hibah masuk dari perangkat daerah di provinsi Jawa Barat

5.2.2.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.931.579.615,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.645.732.540,00 . Hal ini berarti Gedung dan Bangunan meningkat sebesar Rp6.285.847.075,00 atau 136,16 persen.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Jenis	Saldo Akhir 2022	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
				Tambah	Kurang	
1	Gedung Kantor	2.645.732.540,00	2.645.732.540,00	6.285.847.075,00	0,00	8.931.579.615,00
Jumlah		2.645.732.540,00	2.645.732.540,00	6.285.847.075,00	0,00	8.931.579.615,00

Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan tersebut adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Saldo Awal	2.645.732.540,00
Penambahan:	
Realisasi Belanja Modal Yang Menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan (*)	2.683.498.000,00
Penerimaan dari OPD lain (Mutasi masuk antar OPD)	3.602.349.075,00
Pengembangan (Kapitalisasi)	
Koreksi Pencatatan	
Reklasifikasi dari Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi Masuk)	
Reklasifikasi dari Jenis Persediaan (Reklasifikasi Masuk)	
Hibah/Pengakuan Penerimaan Lainnya Yang Sah	
Aset Tetap dari BTT	
Jumlah Penambahan	6.285.847.075,00
Pengurangan:	
Penghapusan	
Penyerahan Aset Tetap ke OPD Lain (Mutasi Keluar Antar OPD)	
Koreksi Pencatatan	
Reklasifikasi ke Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi Keluar)	
Reklasifikasi ke Persediaan (Reklasifikasi Keluar)	
Hibah/Pengakuan Pengeluaran Lainnya Yang Sah	
Hibah/Mutasi Keluar Aset Tetap dari BTT	

Jumlah Pengurangan	0,00
Jumlah Per 31 Des 2023	8.931.579.615,00

(*) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Sebesar Rp2.683.498.000,00 berasal dari:

- 1) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada LRA Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Koding	Uraian	31 Desember 2023
5.2.3	BM Gedung dan Bangunan	2.882.588.000,00
Jumlah Belanja		2.882.588.000,00

- 2) Ditambah Realisasi Belanja Modal selain Gedung dan Bangunan pada LRA Tahun Anggaran 2023 yang menjadi BM Gedung dan Bangunan, yaitu berasal dari (dalam rupiah):

Koding	Uraian	31 Desember 2023
5.2.3	BM Tanah	
5.2.3	BM Peralatan dan Mesin	
5.2.3	BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	
5.2.3	BM Aset Tetap Lainnya	
5.2.3	BM Aset Lainnya	
Jumlah Belanja		

- 3) Dikurangi Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada LRA Tahun Anggaran 2023 yang menjadi persediaan sebesar Rp0,00 .
- 4) Dikurangi Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada LRA Tahun Anggaran 2023 yang menjadi BM Jenis Aset Tetap Yang Lain, yaitu menjadi (dalam rupiah):

Koding	Uraian	31 Desember 2023
5.2.3	BM Tanah	
5.2.3	BM Peralatan dan Mesin	101.000.000,00
5.2.3	BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	
5.2.3	BM Aset Tetap Lainnya	
5.2.3	BM Aset Lainnya	
5.2.3	Persediaan	
5.2.3	Aset Tak Berwujud	
Jumlah Belanja		101.000.000,00

- 5) Dikurangi Realisasi Belanja Modal yang menjadi persediaan sebesar Rp0,00 .
- 6) Dikurangi Realisasi Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp98.090.000,00 .

Penambahan Gedung dan Bangunan tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan adanya :

1. Adanya penerimaan dari Perangkat Daerah lain, yaitu BP2D Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.602.349.075,00 berupa gedung dan bangunan jl. Tubagus ismail

2. Adanya realisasi belanja modal gedung bangunan yang tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap yang bersangkutan sebesar Rp1999.090.000,00

5.2.2.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp205.841.367,00 , sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp205.841.367,00 .

Hal ini berarti nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak mengalami perubahan sebesar 0,00 persen dibandingkan tahun 2022.

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Jenis	Saldo Akhir 2022	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
				Tambah	Kurang	
1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	205.841.367,00	205.841.367,00	0,00	0,00	205.841.367,00
Jumlah		205.841.367,00	205.841.367,00	0,00	0,00	205.841.367,00

5.2.2.2.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp144.512.055,00 , sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp144.512.055,00 .

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Jenis	Saldo Akhir 2022	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
				Tambah	Kurang	
1	Aset Tetap Lainnya	144.512.055,00	144.512.055,00	0,00	0,00	144.512.055,00
Jumlah		144.512.055,00	144.512.055,00	0,00	0,00	144.512.055,00

5.2.2.2.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 .

5.2.2.2.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan merupakan jumlah total akumulasi penyusutan dari Aset Tetap, yang terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan Aset Tetap Lainnya. Nilai Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023 sebesar (Rp26.506.130.964,00) sedangkan Per 31 Desember 2022 sebesar (Rp21.463.854.591,00). Hal ini Akumulasi Penyusutan berarti menurun sebesar - Rp5.042.276.373,00 atau 80,97 persen.

Nilai Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023 sebesar (Rp26.506.130.964,00) dari Total Aset Tetap Tahun 2023 sebesar Rp38.048.238.414,00 .

Berikut rincian Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023 (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	21.323.469.988	20.019.009.993
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.996.485.098	1.275.655.212
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	99.986.424	89.694.336
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	86.189.454	79.495.050
Jumlah	26.506.130.964	21.463.854.591

5.2.2.3 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp304.540.475,00 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp304.540.475,00 .

Aset Lainnya terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Aset Tak Berwujud	145.500.000,00	145.500.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-145.500.000,00	-145.500.000,00
Aset Lain-Lain	3.508.083.848,00	3.508.083.848,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-3.203.543.373,00	-3.203.543.373,00
Jumlah	304.540.475,00	304.540.475,00

5.2.2.3.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp145.500.000,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp145.500.000,00 .ss

Rincian Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Software	145.500.000	145.500.000
Jumlah	145.500.000	145.500.000

5.2.2.3.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar (Rp145.500.000,00) sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp145.500.000,00).

5.2.2.3.3 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.508.083.848,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.508.083.848,00 .

Aset Lain-lain terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Aset Tetap dalam Pengajuan Penghapusan	3.508.083.848,00	3.508.083.848,00
Jumlah	3.508.083.848,00	3.508.083.848,00

5.2.2.3.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar (Rp3.203.543.373,00) sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp3.203.543.373,00).

5.2.2.4 Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp209.055.620,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp261.535.770,00 . Hal ini berarti menurun sebesar -Rp57.444.984,00 atau - 21,96 persen.

Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp209.055.620,00 seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

5.2.2.4.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp209.055.620,00 ,sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp261.535.770,00 . Hal ini berarti kewajiban jangka pendek menurun sebesar -Rp52.480.150,00 atau -20,07 persen.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Pendapatan Diterima Dimuka	173.769.167,00	231.905.763,00
Utang Belanja	35.286.453,00	29.630.007,00
Jumlah	209.055.620,00	261.535.770,00

5.2.2.4.2 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang kepada pihak ketiga yang timbul dari pemotongan yang dilakukan oleh entitas dari kegiatan/transaksi yang dilakukan oleh entitas yang bersangkutan.

Jumlah Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 .

5.2.2.4.3 Pendapatan Diterima Dimuka

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp173.769.167,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp231.905.763,00 .

5.2.2.4.4 Utang Belanja

Jumlah Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp35.286.453,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp29.630.007,00 . Hal ini berarti utang belanja meningkat sebesar Rp5.656.446,00 atau 19,09 persen.

Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp35.286.453,00 tersebut merupakan belanja listrik, air, dan telepon.

5.2.2.4.5 Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 . Hal ini berarti Utang Jangka Pendek Lainnya tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2022.

5.2.2.5 Ekuitas

Ekuitas merupakan akun untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp38.196.432.269,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.620.986.194,00 . Hal ini berarti ekuitas meningkat sebesar Rp28.575.446.075,00 atau 297,01 persen.

5.2.3 CATATAN PENTING LAINNYA

5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Ringkasan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut (disajikan dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Pendapatan-LO	64.951.950,00	62.328.000,00
Beban	69.691.304.531,00	63.124.874.500,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	-69.626.352.581,00	-63.062.546.500,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Pos Luar Biasa	0,00	0,00
Surplus/(Defisit)-LO	-69.626.352.581,00	-63.062.546.500,00

Jumlah Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp64.951.950,00 yang semuanya merupakan Pendapatan Asli Daerah-LO, terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp0,00, Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp2.750.000,00, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO sebesar Rp62.201.950,00.

Jumlah Beban Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp69.691.304.531,00 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp41.720.418.467,00, Beban Persediaan sebesar Rp3.945.354.478,00, Beban Jasa sebesar Rp12.074.082.122,00, Beban Pemeliharaan sebesar Rp1.375.732.662,00, Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp8.808.980.963,00, Beban Hibah sebesar Rp0,00, Beban Bantuan Sosial sebesar Rp0,00, Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp1.666.478.049,00, Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp0,00, Beban Transfer Rp0,00 dan Beban Lain-lain sebesar Rp100.257.790,00. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 terdiri dari Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00, dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00. Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp72.299.384.296,00) diperoleh dari Pendapatan-LO sebesar Rp62.328.000,00 dikurangi dengan Beban sebesar Rp72.361.712.296,00 ditambah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00 dan Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00.

5.3.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam

periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi

Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

Realisasi Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp64.951.950,00 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Pendapatan-LO	64.951.950,00	62.328.000,00
Pendapatan Asli Daerah-LO	64.951.950,00	62.328.000,00

Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp62.328.000,00, realisasi Pendapatan-LO mengalami kenaikan dibanding Tahun Anggaran 2022 sebesar 4,21 persen.

5.3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp64.951.950,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp62.328.000,00, berarti realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO mengalami kenaikan sebesar Rp2.623.950,00 atau 4,21 persen dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022.

Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	2.750.000,00	2.750.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah- LO	62.201.950,00	59.578.000,00
Jumlah	64.951.950,00	62.328.000,00

5.3.2.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah Pendapatan yang diperoleh dari kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi penerbitan hak tagih pajak dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 Wajib Pajak belum memenuhi kewajibannya.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp0,00 atau - persen dari total Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2023 sebesar Rp64.951.950,00 .

Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 , berarti realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

5.3.2.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO adalah Pendapatan yang berasal dari Pungutan Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.750.000,00 dari total Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2023 sebesar Rp64.951.950,00 .

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.750.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00persen .

5.3.2.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan-LO adalah pendapatan yang berasal dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD dan BUMN.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp0,00 .

5.3.2.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pendapatan Pajak Daerah-LO, Pendapatan Retribusi Daerah-LO, maupun Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan-LO.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp62.201.950,00 dari total Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp64.951.950,00 .

Apabila dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp59.578.000,00 , berarti realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO mengalami kenaikan sebesar Rp2.623.950,00 atau 4,21 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

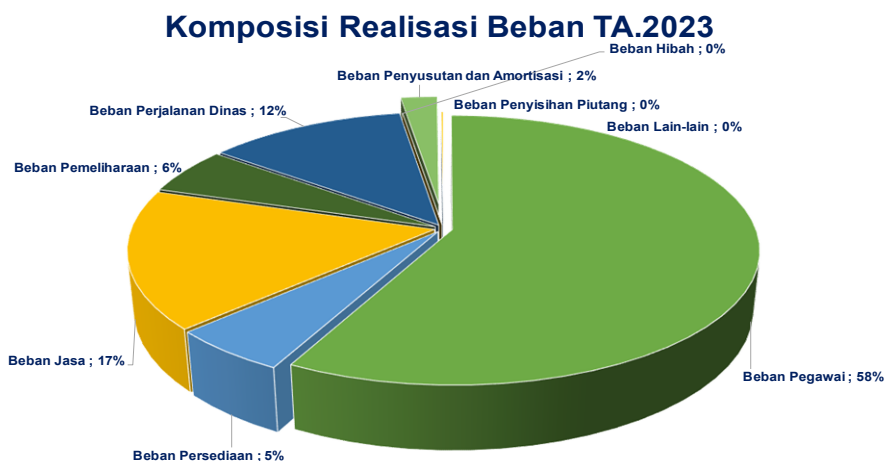
Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	62.201.950,00	59.578.000,00
Jumlah	62.201.950,00	59.578.000,00

5.3.2.2 Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Realisasi Beban Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp69.691.304.531,00 terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Beban Pegawai	41.720.418.467,00	37.974.994.564,00
Beban Persediaan	3.945.354.478,00	3.043.754.504,00
Beban Jasa	12.074.082.122,00	12.939.822.546,00
Beban Pemeliharaan	1.375.732.662,00	890.481.799,00
Beban Perjalanan Dinas	8.808.980.963,00	6.496.688.385,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.666.478.049,00	1.772.223.942,00
Beban Lain-lain	100.257.790,00	6.908.760,00
Jumlah	69.691.304.531,00	63.124.874.500,00

Berikut ini disajikan komposisi realisasi masing-masing jenis Beban terhadap realisasi total Beban:



5.3.2.2.1 Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp41.720.418.467,00 apabila dibandingkan dengan Realisasi Beban pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp37.974.994.564,00, maka realisasi beban pegawai meningkat sebesar Rp3.745.423.903,00 atau 9,86 persen.

Rincian Objek Beban Pegawai adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Beban Gaji dan Tunjangan	9.133.195.930,00	8.552.596.686,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	32.587.222.537,00	29.422.397.878,00
Jumlah	41.720.418.467,00	37.974.994.564,00

5.3.2.2.2 Beban Persediaan

Realisasi Beban Persediaan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp3.945.354.478,00, Apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Persediaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.043.754.504,00, berarti realisasi Beban Persediaan sebesar meningkat sebesar Rp901.599.974,00 atau 29,62 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Rincian Objek Beban Persediaan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Beban Barang Pakai Habis	3.498.166.978	2.636.089.504,00
Beban Uang/Barang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	447.187.500	407.665.000,00
Jumlah	3.945.354.478	3.043.754.504,00

5.3.2.2.3 Beban Jasa

Realisasi Beban Jasa Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp12.074.082.122,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp12.939.822.546,00 , berarti realisasi Beban Jasa menurun sebesar (Rp865.740.424,00) atau -6,69 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Rincian Objek Beban Jasa adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Beban Jasa Kantor	8.908.959.763,00	9.036.328.411,00
Beban Premi Asuransi	40.250.959,00	128.744.135,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.317.995.000,00	1.369.110.000,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	91.500.000,00	128.320.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	40.484.900,00	49.034.000,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	98.200.000,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	963.250.000,00	1.779.616.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	686.641.500,00	350.470.000,00
Beban Jasa Yang Diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	25.000.000	-
Jumlah	12.074.082.122,00	12.939.822.546,00

5.3.2.2.4 Beban Pemeliharaan

Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.375.732.662,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp890.481.799,00 , berarti realisasi Beban Pemeliharaan meningkat sebesar Rp485.250.863,00 atau 1,54 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Rincian Objek Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Beban Pemeliharaan Tanah	178.817.250	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	586.040.000	426.735.437,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	512.785.412	463.746.362,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-
Beban Modal yang Tidak Dikapitalisasi yang merupakan Pemeliharaan	98.090.000	-
Jumlah	1.375.732.662,00	890.481.799,00

5.3.2.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp8.808.980.963,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.496.688.385,00 , berarti realisasi Beban Perjalanan Dinas meningkat sebesar Rp2.312.292.578,00 atau 35,59 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Rincian realisasi Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.727.242.363	6.496.688.385,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	81.738.600	0,00
Jumlah	8.808.980.963,00	6.496.688.385,00

5.3.2.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.666.478.049,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.772.223.942,00 , berarti realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi menurun sebesar (Rp105.745.893,00) atau -5,97persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
I	Beban Penyusutan		
1.	Peralatan dan Mesin	1.531.010.746	1.649.846.874
2.	Gedung dan Bangunan	118.480.811	105.390.576
3.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10.292.088	10.292.088

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
4.	Aset Tetap Lainnya	6.694.404	6.694.404
5.	Aset Lain-Lain	0	0
	Jumlah Beban Penyusutan	1.666.478.049	1.772.223.942
II	Beban Amortisasi		
	Aset Tidak Berwujud	0	0
	Jumlah Beban Amortisasi	0	0
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.666.478.049	1.772.223.942

5.3.2.2.7 Beban Lain-lain

Realisasi Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp100.257.790,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.908.760,00 , berarti realisasi Beban Lain-lain meningkat sebesar Rp93.349.030,00 atau 1.351,17 persen.

Rincian Objek Beban Lain-lain adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Aset Tetap Ekstrakomptabel	100.257.790,00	5.249.310,00
Koreksi Kapitalisasi Pemeliharaan Jaringan	-	1.659.450,00
Jumlah	100.257.790,00	6.908.760,00

5.3.2.3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Berdasarkan realisasi Pendapatan-LO dan realisasi Beban Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar (Rp69.626.352.581,00) dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Pendapatan-LO	64.951.950,00	62.328.000,00
Beban	69.691.304.531,00	63.124.874.500,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	-69.628.976.531,00	-63.062.546.500,00

5.3.2.4 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 berasal dari Surplus Non Operasional sebesar Rp0,00 dan Defisit Operasional sebesar Rp0,00 .

5.3.2.3 Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa adalah penjumlahan antara Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional, dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional. Dari realisasi Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp69.626.352.581,00) dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 , maka realisasi Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar (Rp69.626.352.581,00).

5.3.2.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan akun untuk menyajikan pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Untuk Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat realisasi untuk Pos Luar Biasa.

5.3.2.5 Surplus/(Defisit)-LO

Surplus/(Defisit)-LO adalah penjumlahan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional, Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional, dan Pos Luar Biasa. Realisasi Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp69.626.352.581,00), berasal dari (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Pendapatan-LO	62.951.950,00	62.328.000,00
Beban	69.691.304.531,00	63.124.874.500,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	-69.626.352.581,00	(63.062.546.500,00)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0
Pos Luar Biasa	0,00	0
Surplus/(Defisit)-LO	-69.626.352.581,00	(63.062.546.500,00)

5.3.3 CATATAN PENTING LAINNYA

-

5.4.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.4.2 PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

- a) Ekuitas Awal;
- b) Surplus/Defisit-LO pada Periode bersangkutan;
- c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan
- d) Koreksi kesalahan mendasar, seperti:
 - (1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
 - (2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- e) Ekuitas Akhir

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut (disajikan dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Ekuitas Awal	9.620.986.194,00	10.736.403.918,57
Surplus/(Defisit)-LO	(69.626.352.581,00)	-63.062.546.500,00
RK PPKD	72.424.223.919,00	61.639.773.465,00
RA PPKD (Nilai Perolehan)	29.232.553.025,00	-2.022.933.960,14
RA PPKD (Akumulasi Penyusutan)	(3.431.211.382,00)	1.971.958.102,69
Ekuitas	(23.766.906,00)	358.331.167,01
Ekuitas Akhir	38.196.432.269,00	9.620.986.193,13

Ekuitas Akhir Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp38.196.432.269,00 terdiri dari:

1. Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.620.986.194,00 .
2. Surplus/Defisit-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp69.626.352.581,00).
3. RK PPKD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp72.424.223.919,00 .

4. RA PPKD (Nilai Perolehan) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp29.232.553.025,00 .
5. RA PPKD (Akumulasi Penyusutan) Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp3.431.211.382,00)
6. Ekuitas Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp23.766.906,00) .
7. Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp38.196.432.269,00 .

5.4.3 PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.4.3.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.620.986.194,00 . Nilai ini merupakan Ekuitas Akhir dari Ekuitas Tahun Anggaran 2022 Audited.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.736.403.918,57 , berarti realisasi Ekuitas Awal menurun sebesar (Rp1.115.417.725,44) atau -10,39persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

5.4.3.2 Surplus/(Defisit)-LO

Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp69.626.352.581,00). Akun ini dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/(Defisit)-LO.

Surplus/Defisit-LO Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp69.626.352.581,00). Sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp63.062.546.500,00). Hal ini berarti Apabila dibandingkan dengan Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2023 Surplus/(Defisit)-LO Badan Kepegawaian Daerah menurun sebesar (Rp6.563.806.081,00) atau 1,104 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

5.4.3.3 RK PPKD

RK PPKD adalah nilai yang menunjukkan transaksi kas antar entitas (PPKD dan OPD). RK PPKD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp72.424.223.919,00 .

5.4.3.4 RA PPKD

RA PPKD adalah nilai yang menunjukkan transaksi aset tetap antar entitas (PPKD dan OPD).

Saldo RA PPKD (Nilai Perolehan) Tahun 2023 terdiri atas penerimaan/mutasi masuk barang dan pengeluaran/mutasi keluar barang sebesar Rp29.232.553.025,00 serta Saldo RA PPKD

(Akumulasi Penyusutan) yang berupa nilai akumulasi penyusutan dari nilai aset tersebut sebesar (Rp3.431.211.382,00)

5.4.3.5 Ekuitas

Akun ekuitas menunjukkan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.

Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Koreksi Piutang	0,00	6.406.237,00
Pendapatan Diterima Dimuka	(1.441.404,00)	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	157,06
Koreksi Nilai Aset Tetap	0,00	118,99
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	55.413.058,00	356.049.666,62
Koreksi Nilai Aset Lain-Lain	0,00	11,08
Koreksi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	-4.125.000,00
Koreksi Utang Belanja	(7.538.560,00)	-23,74
Koreksi Pendapatan-Lo	(70.200.000,00)	
Koreksi BDD	0,00	0,87
Jumlah	(23.766.906,00)	358.331.167,88

Koreksi ekuitas ini disebabkan oleh :

1. Adanya perubahan masa umur ekonomis pada aset Peralatan dan Mesin
2. Koreksi Kurang Catat Saldo Pendapatan Diterima Di Muka Manfaat Tahun 2022 Audited 31 Des 2023
3. Koreksi Pengakuan Utang BPJS Audited 31 Des 2023
4. Pelunasan Piutang Pengembalian Audited 31 Des 2023

5.4.3.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp38.196.432.269,00 . Nilai Ekuitas ini merupakan nilai yang disajikan sebagai akun Ekuitas di Neraca per 31 Desember 2023.

Hal ini Apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.620.986.193,13 , Ekuitas Akhir Badan Kepegawaian Daerah meningkat sebesar Rp28.575.446.075,00 atau 297,01 persen dibanding Tahun Anggaran 2023.

5.4.4 CATATAN PENTING LAINNYA

-

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON-KEUANGAN BKD

6.1 DOMISILI

Badan Kepegawaian Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 yang beralamat di Jalan Ternate Nomor 2, Kota Bandung

6.2 DASAR HUKUM LANDASAN OPERASIONAL

Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan kegiatan operasionalnya di bidang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

6.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah. Tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, meliputi pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, pengembangan aparatur serta penilaian kinerja aparatur dan penghargaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

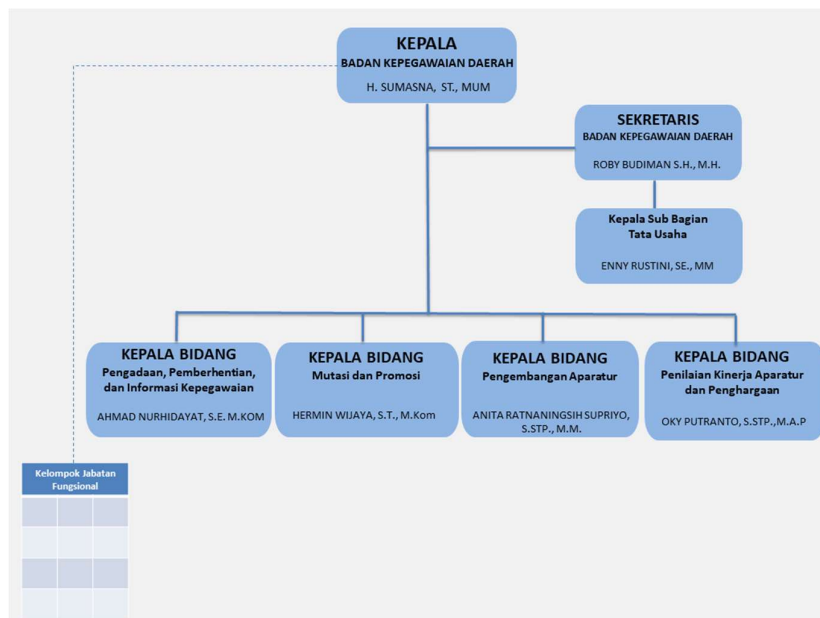
Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- b. penyelenggaran perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- c. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Badan;
- d. penyelenggaraan administrasi Badan;
- e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6.4 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi pada Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat



BAB VII
PENUTUP

Dari uraian diatas dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Neraca Badan Kepegawaian Daerah per 31 Desember 2023 menunjukkan jumlah Aset sebesar Rp38.405.487.889,00 Kewajiban sebesar Rp209.055.620,00 dan Ekuitas sebesar Rp38.196.432.269,00 ;
2. Realisasi APBD Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2023 menunjukkan Pendapatan-LRA berjumlah Rp5.373.950,00 atau 195,42 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.750.000,00 dan Belanja berjumlah Rp72.429.597.869,00 atau 97,89 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp73.993.330.116,00 . Dengan demikian, terdapat (Defisit)-LRA antara Pendapatan-LRA dan Belanja sebesar (Rp72.424.223.919,00);
3. Pada Laporan Operasional Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2023 terdapat Pendapatan-LO sebesar Rp64.951.950,00 , Beban sebesar Rp69.691.304.531,00 dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00 sehingga (Defisit)-LO sebesar (Rp69.626.352.581,00);
4. Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.620.986.194,00 dan Ekuitas Akhir sebesar Rp38.196.432.269,00

Bandung, 21 Mei 2024

Kepala Badan Kepegawaian Daerah



H. Sumasna, ST., MUM

Pembina Utama Madya

NIP. 19681216 199803 1 003

LAMPIRAN

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023
Laporan Realisasi Anggaran
Badan Kepegawaian Daerah

Lampiran 1

No	Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	Jurnal Koreksi		REALISASI SETELAH KOREKSI 2023	LEBIH / (KURANG)	% 2023
					Debet	Kredit			
1	1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 5	9 = 7 / 5 * 100
2	4	Pendapatan							
3	4.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp2.750.000,00	Rp2.750.000,00	0	2.623.950	Rp4.373.950,00	0	196,42
4	4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
5	4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp2.750.000,00	Rp2.750.000,00	0	0	Rp2.750.000,00	0	100,00
6	4.1.03	Pendapatan Hasil Pengkayaan Keluasan Daerah yang dipisahkan	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
7	4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp0,00	Rp0,00	0	2.623.950	Rp2.623.950,00	0	0,00
8									
9	4.2	Pendapatan Transfer	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
10	4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
11	4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pajak (DBH)	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
12	4.2.01.01.01.01	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
13	4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
14	4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
15									
16	4.2.01.02	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
17	4.2.01.02.01	Dana Insentif Daerah (DID)	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
18									
19	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
20	4.2.02.02	Bantuan Keuangan	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
21									
22	4.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
23	4.3.01	Pendapatan Hibah	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
24	4.3.02	Pendapatan Dana Darurat	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
25	4.3.03	Pendapatan Lainnya Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
26									
27	4	Jumlah Pendapatan	Rp2.750.000,00	Rp2.750.000,00	0	2.623.950	Rp4.373.950,00	0	196,42
28									
29	5	Belanja							
30	5.1	Belanja Operasi	Rp69.143.137.818,89	Rp67.842.616.991,89	0	0	Rp67.842.616.991,89	-1.300.521.727	96,12
31	5.1.01	Belanja Pegawai	Rp42.345.057.076,00	Rp41.727.957.027,00	0	0	Rp41.727.957.027,00	-617.100.049	98,54
32	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp26.798.080.742,00	Rp26.114.659.964,00	0	0	Rp26.114.659.964,00	-683.421.678	97,45
33	5.1.03	Belanja Bunga	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
34	5.1.04	Belanja Subsidi	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
35	5.1.05	Belanja Hibah	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
36	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
37									
38	5.2	Belanja Modal	Rp4.856.192.296,00	Rp4.586.981.778,00	0	0	Rp4.586.981.778,00	-269.210.520	94,57
39	5.2.01	Belanja Tanah	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
40	5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp1.752.199.093,00	Rp1.704.393.778,00	0	0	Rp1.704.393.778,00	-47.805.315	97,77
41	5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	Rp3.097.993.205,00	Rp2.882.588.000,00	0	0	Rp2.882.588.000,00	-215.405.205	93,05
42	5.2.04	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
43	5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
44									
45		Belanja Tidak Terduga	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
46	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
47									
48		Transfer	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
49	5.4.01	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
50	5.4.02	Transfer Bantuan Keuangan	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
51	5	Jumlah Belanja	Rp73.993.338.116,89	Rp72.429.597.869,89	0	0	Rp72.429.597.869,89	-1.563.732.247	97,89
52									
53		SURPLUS / (DEFISIT) - LRA	(Rp73.990.580.116,00)	(Rp72.426.847.869,00)	0	2.623.950	(Rp72.424.223.919,00)	1.563.732.247	
54									
55	6	Pembayaran							
56	6.1	Penerimaan Pembayaran							
57	6.1.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
58		Koreksi	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
59		Pencairan Dana Cadangan	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
60	6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
61		Jumlah Penerimaan Pembayaran	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
62									
63	6.2	Pengeluaran Pembayaran							
64	6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
65	6.2.02	Penyerutan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
66	6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
67		Dana Garansi	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
68		Jumlah Pengeluaran Pembayaran	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
69									
70		Pembayaran Netto	Rp0,00	Rp0,00	0	0	Rp0,00	0	0,00
71									
72		Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA)	(Rp73.990.580.116,00)	(Rp72.426.847.869,00)	0	2.623.950	(Rp72.424.223.919,00)	1.563.732.247	
73									
74									
75	6	PENDAPATAN DAERAH							
76	6.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.750.000	2.750.000	0	2.623.950	5.373.950	0	196,42
77	6.1.01	Pajak Daerah	0	0	0	0	0	0	0,00
78	6.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0,00
79	6.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	0	0	0	0	0	0	0,00
80	6.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	0	0	0	0	0	0	0,00
81	6.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	0	0	0	0	0	0	0,00
82	6.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Minibus	0	0	0	0	0	0	0,00
83	6.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	0	0	0	0	0	0	0,00
84	6.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	0	0	0	0	0	0	0,00
85	6.1.01.01.07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	0	0	0	0	0	0	0,00
86	6.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	0	0	0	0	0	0	0,00
87	6.1.01.01.09	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	0	0	0	0	0	0	0,00
88	6.1.01.01.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	0	0	0	0	0	0	0,00
89	6.1.01.01.11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	0	0	0	0	0	0	0,00
90	6.1.01.01.12	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dipernkasi di Air	0	0	0	0	0	0	0,00
91	6.1.01.01.13	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar	0	0	0	0	0	0	0,00
92	6.1.01.01.14	PKB-Mobil Roda Tiga	0	0	0	0	0	0	0,00
93	6.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0	0	0	0	0	0	0,00
94	6.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	0	0	0	0	0	0	0,00
95	6.1.01.02.02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	0	0	0	0	0	0	0,00
96	6.1.01.02.03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	0	0	0	0	0	0	0,00
97	6.1.01.02.04	BBNKB-Mobil Bus-Minibus	0	0	0	0	0	0	0,00
98	6.1.01.02.05	BBNKB-Mobil Bus-Bus	0	0	0	0	0	0	0,00
99	6.1.01.02.06	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	0	0	0	0	0	0	0,00
100	6.1.01.02.07	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	0	0	0	0	0	0	0,00
101	6.1.01.02.08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	0	0	0	0	0	0	0,00
102	6.1.01.02.09	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	0	0	0	0	0	0	0,00
103	6.1.01.02.10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	0	0	0	0	0	0	0,00
104	6.1.01.02.11	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	0	0	0	0	0	0	0,00
105	6.1.01.02.12	BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dipernkasi di Air	0	0	0	0	0	0	0,00
106	6.1.01.02.13	BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar	0	0	0	0	0	0	0,00
107	6.1.01.02.14	BBNKB-Mobil Roda Tiga	0	0	0	0	0	0	0,00
108	6.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	0	0	0	0	0	0	0,00
109	6.1.01.03.01	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	0	0	0	0	0	0	0,00
110	6.1.01.03.02	PBBKB-Bahan Bakar Solar	0	0	0	0	0	0	0,00
111	6.1.01.03.03	PBBKB-Bahan Bakar Gas	0	0	0	0	0	0	0,00
112	6.1.01.03.04	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	0	0	0	0	0	0	0,00
113	6.1.01.04	Pajak Air Permukiman	0	0	0	0	0	0	0,00
114	6.1.01.04.01	Pajak Air Permukiman	0	0	0	0	0	0	0,00
115	6.1.01.05	Pajak Reklamasi	0	0	0	0	0	0	0,00
116	6.1.01.05.01	Pajak Reklamasi	0	0	0	0	0	0	0,00
117	6.1.01.05.02	Retribusi Daerah	2.750.000	2.750.000	0	0	2.750.000	0	100,00
118	6.1.02.01								

211	Dinas Kelautan dan Perikanan	0	0	0	0	0	0,00
212	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	0	0	0	0	0	0,00
216	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	0	0	0	0	0	0,00
220	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0	0	0	0	0	0,00
222	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0	0	0	0	0	0,00
224	Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0	0,00
226	Dinas Perhubungan	0	0	0	0	0	0,00
228	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0	0	0	0	0	0,00
230	4.1.02.02.01.0005 Rehabilitasi Pemukiman Rungan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000	100,00
231	Dinas Sumber Daya Air	0	0	0	0	0	0,00
236	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	0	0	0	0	0,00
237	Dinas Perhubungan dan Kebudayaan	0	0	0	0	0	0,00
242	Dinas Kelautan dan Perikanan	0	0	0	0	0	0,00
249	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	0	0	0	0	0	0,00
253	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	0	0	0	0	0	0,00
260	Dinas Sosial	0	0	0	0	0	0,00
262	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0	0	0	0	0	0,00
266	Dinas Perumahan dan Pemukiman	0	0	0	0	0	0,00
270	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	0	0	0	0	0	0,00
273	Dinas Perhubungan	0	0	0	0	0	0,00
277	Dinas Pemeliharaan dan Gajah Rong	0	0	0	0	0	0,00
279	Dinas Pengusahaan dan Kewirausahaan Daerah	0	0	0	0	0	0,00
281	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	0	0	0	0	0	0,00
283	Dinas Pendidikan	0	0	0	0	0	0,00
285	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0	0	0	0	0	0,00
287	Badan Pendapatan Daerah	0	0	0	0	0	0,00
289	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0	0	0	0,00
291	Badan Kepegawaian Daerah	2.750.000	2.750.000	0	0	2.750.000	100,00
293	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0	0	0	0,00
296	Biro Urusan Sekretariat Daerah	0	0	0	0	0	0,00
301	Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah	0	0	0	0	0	0,00
305	BPKAD	0	0	0	0	0	0,00
309	4.1.02.02.04 Rehabilitasi Terminal	0	0	0	0	0	0,00
310	4.1.02.02.04.0001 Rehabilitasi Pelayanan Persewaan Temporal Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	0	0	0	0	0	0,00
311	Dinas Perhubungan	0	0	0	0	0	0,00
314	4.1.02.02.04.0002 Rehabilitasi Pelayanan Persewaan Temporal Kebutuhan Usaha	0	0	0	0	0	0,00
315	Dinas Perhubungan	0	0	0	0	0	0,00
321	4.1.02.02.08 Rehabilitasi Temporal Reklamasi dan Chattrage	0	0	0	0	0	0,00
322	4.1.02.02.08.0001 Rehabilitasi Pelayanan Temporal Reklamasi dan Chattrage	0	0	0	0	0	0,00
323	Dinas Kehutanan	0	0	0	0	0	0,00
325	Dinas Kelautan dan Perikanan	0	0	0	0	0	0,00
327	Dinas Pemukiman dan Raga	0	0	0	0	0	0,00
331	4.1.02.02.10 Rehabilitasi Pengembangan di Air	0	0	0	0	0	0,00
332	Dinas Perhubungan	0	0	0	0	0	0,00
335	4.1.02.02.11 Rehabilitasi Persewaan Produk Hasil Usaha Daerah	0	0	0	0	0	0,00
336	4.1.02.02.11.0001 Rehabilitasi Persewaan Produk Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	0	0	0	0	0	0,00
337	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	0	0	0	0	0	0,00
341	4.1.02.02.11.0002 Rehabilitasi Persewaan Produk Hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	0	0	0	0	0	0,00
342	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	0	0	0	0	0	0,00
346	4.1.02.02.11.0003 Rehabilitasi Persewaan Produk Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	0	0	0	0	0	0,00
349	Dinas Perikanan dan Kelautan	0	0	0	0	0	0,00
354	4.1.02.02.11.0004 Rehabilitasi Persewaan Produk Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman, Ternak	0	0	0	0	0	0,00
355	Dinas Perhubungan	0	0	0	0	0	0,00
360	4.1.02.03 Rehabilitasi Persewaan Tersebut	0	0	0	0	0	0,00
361	4.1.02.03.03 Rehabilitasi Irit Temporal untuk Mengembangkan Pelayanan Angkutan Umum	0	0	0	0	0	0,00
362	Dinas Perhubungan	0	0	0	0	0	0,00
364	4.1.02.03.04 Rehabilitasi Irit Usaha Perikanan	0	0	0	0	0	0,00
365	Dinas Perikanan dan Kelautan	0	0	0	0	0	0,00
368	4.1.02.03.06 Rehabilitasi Persewaan Irit Mempelajari Tenaga Kerja Asing (MTA)	0	0	0	0	0	0,00
369	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	0	0	0	0	0,00
371	4.1.03 Hasil Pengolahan Kelayakan Daerah yang Tidak Dipisahkan	0	0	0	0	0	0,00
372	4.1.03.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Childen) atau Persewaan Modal p	0	0	0	0	0	0,00
373	4.1.03.01.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Childen) atau Persewaan Modal p	0	0	0	0	0	0,00
375	4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Childen) atau Persewaan Modal p	0	0	0	0	0	0,00
376	4.1.03.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Childen) atau Persewaan Modal p	0	0	0	0	0	0,00
381	4.1.03.02.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Childen) atau Persewaan Modal p	0	0	0	0	0	0,00
390	4.1.04 Lain-lain PAD yang sah	0	0	0	2.623.960	2.623.960	0,00
391	4.1.04.01 Hasil Persewaan BMD yang Tidak Dipisahkan	0	0	0	2.623.960	2.623.960	0,00
392	4.1.04.01.01 Hasil Persewaan Tanah	0	0	0	0	0	0,00
394	4.1.04.01.02 Hasil Persewaan Pemukiman dan Mekan	0	0	0	0	0	0,00
414	4.1.04.01.03 Hasil Persewaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	2.623.960	2.623.960	0,00
419	4.1.04.01.04 Hasil Persewaan Jalan, Jembatan, dan Jaga	0	0	0	0	0	0,00
424	4.1.04.01.05 Hasil Persewaan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0	0,00
432	4.1.04.01.06 Hasil Persewaan Aset Lainnya	0	0	0	0	0	0,00
435	4.1.04.03 Hasil Persewaan BMD yang Tidak Dipisahkan	0	0	0	0	0	0,00
436	4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD	0	0	0	0	0	0,00
437	4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD	0	0	0	0	0	0,00
438	Badan Pendapatan Daerah	0	0	0	0	0	0,00
440	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	0	0	0	0	0	0,00
442	Badan Pengkajian Keuangan dan Aset Daerah	0	0	0	0	0	0,00
446	Sekretariat Daerah	0	0	0	0	0	0,00
451	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0	0	0	0	0	0,00
453	Dinas Kesehatan	0	0	0	0	0	0,00
459	Dinas Sumber Daya Air	0	0	0	0	0	0,00
457	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	0	0	0	0	0	0,00
460	Dinas Perencanaan Riset dan Pelayanan Temporal Sate Pinda	0	0	0	0	0	0,00
461	Dinas Perhubungan	0	0	0	0	0	0,00
463	Dinas Bina Marga dan Perumahan Ruang	0	0	0	0	0	0,00
465	Sewa ATM	0	0	0	0	0	0,00
472	4.1.04.03.02 Hasil Kerja Sama Persewaan BMD	0	0	0	0	0	0,00
474	4.1.04.03.03 Hasil dari Bangunan Guna Sedia	0	0	0	0	0	0,00
477	4.1.04.03.04 HASIL DARI BANGUNAN GUNA SEDIA	0	0	0	0	0	0,00
479	4.1.04.03.05 HASIL DARI KERJA SAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR	0	0	0	0	0	0,00
481	4.1.04.04 Hasil Kerja Sama Daerah	0	0	0	0	0	0,00
482	4.1.04.04.01 PENDAPATAN JASA PENGELAAHAN SAMPAH REGIONAL (BALAI PENGELAAHAN SAM	0	0	0	0	0	0,00
483	Dinas lingkungan Hidup	0	0	0	0	0	0,00
487	4.1.04.05 Jasa Giro	0	0	0	0	0	0,00
488	4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah	0	0	0	0	0	0,00
490	4.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bank/lembaga	0	0	0	0	0	0,00
492	4.1.04.05.03 Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0,00
494	4.1.04.05.04 Jasa Giro pada Kas Rekening Dana BOD	0	0	0	0	0	0,00
496	4.1.04.05.05 Jasa Giro Dana Kugilasi pada FKTP	0	0	0	0	0	0,00
498	4.1.04.06 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0	0	0	0	0	0,00
499	4.1.04.06.01 HASIL PENGELOLAAN DANA BERGULIR	0	0	0	0	0	0,00
501	4.1.04.07 Pendapatan Bunga	0	0	0	0	0	0,00
502	4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0,00
504	4.1.04.08 Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0	0	0	0	0	0,00
505	4.1.04.08.01 PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	0	0	0	0	0	0,00
507	4.1.04.08.02 PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	0	0	0	0	0	0,00
509	4.1.04.09 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0	0	0	0	0	0,00
510	4.1.04.09.01 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0	0	0	0	0	0,00
512	4.1.04.10 Penerimaan Keuntungan dari Seseorang Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	0	0	0	0	0	0,00
513	4.1.04.10.01 Penerimaan Keuntungan dari Seseorang Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	0	0	0	0	0	0,00
515	4.1.04.11 Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	0	0	0	0	0,00
516	4.1.04.11.01 Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	0	0	0	0	0,00
518	4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah	0	0	0	0	0	0,00
519	4.1.04.12.01 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
523	4.1.04.12.02 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
524	4.1.04.12.03 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
525	4.1.04.12.04 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
526	4.1.04.12.05 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
527	4.1.04.12.06 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
528	4.1.04.12.07 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
529	4.1.04.12.08 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
530	4.1.04.12.09 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
531	4.1.04.12.10 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
532	4.1.04.12.11 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
533	4.1.04.12.12 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
534	4.1.04.12.13 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
535	4.1.04.12.14 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
536	4.1.04.12.15 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
537	4.1.04.12.16 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
538	4.1.04.12.17 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
539	4.1.04.12.18 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
540	4.1.04.12.19 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
541	4.1.04.12.20 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
542	4.1.04.12.21 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
543	4.1.04.12.22 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
544	4.1.04.12.23 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
545	4.1.04.12.24 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
546	4.1.04.12.25 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
547	4.1.04.12.26 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
548	4.1.04.12.27 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
549	4.1.04.12.28 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
550	4.1.04.12.29 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
551	4.1.04.12.30 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
552	4.1.04.12.31 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
553	4.1.04.12.32 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
554	4.1.04.12.33 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
555	4.1.04.12.34 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
556	4.1.04.12.35 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
557	4.1.04.12.36 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
558	4.1.04.12.37 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
559	4.1.04.12.38 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
560	4.1.04.12.39 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
561	4.1.04.12.40 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
562	4.1.04.12.41 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
563	4.1.04.12.42 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
564	4.1.04.12.43 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
565	4.1.04.12.44 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
566	4.1.04.12.45 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
567	4.1.04.12.46 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
568	4.1.04.12.47 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0	0	0	0	0	0,00
569	4.1.04.12.48 Pendapatan Denda Pajak Rendahan Bismotor (PKB)	0					

615	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0	0	0	0	0	0	0,00
616	4.2.01.01	Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0,00
617	4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0	0	0	0	0	0	0,00
621	4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	0	0	0	0,00
636	4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0	0	0	0	0	0	0,00
687	4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0	0	0	0	0	0	0,00
709	4.2.01.02.01	DID	0	0	0	0	0	0	0,00
711	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0	0	0	0	0	0	0,00
712	4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0	0	0,00
713	4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	0	0	0	0	0	0	0,00
715	4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0	0	0	0	0	0	0,00
717	4.2.02.02.03	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0,00
719	4.2.02.02.04	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0,00
721	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0	0	0	0	0,00
723	4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0,00
724	4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0	0	0	0	0	0	0,00
726	4.3.01.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0	0,00
727	4.3.01.02.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0	0,00
729	4.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0,00
730	4.3.01.03.01	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0,00
732	4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0,00
733	4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0,00
735	4.3.01.04.02	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Luar Negeri	0	0	0	0	0	0	0,00
737	4.3.01.04.03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0,00
739	4.3.01.04.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri	0	0	0	0	0	0	0,00
741	4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Seperti	0	0	0	0	0	0	0,00
742	4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Seperti	0	0	0	0	0	0	0,00
744	4.3.02	DANA DARURAT	0	0	0	0	0	0	0,00
745	4.3.02.01	DANA DARURAT	0	0	0	0	0	0	0,00
746	4.3.02.01.01	DANA DARURAT	0	0	0	0	0	0	0,00
748	4.3.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UN	0	0	0	0	0	0	0,00
749	4.3.03.01	Lain-Lain Pendapatan	0	0	0	0	0	0	0,00
750	4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	0	0	0	0	0	0	0,00
752	4.3.03.01.02	Pendapatan atau Pengembalian Hibah	0	0	0	0	0	0	0,00
759		Jumlah Pendapatan	2.788.088	2.788.088	2.423.988	6.373.988			188,42
761	6	BELANJA DAERAH	69.143.137.819	67.942.616.091	0	0	67.942.616.091	-1.300.521.727	96,12
762	6.1	BELANJA OPERASI	69.143.137.819	67.942.616.091	0	0	67.942.616.091	-1.300.521.727	96,12
763	6.1.01	Belanja Pegawai	42.348.067.076	41.727.867.027	0	0	41.727.867.027	-620.200.049	96,54
764	6.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.222.256.228	9.140.734.490	0	0	9.140.734.490	-81.521.738	99,12
765	6.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	6.438.690.200	6.388.427.500	0	0	6.388.427.500	-50.262.700	99,37
766	6.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	655.261.888	650.389.499	0	0	650.389.499	-4.872.389	99,36
771	6.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	271.900.000	276.500.000	0	0	276.500.000	4.600.000	97,70
774	6.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	470.853.084	452.434.000	0	0	452.434.000	-18.419.084	96,08
777	6.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	180.940.000	187.745.000	0	0	187.745.000	6.805.000	99,33
780	6.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	369.661.141	397.513.380	0	0	397.513.380	28.852.239	94,41
783	6.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.338.954	10.949.207	0	0	10.949.207	-389.747	96,56
786	6.1.01.01.08	Belanja Pembebanan Gaji ASN	92.598.712	92.598.712	0	0	92.598.712	0	100,00
789	6.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	780.486.008	774.121.368	0	0	774.121.368	-6.364.640	99,19
792	6.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja ASN	13.279.419	13.142.198	0	0	13.142.198	-137.221	99,87
795	6.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	38.838.398	38.426.583	0	0	38.426.583	-411.815	98,97
798	6.1.01.01.12	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	38.838.398	38.426.583	0	0	38.426.583	-411.815	98,97
801	6.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	33.122.800.850	32.587.222.537	0	0	32.587.222.537	-535.578.313	98,38
802	6.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	24.222.304.361	24.035.354.271	0	0	24.035.354.271	-186.950.090	99,23
805	6.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	0	0	0	0	0	0	0,00
808	6.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.377.206.536	4.318.846.741	0	0	4.318.846.741	-58.359.795	98,67
811	6.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	0	0	0	0	0	0	0,00
814	6.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	4.523.288.953	4.233.821.525	0	0	4.233.821.525	-289.467.428	93,58
817	6.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pembiayaan Objek Lain ASN	0	0	0	0	0	0	0,00
818	6.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0	0	0	0	0	0	0,00
824	6.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0	0	0	0	0	0	0,00
825	6.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TKG) PNSD	0	0	0	0	0	0	0,00
867	6.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0	0	0	0	0	0	0,00
869	6.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tambahan) Guru PNSD	0	0	0	0	0	0	0,00
881	6.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0	0	0	0	0	0	0,00
883	6.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0	0	0	0	0	0	0,00
887	6.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengkualifikasi BMD	0	0	0	0	0	0	0,00
870	6.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	0	0	0	0	0	0	0,00
871	6.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	0	0	0	0	0	0	0,00
873	6.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	0	0	0	0	0	0	0,00
875	6.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	0	0	0	0	0	0	0,00
877	6.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	0	0	0	0	0	0	0,00
879	6.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	0	0	0	0	0	0	0,00
881	6.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alot Kelengkapan DPRD	0	0	0	0	0	0	0,00
883	6.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alot Kelengkapan Lainnya DPRD	0	0	0	0	0	0	0,00
885	6.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komodifikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	0	0	0	0	0	0	0,00
887	6.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	0	0	0	0	0	0	0,00
889	6.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	0	0	0	0	0	0	0,00
891	6.1.01.04.11	Belanja Pembebanan Gaji DPRD	0	0	0	0	0	0	0,00
893	6.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Komodifikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	0	0	0	0	0	0	0,00
895	6.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	0	0	0	0	0	0	0,00
900	6.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Penghasilan DPRD	0	0	0	0	0	0	0,00
902	6.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDHWWKDH	0	0	0	0	0	0	0,00
903	6.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDHWWKDH	0	0	0	0	0	0	0,00
906	6.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDHWWKDH	0	0	0	0	0	0	0,00
907	6.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDHWWKDH	0	0	0	0	0	0	0,00
909	6.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDHWWKDH	0	0	0	0	0	0	0,00
911	6.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDHWWKDH	0	0	0	0	0	0	0,00
913	6.1.01.05.06	Belanja Pembebanan Gaji KDHWWKDH	0	0	0	0	0	0	0,00
915	6.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDHWWKDH	0	0	0	0	0	0	0,00
917	6.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja KDHWWKDH	0	0	0	0	0	0	0,00
919	6.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDHWWKDH	0	0	0	0	0	0	0,00
921	6.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDHWWKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	0	0	0	0	0	0	0,00
927	6.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDHWWKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDHWWKDH	0	0	0	0	0	0	0,00
930	6.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDHWWKDH	0	0	0	0	0	0	0,00
931	6.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	0	0	0	0	0	0	0,00
933	6.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDHWWKDH	0	0	0	0	0	0	0,00
935	6.1.01.06	Belanja Pegawai BLUD	0	0	0	0	0	0	0,00
936	6.1.01.06.01	Belanja Pegawai BLUD	0	0	0	0	0	0	0,00
938	6.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.788.088.742	26.114.689.894	0	0	26.114.689.894	-673.398.848	97,45
939	6.1.02.01	Belanja Barang	3.834.270.892	3.512.422.283	0	0	3.512.422.283	-321.848.609	96,65
940	6.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.834.270.892	3.512.422.283	0	0	3.512.422.283	-321.848.609	96,65
1.017	6.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0	0	0	0	0	0	0,00
1.031	6.1.02.01.03	Belanja Barang Bekas Dipakai	0	0	0	0	0	0	0,00
1.035	6.1.02.02	Belanja Jasa	12.405.285.036	12.043.425.678	0	0	12.043.425.678	-361.859.358	98,73
1.036	6.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.676.344.609	8.603.303.317	0	0	8.603.303.317	-73.041.292	99,19
1.119	6.1.02.02.02	Belanja Jasa Perjalanan/Perorangan	41.974.080	40.250.959	0	0	40.250.959	-1.723.121	95,89
1.119	6.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	0	0	0	0	0	0	0,00
1.130	6.1.02.02.04	Belanja Sewa Perlengkapan dan Mebel	1.342.281.350	1.317.965.000	0	0	1.317.965.000	-24.316.350	98,19
1.639	6.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	92.580.000	91.500.000	0	0	91.500.000	-1.080.000	98,83
1.703	6.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jembatan, dan Irigasi	0	0	0	0	0	0	0,00
1.840	6.1.02.02.07	Belanja Sewa Asat Tetap Lainnya	0	0	0	0	0	0	0,00
1.925	6.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konsultasi	48.958.000	48.484.900	0	0	48.484.900	-473.100	99,70
1.948	6.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konsultasi	0	0	0	0	0	0	0,00
1.959	6.1.02.02.10	Belanja Jasa Rekayasa/Layanan Penjualan/Pengantar	0	0	0	0	0	0	0,00
1.959	6.1.02.02.11	Belanja Jasa Rekayasa/Layanan Penjualan/Pengantar	1.141.005.000	963.250.000	0	0	963.250.000	-177.755.000	84,42
1.963	6.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	713.144.000	688.941.500	0	0	688.941.500	-24.202.500	96,23
1.968	6.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0	0	0	0	0	0	0,00
2.015	6.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0	0	0	0	0	0	0,00
2.046	6.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.289.005.335	1.277.642.662	0	0	1.277.642.662	-11.362.673	99,12
2.047	6.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	182.502.882	178.817.250	0	0	178.817.250	-3.685.632	97,98
2.083	6.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	585.185.000	585.040.000	0	0	585.040.000	-145.000	99,98
2.088	6.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	520.292.453	512.785.412					

2.877	5.1.03.02.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah-Jangka Pendek	0	0	0	0	0	0	0,00
2.878	5.1.03.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0	0	0	0	0	0	0,00
2.880	5.1.03.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Per	0	0	0	0	0	0	0,00
2.882	5.1.03.03.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Me	0	0	0	0	0	0	0,00
2.884	5.1.03.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pin	0	0	0	0	0	0	0,00
2.886	5.1.03.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pa	0	0	0	0	0	0	0,00
2.888	5.1.03.03.05	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Ju	0	0	0	0	0	0	0,00
2.890	5.1.03.03.06	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pan	0	0	0	0	0	0	0,00
2.892	5.1.03.03.07	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pe	0	0	0	0	0	0	0,00
2.894	5.1.03.03.08	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka M	0	0	0	0	0	0	0,00
2.896	5.1.03.03.09	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka P	0	0	0	0	0	0	0,00
2.898	5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKB)	0	0	0	0	0	0	0,00
2.899	5.1.03.04.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKB)-BUMN-Ja	0	0	0	0	0	0	0,00
2.901	5.1.03.04.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKB)-BUMN-Ja	0	0	0	0	0	0	0,00
2.902	5.1.03.04.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKB)-BUMN-Ja	0	0	0	0	0	0	0,00
2.905	5.1.03.04.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKB)-BUMN-Ja	0	0	0	0	0	0	0,00
2.907	5.1.03.04.05	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKB)-BUMN-Ja	0	0	0	0	0	0	0,00
2.909	5.1.03.04.06	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKB)-BUMN-Ja	0	0	0	0	0	0	0,00
2.911	5.1.03.04.07	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKB)-Swasta-J	0	0	0	0	0	0	0,00
2.913	5.1.03.04.08	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKB)-Swasta-J	0	0	0	0	0	0	0,00
2.915	5.1.03.04.09	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKB)-Swasta-J	0	0	0	0	0	0	0,00
2.917	5.1.03.05	Belanja Bunga Utang kepada Masyarakat (Citigati)	0	0	0	0	0	0	0,00
2.918	5.1.03.05.01	Belanja Bunga Utang kepada Masyarakat (Citigati)	0	0	0	0	0	0	0,00
2.920	5.1.03.06	Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD	0	0	0	0	0	0	0,00
2.921	5.1.03.06.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek	0	0	0	0	0	0	0,00
2.923	5.1.03.06.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah	0	0	0	0	0	0	0,00
2.925	5.1.03.06.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang	0	0	0	0	0	0	0,00
2.927	6.1.04	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0,00
2.928	5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMD	0	0	0	0	0	0	0,00
2.929	5.1.04.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMD	0	0	0	0	0	0	0,00
2.931	5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	0	0	0	0	0	0	0,00
2.932	5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	0	0	0	0	0	0	0,00
2.934	5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	0	0	0	0	0	0	0,00
2.936	5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	0	0	0	0	0	0	0,00
2.937	5.1.04.04	Belanja Subsidi kepada Koperasi	0	0	0	0	0	0	0,00
2.938	5.1.04.04.01	Belanja Subsidi kepada Koperasi	0	0	0	0	0	0	0,00
2.940	6.1.05	Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0,00
2.941	5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0	0	0	0	0	0	0,00
2.942	5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0	0	0	0	0	0	0,00
2.944	5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0	0	0	0	0	0	0,00
2.946	5.1.05.01.03	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	0	0	0	0	0	0	0,00
2.948	5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0	0	0	0,00
2.949	5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0	0	0	0,00
2.950	5.1.05.02.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0	0	0	0,00
2.953	5.1.05.02.03	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0	0	0	0,00
2.955	5.1.05.03	Belanja Hibah kepada BUMN	0	0	0	0	0	0	0,00
2.956	5.1.05.03.01	Belanja Hibah Uang kepada BUMN	0	0	0	0	0	0	0,00
2.958	5.1.05.03.02	Belanja Hibah Barang kepada BUMN	0	0	0	0	0	0	0,00
2.960	5.1.05.03.03	Belanja Hibah Jasa kepada BUMN	0	0	0	0	0	0	0,00
2.962	5.1.05.04	Belanja Hibah kepada BUMD	0	0	0	0	0	0	0,00
2.963	5.1.05.04.01	Belanja Hibah Uang kepada BUMD	0	0	0	0	0	0	0,00
2.965	5.1.05.04.02	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	0	0	0	0	0	0	0,00
2.967	5.1.05.04.03	Belanja Hibah Jasa kepada BUMD	0	0	0	0	0	0	0,00
2.969	5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum	0	0	0	0	0	0	0,00
2.970	5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang	0	0	0	0	0	0	0,00
2.974	5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Meraih	0	0	0	0	0	0	0,00
2.978	5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0	0	0	0	0	0	0,00
2.982	5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	0	0	0	0	0	0	0,00
2.986	5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	0	0	0	0	0	0	0,00
2.987	5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Sekolah/Unit Negeri	0	0	0	0	0	0	0,00
2.989	5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Sekolah/Unit Swasta	0	0	0	0	0	0	0,00
2.991	5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Sekolah/Swasta	0	0	0	0	0	0	0,00
2.993	5.1.05.06.04	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Sekolah/Swasta	0	0	0	0	0	0	0,00
2.995	5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0	0	0	0	0	0	0,00
2.996	5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0	0	0	0	0	0	0,00
2.998	6.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0,00
2.999	5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0	0	0	0	0	0	0,00
3.000	5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang dicairkan kepada Individu	0	0	0	0	0	0	0,00
3.002	5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang dicairkan kepada Individu	0	0	0	0	0	0	0,00
3.004	5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0	0	0	0	0	0	0,00
3.005	5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang dicairkan kepada Keluarga	0	0	0	0	0	0	0,00
3.007	5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang dicairkan kepada Keluarga	0	0	0	0	0	0	0,00
3.009	5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0,00
3.010	5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang dicairkan kepada Kelompok Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0,00
3.012	5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang dicairkan kepada Kelompok Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0,00
3.014	5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bantuan Pendidikan, Kesehatan,	0	0	0	0	0	0	0,00
3.015	5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang dicairkan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bantuan Pendidikan, Kesehatan,	0	0	0	0	0	0	0,00
3.017	5.1.06.04.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang dicairkan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bantuan Pendidikan, Kesehatan,	0	0	0	0	0	0	0,00
3.019	6.2	BELANJA MODAL	4.896.192.288	4.896.981.778	0	0	4.896.981.778	-263.211.820	94,67
3.020	6.2.01	Belanja Modal Tanah	0	0	0	0	0	0	0,00
3.021	6.2.01.01	Belanja Modal Tanah	0	0	0	0	0	0	0,00
3.022	6.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Perak	0	0	0	0	0	0	0,00
3.030	6.2.01.01.02	Belanja Modal Tanah Non Perak	0	0	0	0	0	0	0,00
3.040	6.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	0	0	0	0	0	0	0,00
3.086	6.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Pemeliharaan	1.762.198.885	1.764.383.778	0	0	1.764.383.778	-47.886.318	97,27
3.091	6.2.02.01	Belanja Modal Alat Beker	0	0	0	0	0	0	0,00
3.092	6.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Beker Darat	0	0	0	0	0	0	0,00
3.075	6.2.02.01.02	Belanja Modal Alat Beker Apung	0	0	0	0	0	0	0,00
3.082	6.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0	0	0	0	0	0	0,00
3.099	6.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkut	0	0	0	0	0	0	0,00
3.100	6.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkut Darat Bermotor	0	0	0	0	0	0	0,00
3.110	6.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkut Darat Tak Bermotor	0	0	0	0	0	0	0,00
3.115	6.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkut Apung Bermotor	0	0	0	0	0	0	0,00
3.121	6.2.02.02.04	Belanja Modal Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0	0	0	0	0	0	0,00
3.126	6.2.02.02.05	Belanja Modal Alat Angkut Berkecepatan Tinggi	0	0	0	0	0	0	0,00
3.129	6.2.02.03	Belanja Modal Alat Bantu dan Alat Lain	0	0	0	0	0	0	0,00
3.130	6.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bangkit Listrik	0	0	0	0	0	0	0,00
3.141	6.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bangkit Tak Listrik	0	0	0	0	0	0	0,00
3.155	6.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ular	0	0	0	0	0	0	0,00
3.177	6.2.02.04	Belanja Modal Alat Perawatan	0	0	0	0	0	0	0,00
3.178	6.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Perawatan	0	0	0	0	0	0	0,00
3.189	6.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	940.031.083	915.764.179	0	0	915.764.179	-24.266.914	97,42
3.190	6.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	27.975.000	28.498.230	0	0	28.498.230	-1.178.780	95,75
3.196	6.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	837.356.083	815.015.829	0	0	815.015.829	-22.340.164	97,32
3.204	6.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kayu/Kayu Pelapis	75.000.000	74.250.000	0	0	74.250.000	-750.000	99,00
3.212	6.2.02.06	Belanja Modal Alat Stuk, Konstruksi, dan Pemancar	549.400.000	535.778.000	0	0	535.778.000	-13.622.000	97,33
3.213	6.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Stuk	510.150.000	500.780.000	0	0	500.780.000	-8.370.000	98,15
3.220	6.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Konstruksi	39.250.000	34.998.000	0	0	34.998.000	-4.252.000	98,88
3.232	6.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0	0	0	0	0	0	0,00
3.281	6.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Nelayan	0	0	0	0	0	0	0,00
3.289	6.2.02.07	Belanja Modal Alat Kesehatan dan Kesejahteraan	0	0	0	0	0	0	0,00
3.290	6.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0,00
3.320	6.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0	0	0	0	0	0	0,00
3.326	6.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0	0	0	0	0	0	0,00
3.327	6.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0	0	0	0	0	0	0,00
3.382	6.2.02.08.02	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Mikro Nuklir	0	0	0	0	0	0	0,00
3.389	6.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Pengrajin Produk Sediaan	0	0	0	0	0	0	0,00
3.410	6.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0	0	0	0	0	0	0,00
3.427	6.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Perawatan Radiasi/Proteksi Lingkungan	0	0	0	0	0	0	0,00
3.434	6.2.02.08.06	Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	0	0	0	0	0	0	0,00
3.439	6.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0	0	0,00
3.448	6.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	0	0	0	0	0	0	0,00
3.463	6.2.02.08.09	Belanja Modal Alat Laboratorium Sterilisasi Kultur dan Instrumen	0	0	0	0	0	0	0,00
3.475	6.2.02.09	Belanja Modal Komputer	192.768.880	193.676.988	0	0	193.676.988	-9.088.108	99,57
3.476	6.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	179.000.000	179.176.988	0	0	179.176.988	-8.823.012	95,67
3.480	6.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	13.768.000	12.500.001	0	0	12.500.001	-867.999	93,70
3.486	6.2.02.11	Belanja Modal Alat Ekspansi	70.000.000	69.774.600	0	0	69.774.600	-225.400	99,68
3.487	6.2.02.11.01	Belanja Modal Alat Ekspansi Topografi	0	0	0	0	0	0	0,00
3.491	6.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Ekspansi Geodasi	70.000.000	69.774.600	0	0	69.774.600	-225.400	99,68
3.496	6.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengukuran	0	0	0	0	0	0	0,00
3.497	6.2.02.12								

3.561	5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	0	0	0	0	0	0	0,00
3.568	5.2.02.18	Belanja Modal Rambu - Rambu	0	0	0	0	0	0	0,00
3.569	5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu - Rambu Lalu Lintas Darat	0	0	0	0	0	0	0,00
3.593	5.2.02.18.02	Belanja Modal Rambu - Rambu Lalu Lintas Udara	0	0	0	0	0	0	0,00
3.601	5.2.02.18.03	Belanja Modal Rambu - Rambu Lalu Lintas Laut	0	0	0	0	0	0	0,00
3.604	5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0	0	0	0	0	0	0,00
3.605	5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0	0	0	0	0	0	0,00
3.612	5.2.02.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0	0	0	0	0	0	0,00
3.613	5.2.02.28.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0	0	0	0	0	0	0,00
3.615	5.2.02.39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0	0	0	0	0	0	0,00
3.616	5.2.02.39.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0	0	0	0	0	0	0,00
3.618	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.697.993.295	2.882.588.000	0	0	2.882.588.000	-215.405.295	93,05
3.619	5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	3.697.993.295	2.882.588.000	0	0	2.882.588.000	-215.405.295	93,05
3.620	5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempol Kerja	3.697.993.295	2.882.588.000	0	0	2.882.588.000	-215.405.295	93,05
3.658	5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempol Tinggal	0	0	0	0	0	0	0,00
3.672	5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	0	0	0	0	0	0	0,00
3.673	5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0	0	0	0	0	0	0,00
3.678	5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	0	0	0	0	0	0	0,00
3.679	5.2.03.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	0	0	0	0	0	0	0,00
3.682	5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0	0	0	0	0	0	0,00
3.683	5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0	0	0	0	0	0	0,00
3.685	5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Tugu Kertir/Pasti	0	0	0	0	0	0	0,00
3.688	5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu Tenda Batu	0	0	0	0	0	0	0,00
3.692	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	0	0	0	0	0	0	0,00
3.693	5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0	0	0	0	0	0,00
3.694	5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	0	0	0	0	0	0	0,00
3.705	5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	0	0	0	0	0	0	0,00
3.719	5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	0	0	0	0	0	0	0,00
3.729	5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0	0	0	0	0	0	0,00
3.729	5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengaliran Pemasang Sertol	0	0	0	0	0	0	0,00
3.739	5.2.04.02.03	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Padat	0	0	0	0	0	0	0,00
3.747	5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sempadan dan Pengembangan Bencana Alam	0	0	0	0	0	0	0,00
3.755	5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0	0	0	0	0	0	0,00
3.764	5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Batu	0	0	0	0	0	0	0,00
3.771	5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0	0	0	0	0	0	0,00
3.778	5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	0	0	0	0	0	0	0,00
3.778	5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Batu	0	0	0	0	0	0	0,00
3.785	5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0	0	0	0	0	0	0,00
3.790	5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0	0	0	0	0	0	0,00
3.795	5.2.04.03.04	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	0	0	0	0	0	0	0,00
3.800	5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	0	0	0	0	0	0	0,00
3.813	5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	0	0	0	0	0	0	0,00
3.818	5.2.04.03.07	Belanja Modal Instalasi Pertahanan	0	0	0	0	0	0	0,00
3.821	5.2.04.03.08	Belanja Modal Instalasi Gas	0	0	0	0	0	0	0,00
3.828	5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	0	0	0	0	0	0	0,00
3.831	5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	0	0	0	0	0	0	0,00
3.833	5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0	0	0	0	0	0	0,00
3.834	5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	0	0	0	0	0	0	0,00
3.840	5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	0	0	0	0	0	0	0,00
3.844	5.2.04.04.03	Belanja Modal Jaringan Telepon	0	0	0	0	0	0	0,00
3.850	5.2.04.04.04	Belanja Modal Jaringan Gas	0	0	0	0	0	0	0,00
3.886	5.2.05	Belanja Modal Asat Tetap Lainnya	0	0	0	0	0	0	0,00
3.887	5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perawatan	0	0	0	0	0	0	0,00
3.888	5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perawatan Tensiohid	0	0	0	0	0	0	0,00
3.871	5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perawatan Tensiohid dan Benda Mikro	0	0	0	0	0	0	0,00
3.875	5.2.05.01.03	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	0	0	0	0	0	0	0,00
3.880	5.2.05.01.04	Belanja Modal Musik	0	0	0	0	0	0	0,00
3.883	5.2.05.01.05	Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material)	0	0	0	0	0	0	0,00
3.888	5.2.05.01.06	Belanja Modal Three Dimensional Artifacts and Realities	0	0	0	0	0	0	0,00
3.889	5.2.05.01.07	Belanja Modal Tensiohid	0	0	0	0	0	0	0,00
3.892	5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Cultural	0	0	0	0	0	0	0,00
3.893	5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0	0	0	0	0	0	0,00
3.898	5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	0	0	0	0	0	0	0,00
3.903	5.2.05.02.03	Belanja Modal Tenda Penghayaan	0	0	0	0	0	0	0,00
3.908	5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	0	0	0	0	0	0	0,00
3.907	5.2.05.03.01	Belanja Modal Hewan Piaran	0	0	0	0	0	0	0,00
3.912	5.2.05.03.02	Belanja Modal Ternak	0	0	0	0	0	0	0,00
3.917	5.2.05.03.03	Belanja Modal Hewan Lainnya	0	0	0	0	0	0	0,00
3.919	5.2.05.04	Belanja Modal Benda Perawatan	0	0	0	0	0	0	0,00
3.920	5.2.05.04.01	Belanja Modal Ikan Bermanis (Piscum/ikan Bermanis)	0	0	0	0	0	0	0,00
3.922	5.2.05.04.02	Belanja Modal Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)	0	0	0	0	0	0	0,00
3.924	5.2.05.04.03	Belanja Modal Molusca (Kerang, Timun, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)	0	0	0	0	0	0	0,00
3.925	5.2.05.04.04	Belanja Modal Coelenterata (Ubur-ubur dan Sebangsanya)	0	0	0	0	0	0	0,00
3.928	5.2.05.04.05	Belanja Modal Echinodermata (Tipung, Bulu Babi, dan Sebangsanya)	0	0	0	0	0	0	0,00
3.930	5.2.05.04.06	Belanja Modal Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)	0	0	0	0	0	0	0,00
3.932	5.2.05.04.07	Belanja Modal Reptilia (Baya, Pengu, Kura-kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)	0	0	0	0	0	0	0,00
3.934	5.2.05.04.08	Belanja Modal Invertebrata (Paku, Lumut, Jamur, Paksi, Doyang, dan Sebangsanya)	0	0	0	0	0	0	0,00
3.938	5.2.05.04.09	Belanja Modal Alga (Rumput Laut dan Tambak-Tambak Laut yang Hilang di Dalam Air)	0	0	0	0	0	0	0,00
3.938	5.2.05.04.10	Belanja Modal Benda Perawatan Lainnya	0	0	0	0	0	0	0,00
3.940	5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	0	0	0	0	0	0	0,00
3.941	5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	0	0	0	0	0	0	0,00
3.943	5.2.05.06	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	0	0	0	0	0	0	0,00
3.944	5.2.05.06.01	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	0	0	0	0	0	0	0,00
3.952	5.2.05.07	Belanja Modal Asat Tetap Dalam Rencanasi	0	0	0	0	0	0	0,00
3.953	5.2.05.07.01	Belanja Modal Asat Tetap Dalam Rencanasi	0	0	0	0	0	0	0,00
3.955	5.2.05.08	Belanja Modal Asat Tidak Bermanis	0	0	0	0	0	0	0,00
3.956	5.2.05.08.01	Belanja Modal Asat Tidak Bermanis	0	0	0	0	0	0	0,00
3.968	5.2.05.88	Belanja Modal Asat Tetap Lainnya BOS	0	0	0	0	0	0	0,00
3.967	5.2.05.88.88	Belanja Modal Asat Tetap Lainnya BOS	0	0	0	0	0	0	0,00
3.969	5.2.05.90	Belanja Modal Asat Tetap Lainnya BLUD	0	0	0	0	0	0	0,00
3.970	5.2.05.99	Belanja Modal Asat Tetap Lainnya BLUD	0	0	0	0	0	0	0,00
3.972	5.2.06	Belanja Modal Asat Lainnya BLUD	0	0	0	0	0	0	0,00
3.973	5.2.06.09	Belanja Modal Asat Lainnya BLUD	0	0	0	0	0	0	0,00
3.974	5.2.06.99	Belanja Modal Asat Lainnya BLUD	0	0	0	0	0	0	0,00
3.975	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	0	0	0	0	0	0	0,00
3.978	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0	0	0	0	0	0	0,00
3.974	5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	0	0	0	0	0	0	0,00
3.975	5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	0	0	0	0	0	0	0,00
3.977	5.4	BELANJA TRANSFER	0	0	0	0	0	0	0,00
3.978	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0,00
3.979	5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	0	0	0	0	0	0	0,00
3.980	5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0,00
3.982	5.4.01.01.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota	0	0	0	0	0	0	0,00
3.984	5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	0	0	0	0	0	0	0,00
3.988	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0	0	0,00
3.987	5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	0	0	0	0	0	0	0,00
3.988	5.4.02.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi	0	0	0	0	0	0	0,00
3.990	5.4.02.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	0	0	0	0	0	0	0,00
3.992	5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0,00
3.993	5.4.02.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0,00
3.995	5.4.02.02.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0,00
3.997	5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0,00
3.998	5.4.02.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0,00
4.000	5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0,00
4.002	5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0	0	0	0	0	0	0,00
4.003	5.4.02.04.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	0	0	0	0	0	0	0,00
4.005	5.4.02.04.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	0	0	0	0	0	0	0,00
4.007	5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0	0	0	0	0	0	0,00
4.008	5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0	0	0	0	0	0	0,00
4.010	5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0	0	0	0	0	0	0,00
4.012	5.4.02.06	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0,00
4.013	5.4.02.06.01	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0,00
4.815		Jumlah Belanja	73.993.330.116	72.429.597.869	0	0	72.429.597.869	-1.563.732.247	97,88
4.816		SURPLUS/DEFISIT	-73.993.330.116	-72.429.597.869	0	2.625.999	-72.429.597.869	1.563.732.247	97,88
4.917			0	0	0	0	0	0	0,00
4.918	6	Pembayaran	0	0	0	0	0	0	0,00
4.919	6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0,00
4.920	6.1.01	Sisa Lebih perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	0	0	0	0	0	0,00
4.921	6.1.01.01	Penerimaan Penerimaan PAD	0	0	0	0	0	0	0,00
4.922	6.1.01.01.01	Penerimaan Penerimaan PAD Pajak Daerah	0	0	0	0	0	0	0,00
4.923	6.1.01.01.02	Penerimaan Penerimaan PAD Pajak Daerah	0	0	0	0	0	0	0,00
4.924	6.1.01.01.03	Penerimaan Penerimaan PAD Pajak Daerah	0	0	0	0	0	0	0,00
4.925	6.1.01.02.01	Penerimaan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	0	0	0	0	0	0	0,00
4.926	6.1.01.03	Penerimaan Belanja	0	0	0	0	0	0	0,00
4.927	6.1.01.03.01	Penerimaan Belanja Belanja Operasi	0	0	0	0	0	0	0,00

4.052	6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0	0,00
4.053	6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0	0,00
4.055	6.3.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0	0	0	0	0,00
4.056	6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0	0	0	0	0	0	0,00
4.057	6.2.02.02.03	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0	0	0	0	0	0	0,00
4.059	6.3.05	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0	0	0	0	0,00
4.060	6.2.03.03	Pembayaran Piutang dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0	0	0	0	0	0	0,00
4.061	6.2.03.03.01	Pembayaran Piutang dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-SLBRI-Jangka Pendek	0	0	0	0	0	0	0,00
4.063	6.2.03.03.02	Pembayaran Piutang dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-SLBRI-Jangka Menengah	0	0	0	0	0	0	0,00
4.065	6.2.03.03.03	Pembayaran Piutang dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-SLBRI-Jangka Panjang	0	0	0	0	0	0	0,00
4.067		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	0	0	0,00
4.068		Pembayaran Netto	0	0	0	0	0	0	0,00
4.069		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SLPA)	-73.980.890.795	-72.438.947.869	0	2.623.986	-72.438.323.819	8.543.732.247	97,88

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Badan Kepegawaian Daerah
DAFTAR PIUTANG PAJAK
31 Desember 2023

Lampiran 2

NO	JENIS PIUTANG PAJAK	SALDO AWAL 31 Januari 2023 (Rp)	KOREKSI	PENYISIHAN SPOD / DOKUMEN PENETAPAN YANG DIPERSEMAKAN Tahun 2023 (Rp)	PELUNASAN SPOD / DOKUMEN PENETAPAN YANG DIPERSEMAKAN YANG DIBERIKAN Tahun 2023 (Rp)	SALDO AKHIR 31-Desember-2023 (Rp)	KUALITAS UMUR PIUTANG					PENYISIHAN PIUTANG					Jumlah	Jumlah Penyisihan Piutang per 31-Desember-2023	Jumlah Penyisihan Piutang per 31-Desember-2022	Salah
							LANGKAH (0 s.d 1 Tahun)	KURANG LANGKAH (lebih dari 1 Tahun s.d 3 Tahun)	DRAGUNAN (lebih dari 3 Tahun s.d 5 Tahun)	MACEY (Lebih dari 5 Tahun)	JUMLAH PIUTANG PER 31-Desember-2023	LANGKAH (0 s.d 1 Tahun)	KURANG LANGKAH (lebih dari 1 Tahun s.d 3 Tahun)	DRAGUNAN (lebih dari 3 Tahun s.d 5 Tahun)	MACEY (Lebih dari 5 Tahun)	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG PER 31-Desember-2023				
1	2	3	4	5	6	7	$8=(5+6) - (8+7)$	9	10	11	12	$13 = (9+10+11+12)$	$14=(0\%*9)$	$15=(10\%*10)$	$16=(20\%*11)$	$17=(100\%*12)$	$18=(14+15+16+17)$			
Badan Kepegawaian Daerah																				
1	PNS												0	0	0	0	0	0	0	
2	BBNPH												0	0	0	0	0	0	0	
3	PNSKB												0	0	0	0	0	0	0	
4	PAP												0	0	0	0	0	0	0	
5	PAJAK ROKOK												0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

H. Sumarna, S.Pd, M.H
NIP. 19681216-199803 1 003

KEPALA SUB BAGIAN TATAJUSUA

Emmy Rusdini, SE., MM
NIP. 19711112 200112 2 001

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Badan Kepegawaian Daerah
DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI
31 Desember 2023

NO	JENIS PIUTANG RETRIBUSI	BALDO AWAL 31-Desember-2023 (Rp)	KOREKSI	PEMERINTAH RPDP / DOKUMEN REVISI PIUTANG YANG DIPERSAMAKAN Tahun 2023 (Rp)	PEMERINTAH RPDP / DOKUMEN REVISI PIUTANG YANG DIPERSAMAKAN Tahun 2023 (Rp)	PELUNASAN RPDP / DOKUMEN REVISI PIUTANG YANG DIPERSAMAKAN Tahun 2023 (Rp)	SALDO AKHIR 31-Desember-2023 (Rp)	KUALITAS UMUR PIUTANG					PENYISIHAN PIUTANG					Jumlah Piutang 31-Desember-2023	Salah
								LANCAR (0 s.d <1 Bulan)	KURANG LANCAR (1 s.d <3 bulan)	DIRAGUKAN (3 s.d <12 bulan)	MAGET (12 bulan)	Jumlah Piutang 31-Desember-2023	LANCAR (0 s.d <1 Bulan)	KURANG LANCAR (1 s.d <3 bulan)	DIRAGUKAN (3 s.d <12 bulan)	MAGET (12 bulan)	Jumlah Piutang 31-Desember-2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Badan Kepegawaian Daerah																			
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Retribusi Pelayanan Pendidikan						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Retribusi Pemakaian Kalkulasi Daerah	0		2.750.000	2.750.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Retribusi Terminal						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Retribusi Penyediaan Air						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Retribusi Pelayanan Produksi Usaha Kecil						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Retribusi lain-lain untuk Angkutan Umum						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Retribusi lain-lain Usaha Perikanan						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Retribusi Pelayanan lain-lain						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	2.750.000	2.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MENGETAHUI
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KEPALA SUB BADAN TATA USAHA


H. Bumsana, ST, MM
NIP. 19881216-1988011-003


Enny Ruelin, SE, MM
NIP. 19711112-200112-2-001

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Badan Kepegawaian Daerah
DAFTAR PUTANG LAIN - LAIN PAD YAH SAH
31 Desember 2023

NO	JENIS PUTANG LAIN-LAIN PAD YAH SAMI	SALDO AWAL 31-Desember-2023 (Rp)	KORBAH	PEMERINTAH MPD / PEMERINTAH YANG DIPERAMAKAN Tahun 2023 (Rp)	PELUANG BOPD / PEMERINTAH YANG DIPERAMAKAN Tahun 2023 (Rp)	PELUANG BOPD / PEMERINTAH YANG DIPERAMAKAN Tahun 2023 (Rp)	BALDO JAHIR 31-Desember-2023 (Rp)	KUALITAS UMUR PUTANG				PENYEBABAN PUTANG				Jumlah Penyesuaian Putang Per 31-Desember-2023	Jumlah Penyesuaian Putang Per 31-Desember-2023	Salah
								LANCAR (≤ 1 Tahun)	KURANG LANCAR (1 s.d. 3 Tahun)	DURAGUKAN (3 s.d. 5 Tahun)	MAGET (> 5 Tahun)	Jumlah Putang Per 31-Desember-2023	LANCAR (≤ 1 Tahun)	KURANG LANCAR (1 s.d. 3 Tahun)	DURAGUKAN (3 s.d. 5 Tahun)			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Badan Kepegawaian Daerah																	
2	Hutang Pengadaan BMD yang Tidak Dipekai																	
3	Hutang Pengadaan BMD yang Tidak Dipekai																	
4	Jasa Gaji																	
5	Hutang Pengadaan Dana Bergulir																	
6	Pendapatan Bunga																	
7	Peserahan Koneksi, Pemasangan, dan Instalasi																	
8	Peserahan Koneksi dan Instalasi																	
9	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
10	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
11	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
12	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
13	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
14	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
15	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
16	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
17	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
18	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
19	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
20	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
21	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
22	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
23	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
24	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
25	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
26	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
27	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
28	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
29	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
30	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
31	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
32	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
33	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
34	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
35	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
36	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
37	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
38	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
39	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
40	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
41	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
42	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
43	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
44	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
45	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
46	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
47	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
48	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
49	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
50	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
51	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
52	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
53	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
54	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
55	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
56	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
57	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
58	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
59	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
60	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
61	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
62	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
63	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
64	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
65	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
66	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
67	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
68	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
69	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
70	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
71	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
72	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
73	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
74	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
75	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
76	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
77	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
78	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
79	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
80	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
81	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
82	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
83	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
84	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
85	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
86	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
87	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
88	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
89	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
90	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
91	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
92	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
93	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
94	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
95	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
96	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
97	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
98	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
99	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	
100	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan																	

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

Emmy Rustini, SE., MM
Emmy Rustini, SE., MM
NIP. 19711112 200112 2 001

MENGETAHUI
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

H. Sumasna, ST., ILMU
H. Sumasna, ST., ILMU
NIP. 1981216 199803 1 003

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Badan Kepegawaian Daerah
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
31 Desember 2023

NO	JENIS ASET TETAP	SALDO AWAL 2023 (Rp)	MUTASI		SALDO AKHIR PER 31- Des-2023 (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN SD 31-Des-2023 (Rp)	NILAI BUKU PER 31-Des-2023 (Rp)
			BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)			
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)	7	8=(6-7)
1	TANAH	3.393.780.000,00	25.609.500.000,00	-	29.003.280.000,00	-	29.003.280.000,00
2	PERALATAN DAN MESIN	24.543.316.403,00	2.143.299.938,00	417.460.000,00	26.269.156.341,00	21.323.469.988	4.945.686.353,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	2.645.732.540,00	6.285.847.075,00	-	8.931.579.615,00	4.996.485.098	3.935.094.517,00
4	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	205.841.367,00	-	-	205.841.367,00	99.986.424	105.854.943,00
5	ASET TETAP LAINNYA	144.512.055,00	-	-	144.512.055,00	86.189.454	58.322.601,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	30.933.182.365,00	34.038.647.013,00	417.460.000,00	64.554.369.378,00	26.506.130.964,00	38.048.238.414,00

(Dalam Rupiah)

MENGETAHUI
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sumarna
 H. Sumarna, ST., MUM
 NIP. 19681216 199803 1 003



Enny Rustini, SE., MM
 NIP. 19711112 200112 2 001

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Badan Kepegawaian Daerah
DAFTAR PERSEDIAAN
31 Desember 2023

NO	Kode Akun	URAIAN	SALDO PERSEDIAAN PER 31 DES 2023	SALDO PERSEDIAAN PER 31 DES 2022
1		2	3	4
	1.1.12.01	BARANG PAKAI HABIS	52.709.000	38.453.715
	1.1.12.01.01	BAHAN	0	0
1	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan Dan Konstruksi	0	0
2	1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	0	0
3	-	Bahan Peledak	0	0
4	1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar Dan Pelumas	0	0
5	1.1.12.01.01.0005	Bahan Baku	0	0
6	1.1.12.01.01.0006	Bahan Kimia Nuklir	0	0
7	1.1.12.01.01.0007	Barang Dalam Proses	0	0
8	1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	0	0
9	1.1.12.01.01.0009	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0	0
10	1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas	0	0
11	1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0	0
12	1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	0	0
	1.1.12.01.02	SUKU CADANG	0	0
1	1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan	0	0
2	1.1.12.01.02.0002	Suku Cadang Alat Besar	0	0
3	1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran	0	0
4	1.1.12.01.02.0004	Suku Cadang Alat Laboratorium	0	0
5	1.1.12.01.02.0005	Suku Cadang Alat Pemancar	0	0
6	1.1.12.01.02.0006	Suku Cadang Alat Studio Dan Komunikasi	0	0
7	1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian	0	0
8	1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel	0	0
9	-	Suku Cadang Alat Persenjataan	0	0
10	1.1.12.01.02.0010	Persediaan Dari Belanja Bantuan Sosial	0	0
11	1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya	0	0
	1.1.12.01.03	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	52.709.000	38.453.715
1	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	24.324.000	11.487.015
2	1.1.12.01.03.0002	Kertas Dan Cover	0	0
3	1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	28.385.000	26.966.700
4	1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	0	0
5	1.1.12.01.03.0005	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0	0
6	1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	0	0
7	1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	0	0
8	1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	0	0
9	1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas	0	0
10	1.1.12.01.03.0010	Kaportap Dan Perlengkapan Satwa	0	0
11	1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olah Raga	0	0
12	1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	0	0
13	1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	0
	1.1.12.01.04	OBAT-OBATAN	0	0
1	1.1.12.01.04.0001	Obat	0	0
2	1.1.12.01.04.0002	Obat-Obatan Lainnya	0	0
	1.1.12.01.05	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	0	0
1	1.1.12.01.05.0001	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0
2	1.1.12.01.05.0002	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0	0
	1.1.12.01.06	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA	0	0
1	1.1.12.01.06.0001	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0	0
2	1.1.12.01.06.0002	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	0	0
	1.1.12.01.07	NATURA DAN PAKAN	0	0
1	1.1.12.01.07.0001	Natura	0	0
2	1.1.12.01.07.0002	Pakan	0	0
3	1.1.12.01.07.0003	Natura Dan Pakan Lainnya	0	0
	1.1.12.01.08	PERSEDIAAN PENELITIAN	0	0
1	1.1.12.01.08.0001	Persediaan Penelitian Biologi	0	0
2	1.1.12.01.08.0002	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	0	0
3	1.1.12.01.08.0003	Persediaan Penelitian Teknologi	0	0
4	1.1.12.01.08.0004	Persediaan Penelitian Lainnya	0	0

NO	Kode Akun	URAIAN	SALDO PERSEDIAAN PER 31 DES 2023	SALDO PERSEDIAAN PER 31 DES 2022
	1.1.12.01.09	PERSEDIAAN DALAM PROSES	0	0
1	1.1.12.01.09.0001	Persediaan Dalam Proses	0	0
2	1.1.12.01.09.0002	Persediaan Dalam Proses Lainnya	0	0
	1.1.12.02	BARANG TAK HABIS PAKAI	0	0
	1.1.12.02.01	KOMPONEN	0	0
1	1.1.12.02.01.0001	Komponen Jembatan Baja	0	0
2	1.1.12.02.01.0002	Komponen Jembatan Pratekan	0	0
3	1.1.12.02.01.0003	Komponen Peralatan	0	0
4	1.1.12.02.01.0004	Komponen Rambu-Rambu	0	0
5	1.1.12.02.01.0005	Attachment	0	0
6	1.1.12.02.01.0006	Komponen Lainnya	0	0
	1.1.12.02.02	P I P A	0	0
1	1.1.12.02.02.0001	Pipa Air Besi Tuang (Dci)	0	0
2	1.1.12.02.02.0002	Pipa Asbes Semen (Acp)	0	0
3	1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja	0	0
4	1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton Pratekan	0	0
5	1.1.12.02.02.0005	Pipa Fiber Glass	0	0
6	1.1.12.02.02.0006	Pipa Plastik Pvc (Upvc)	0	0
7	1.1.12.02.02.0007	P I P A Lainnya	0	0
	1.1.12.03	BARANG BEKAS DIPAKAI	0	0
	1.1.12.03.01	KOMPONEN BEKAS DAN PIPA BEKAS LAINNYA	0	0
1	1.1.12.03.01.0001	Komponen Bekas	0	0
2	1.1.12.03.01.0002	Pipa Bekas	0	0
3	1.1.12.03.01.0003	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya	0	0
JUMLAH PERSEDIAAN			52.709.000	38.453.715

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KEPALA BUKU KAJIAN TATA USAHA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Badan Kepegawaian Daerah
DAFTAR MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TEAP
31 Desember 2023

NO	AKUMULASI PENYUSUTAN	SALDO AWAL 2023 (Rp)	PENAMBAHAN					PENGURANGAN					SALDO AKHIR PER 31-Dec-2023 (Rp)		
			KOREKSI (Rp)	MUTASI MASUK (Rp)	REKLASIFIKASI (Rp)	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN (Rp)	Hibah/Pengakuan Penerimaan Lainnya yang sah (Rp)	JUMLAH (Rp)	KOREKSI (Rp)	MUTASI KELUAR (Rp)	REKLASIFIKASI (Rp)	PENGHAPUSAN (Rp)		Hibah/Pengakuan Pengeluaran Lainnya yang Sah (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4+5+6+7+8	10	11	12	13	14	15 = 10+11+12+13+14	16 = 3+9-15
1	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN DAN BANGUNAN	20.019.009.993		4.833.079		1.531.010.746		1.535.843.825	55.413.058	175.970.772				231.383.830	21.323.469.988
2	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	1.275.866.212		3.602.348.075		118.480.811		3.720.826.886						0	4.996.485.098
3	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	89.684.336				10.292.088		10.292.088						0	99.986.424
4	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	79.486.050				6.684.404		6.684.404						0	86.169.454
	JUMLAH	21.483.884.591	0	3.607.182.154	0	1.666.478.049	0	5.273.660.203	56.413.059	175.970.772	0	0	0	231.383.830	28.506.150.964
	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	3.203.543.373				0		0						0	3.203.543.373
	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP DAN ASET LAINNYA	24.667.397.964	0	3.607.182.154	0	1.666.478.049	0	5.273.660.203	55.413.058	175.970.772	0	0	0	231.383.830	28.709.874.337

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN DAFTAR ASET LAINNYA
31 Desember 2023

LAMPIRAN 11

NO	URAIAN	SALDO AWAL 01-Jan-2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 31-Des-2023
1	2	3	4	5	6 = (3+ 4 - 5)
	ASET TIDAK BERWUJUD				
1	Software	145.500.000,00	0,00	0,00	145.500.000,00
2	ISO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tidak Berwujud	145.500.000,00	0,00	0,00	145.500.000,00
	ASET LAIN- LAIN	3.508.083.848,00			
	Jumlah Aset lain - lain	3.508.083.848,00	0,00	0,00	3.508.083.848,00
	TOTAL	3.653.583.848,00	0,00	0,00	3.653.583.848,00

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DAFTAR RINCIAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ABET LAINNYA
31 Desember 2023

NAMA PERANGKAT DAERAH : Badan Kepegawaian Daerah

No	Keterangan	Saldo Awal 2023	Realisasi Belanja Modal di LRA TA 2023	Belanja Modal TA 2023 yang Tidak termasuk Kaptalisasi (Tidak menjadi Aset Lainnya)	Belanja Modal yang Tidak menjadi Aset Lainnya	Mutasi Tambah					Mutasi Kurang					Saldo Akhir per 31 Des 2023	Amortisasi 31 Des 2023	Nilai Buku Per 31 Des 2023	
						Pengadaan dari OPD Lain (Mutasi Masuk antar OPD)	Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa	Korupsi Pencatatan	Kelebihan/Defisit	Hibah/Pengakuan dan Penerimaan Lainnya yang Bersifat Tidak Tetap	Jumlah	Penghapusan (Mutasi Keluar antar OPD)	Perolehan Aset Tetap ke OPD Lain (Mutasi Masuk antar OPD)	Korupsi Pencatatan	Kelebihan/Defisit				Hibah/Pengakuan dan Penerimaan Lainnya yang Bersifat Tidak Tetap
1	2	3	4	5	6 = (4) - (5)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = (11) + (12) + (13) + (14) + (15)	17	18	19 = (17) - (18)	
1	ASET TAK BERWUJUD																		
1	SOFTWARE	146.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.000.000	-	146.000.000,00
2	ISO	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
3	LAIN - LAIN	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
JUMLAH ASET TAK BERWUJUD		146.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.000.000	-	146.000.000,00
ASET LAIN - LAIN		3.608.093.848,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.608.093.848,00	-	3.608.093.848,00
ASET LAIN - LAIN		3.608.093.848,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.608.093.848,00	-	3.608.093.848,00
KETERANGAN UNTUK BELANJA MODAL YANG TIDAK DIKAPITALISASI																			
BEBAN JASA																			
JUMLAH		3.608.093.848,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.608.093.848,00	-	3.608.093.848,00

MENGETAHUI
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



H. Sumarna, ST., MUM
NIP. 19681216 198803 1 003

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DAFTAR AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD
31 Desember 2023

NAMA PERANGKAT DAERAH : Badan Kepegawaian Daerah

No	Kode Akun LRA	Uraian	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Umur Ekonomis (Bulan)	Nilai Amortisasi per Bulan	Lama/Umur Penggunaan Per 31-Dec-2023	Nilai/Beban Amortisasi Tahun 2023	Nilai Amortisasi s/d Tahun 2022	Nilai Amortisasi s/d Tahun 2023	Nilai Buku per 31-Dec-2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) : (5)	(7) = (N atau tahun berjalan) - (3) + 1	(8) = (6) atau (8) = 0	(9) = (5) x (6) atau (9) = (7) x (6)	(9) = (5) x (6) atau (9) = (7) x (6)	(10) = (4) - (9)
		Aset Tidak Berwujud									
1	5.2.05.08.01.0001	Belanja Modal Goodwill				0,00	1488	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5.2.05.08.01.0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise				0,00	1488	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5.2.05.08.01.0003	Belanja Modal Hak Cipta				0,00	1488	0,00	0,00	0,00	0,00
4	5.2.05.08.01.0004	Belanja Modal Hak Paten				0,00	1488	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	31-Dec-17	145.500.000,00	60	2.425.000,00	60	0,00	145.500.000,00	145.500.000,00	0,00
6	5.2.05.08.01.0006	Belanja Modal Kajian				0,00	1488	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5.2.05.08.01.0007	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya				0,00	1488	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5.2.05.08.01.0008	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan				0,00	1488	0,00	0,00	0,00	0,00
9	5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya				0,00	1488	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah		145.500.000,000		2.425.000,0000		-	145.500.000,0000	145.500.000,0000	-

Kepala Sub Bagian Tata Usaha



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
31 Desember 2023

LAMPIRAN 13

Kode Rekening	Uraian	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31-Des-2022	PENDAPATAN LRA PER 31-Des-2023	Pendapatan Diterima Dimuka Per 31-Des-2022 (manfaat Untuk Tahun 2023)	PENDAPATAN LRA TA 2023 YANG MENJADI HAK TAHUN 2023	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31-Des-2023
2	3	4	5	6	7	8 = 4 + 5 + 6 + 7
4	PENDAPATAN DAERAH	233.347.167,00	5.373.900,00	62.201.950,00	2.750.000,00	173.769.167,00
4.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	233.347.167,00	5.373.900,00	62.201.950,00	2.750.000,00	173.769.167,00
4.1.01	Pajak Daerah	-	-	-	-	-
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-	-	-	-
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	-	-	-	-	-
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	-	-	-	-	-
4.1.01.01.01.0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	-	-	-	-	-
4.1.01.01.01.0003	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
4.1.01.01.01.0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	-	-	-	-	-
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	-	-	-	-	-
4.1.01.01.02.0002	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	-	-	-	-	-
4.1.01.01.02.0003	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	-	-	-	-	-
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	-	-	-	-	-
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	-	-	-	-	-
4.1.01.01.03.0003	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
4.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	-	-	-	-	-
4.1.01.01.04.0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	-	-	-	-	-
4.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	-	-	-	-	-
4.1.01.01.04.0003	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
4.1.01.01.04.0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	-	-	-	-	-
4.1.01.01.05.0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	-	-	-	-	-
4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	-	-	-	-	-
4.1.01.01.05.0003	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
4.1.01.01.05.0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	-	-	-	-	-
4.1.01.01.06.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	-	-	-	-	-
4.1.01.01.06.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	-	-	-	-	-
4.1.01.01.06.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
4.1.01.01.06.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
4.1.01.01.07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	-	-	-	-	-
4.1.01.01.07.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	-	-	-	-	-
4.1.01.01.07.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	-	-	-	-	-
4.1.01.01.07.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
4.1.01.01.07.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	-	-	-	-	-
4.1.01.01.08.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	-	-	-	-	-
4.1.01.01.08.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	-	-	-	-	-
4.1.01.01.08.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
4.1.01.01.08.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
4.1.01.01.09	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	-	-	-	-	-
4.1.01.01.09.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	-	-	-	-	-
4.1.01.01.09.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	-	-	-	-	-
4.1.01.01.09.0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
4.1.01.01.09.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
4.1.01.01.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	-	-	-	-	-
4.1.01.01.10.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	-	-	-	-	-
4.1.01.01.10.0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum	-	-	-	-	-
4.1.01.01.10.0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
4.1.01.01.10.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
4.1.01.01.11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	-	-	-	-	-
4.1.01.01.11.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	-	-	-	-	-
4.1.01.01.11.0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum	-	-	-	-	-
4.1.01.01.11.0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
4.1.01.01.11.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
4.1.01.01.12	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	-	-	-	-	-
4.1.01.01.12.0001	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi	-	-	-	-	-
4.1.01.01.12.0002	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum	-	-	-	-	-
4.1.01.01.12.0003	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
4.1.01.01.12.0004	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
4.1.01.01.13	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar	-	-	-	-	-
4.1.01.01.13.0001	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi	-	-	-	-	-
4.1.01.01.13.0002	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum	-	-	-	-	-
4.1.01.01.13.0004	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
4.1.01.01.14	PKB-Mobil Roda Tiga	-	-	-	-	-
4.1.01.01.14.0001	PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi	-	-	-	-	-
4.1.01.01.14.0002	PKB-Mobil Roda Tiga-Umum	-	-	-	-	-
4.1.01.01.14.0003	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
4.1.01.01.14.0004	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBKNB)	-	-	-	-	-
4.1.01.02.01	BBKNB-Mobil Penumpang-Sedan	-	-	-	-	-
4.1.01.02.01.0001	BBKNB-Mobil Penumpang-Sedan	-	-	-	-	-
4.1.01.02.02	BBKNB-Mobil Penumpang-Jeep	-	-	-	-	-
4.1.01.02.02.0001	BBKNB-Mobil Penumpang-Jeep	-	-	-	-	-
4.1.01.02.03	BBKNB-Mobil Penumpang-Minibus	-	-	-	-	-
4.1.01.02.03.0001	BBKNB-Mobil Penumpang-Minibus	-	-	-	-	-
4.1.01.02.04	BBKNB-Mobil Bus-Microbus	-	-	-	-	-
4.1.01.02.04.0001	BBKNB-Mobil Bus-Microbus	-	-	-	-	-
4.1.01.02.05	BBKNB-Mobil Bus-Bus	-	-	-	-	-
4.1.01.02.05.0001	BBKNB-Mobil Bus-Bus	-	-	-	-	-
4.1.01.02.06	BBKNB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	-	-	-	-	-
4.1.01.02.06.0001	BBKNB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	-	-	-	-	-
4.1.01.02.07	BBKNB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	-	-	-	-	-
4.1.01.02.07.0001	BBKNB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	-	-	-	-	-
4.1.01.02.08	BBKNB-Mobil Barang/Beban-Truck	-	-	-	-	-
4.1.01.02.08.0001	BBKNB-Mobil Barang/Beban-Truck	-	-	-	-	-
4.1.01.02.09	BBKNB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	-	-	-	-	-
4.1.01.02.09.0001	BBKNB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	-	-	-	-	-
4.1.01.02.10	BBKNB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	-	-	-	-	-
4.1.01.02.10.0001	BBKNB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	-	-	-	-	-
4.1.01.02.11	BBKNB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	-	-	-	-	-
4.1.01.02.11.0001	BBKNB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	-	-	-	-	-
4.1.01.02.12	BBKNB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	-	-	-	-	-
4.1.01.02.12.0001	BBKNB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	-	-	-	-	-
4.1.01.02.13	BBKNB-Kendaraan Khusus Alat Berat	-	-	-	-	-
4.1.01.02.13.0001	BBKNB-Kendaraan Khusus Alat Berat	-	-	-	-	-
4.1.01.02.14	BBKNB-Mobil Roda Tiga	-	-	-	-	-
4.1.01.02.14.0001	BBKNB-Mobil Roda Tiga	-	-	-	-	-
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	-	-	-	-
4.1.01.03.01	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	-	-	-	-	-
4.1.01.03.01.0001	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	-	-	-	-	-
4.1.01.03.02	PBBKB-Bahan Bakar Solar	-	-	-	-	-
4.1.01.03.02.0001	PBBKB-Bahan Bakar Solar	-	-	-	-	-
4.1.01.03.03	PBBKB-Bahan Bakar Gas	-	-	-	-	-
4.1.01.03.03.0001	PBBKB-Bahan Bakar Gas	-	-	-	-	-
4.1.01.03.04	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	-	-	-	-	-
4.1.01.03.04.0001	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	-	-	-	-	-
4.1.01.04	Pajak Air Persewaan	-	-	-	-	-
4.1.01.04.01	Pajak Air Persewaan	-	-	-	-	-
4.1.01.04.01.0001	Pajak Air Persewaan	-	-	-	-	-
4.1.01.05	Pajak Rokok	-	-	-	-	-
4.1.01.05.01	Pajak Rokok	-	-	-	-	-
4.1.01.05.01.0001	Pajak Rokok	-	-	-	-	-
4.1.02	Retribusi Daerah	-	2.750.000,00	-	2.750.000,00	-
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	-	-	-	-	-
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-	-

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
31 Desember 2023

Kode Rekening	Uraian	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31-Des-2022	PENDAPATAN LRA PER 31-Des-2023	Pendapatan Diterima Dimuka Per 31-Des-2022 (manfaat Untuk Tahun 2023)	PENDAPATAN LRA TA 2023 YANG MENJADI HAK TAHUN 2023	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31-Des-2023
2	3	4	5	6	7	8 = 4 + 5 - 6 - 7
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	-	-
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	-	-	-	-	-
4.1.02.01.12	Retribusi Pelayanan Pendidikan	-	-	-	-	-
4.1.02.01.12.0001	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis	-	-	-	-	-
4.1.02.01.12.0002	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis	-	-	-	-	-
4.1.02.01.12.0003	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	-	-	-	-	-
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	-	2.750.000,00	-	2.750.000,00	-
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kalkun Daerah	-	2.750.000,00	-	2.750.000,00	-
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	-	-	-	-	-
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	-	-	-	-	-
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	-	-	-	-	-
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruang	-	2.750.000,00	-	2.750.000,00	-
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	-	-	-	-	-
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	-	-	-	-	-
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan/penumpang Bus Umum	-	-	-	-	-
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	-	-	-	-	-
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	-	-	-	-	-
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahrag	-	-	-	-	-
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahrag	-	-	-	-	-
4.1.02.02.10	Retribusi Penyelenggaraan di Air	-	-	-	-	-
4.1.02.02.10.0001	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Orang	-	-	-	-	-
4.1.02.02.10.0002	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Barang	-	-	-	-	-
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	-	-	-	-	-
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produk Hasil Usaha Daerah berupa bibit atau Benih Tanaman	-	-	-	-	-
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produk Hasil Usaha Daerah berupa bibit Ternak	-	-	-	-	-
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produk Hasil Usaha Daerah berupa bibit atau Benih Ikan	-	-	-	-	-
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produk Hasil Usaha Daerah selain bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	-	-	-	-	-
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	-	-
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	-	-	-	-
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	-	-	-	-
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	-	-	-	-	-
4.1.02.03.04.0001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	-	-	-	-	-
4.1.02.03.04.0002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembenihan Ikan	-	-	-	-	-
4.1.02.03.05	Retribusi Penjangkauan Izin Mengalokasikan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	-	-	-	-	-
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	-	-	-	-	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kelayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	-	-	-	-	-
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	-	-	-	-	-
4.1.03.01.01.0001	PT. BANGUN ASKRIDA	-	-	-	-	-
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	-	-	-	-	-
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	-	-	-	-	-
4.1.03.02.01.0001	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	-
4.1.03.02.01.0002	PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT	-	-	-	-	-
4.1.03.02.01.0003	PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM)	-	-	-	-	-
4.1.03.02.01.0004	PT. JAMKIDA	-	-	-	-	-
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	-	-	-	-	-
4.1.03.02.02.0001	PO. JASA DAN KEPERAWISAJAAN	-	-	-	-	-
4.1.03.02.02.0002	PT. AGROKINERJA	-	-	-	-	-
4.1.03.02.02.0003	PT. JASA SARANA	-	-	-	-	-
4.1.03.02.02.0004	PT. MARGA HULU	-	-	-	-	-
4.1.03.02.02.0005	PT. MIGA HULU	-	-	-	-	-
4.1.03.02.02.0006	PT. AGRO JABAR	-	-	-	-	-
4.1.03.02.02.0007	PT. BANDARA INTERNASIONAL SUMBA BARAT	-	-	-	-	-
4.1.03.02.02.0008	PT. TOKTA GEMAH RIAH	-	-	-	-	-
4.3.04	Lain-lain PAD yang Sub	233.347.167,00	2.623.950,00	62.381.950,00	-	173.769.167,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	2.623.950,00	2.623.950,00	-	-
4.1.04.01.01	Hasil Penjualan Tanah	-	-	-	-	-
4.1.04.01.01.0001	Hasil Penjualan Tanah	-	-	-	-	-
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-
4.1.04.01.02.0001	Hasil Penjualan Alat Berat	-	-	-	-	-
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	-	-	-	-	-
4.1.04.01.02.0003	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	-	-
4.1.04.01.02.0004	Hasil Penjualan Alat Pertanian	-	-	-	-	-
4.1.04.01.02.0005	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	-	-	-
4.1.04.01.02.0006	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	-	-	-	-	-
4.1.04.01.02.0007	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	-	-
4.1.04.01.02.0008	Hasil Penjualan Alat Laboratorium	-	-	-	-	-
4.1.04.01.02.0009	Hasil Penjualan Komputer	-	-	-	-	-
4.1.04.01.02.0010	Hasil Penjualan Alat Dipekisasi	-	-	-	-	-
4.1.04.01.02.0011	Hasil Penjualan Alat Pengolahan	-	-	-	-	-
4.1.04.01.02.0012	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	-	-	-
4.1.04.01.02.0013	Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-	-
4.1.04.01.02.0014	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-	-
4.1.04.01.02.0015	Hasil Penjualan Alat Peraga	-	-	-	-	-
4.1.04.01.02.0016	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-	-
4.1.04.01.02.0017	Hasil Penjualan Rambu-rambu	-	-	-	-	-
4.1.04.01.02.0018	Hasil Penjualan Peralatan Olahraga	-	-	-	-	-
4.1.04.01.02.0019	Hasil Penjualan Tanah	-	-	-	-	-
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	-	2.623.950,00	2.623.950,00	-	-
4.1.04.01.03.0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	-	2.623.950,00	2.623.950,00	-	-
4.1.04.01.03.0002	Hasil Penjualan Mosamen	-	-	-	-	-
4.1.04.01.03.0003	Hasil Penjualan Bangunan Menara	-	-	-	-	-
4.1.04.01.03.0004	Hasil Penjualan Tugu Titiik Kontrol/Pacsi	-	-	-	-	-
4.1.04.01.04	Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Vgasi	-	-	-	-	-
4.1.04.01.04.0001	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan	-	-	-	-	-
4.1.04.01.04.0002	Hasil Penjualan Bangunan Air	-	-	-	-	-
4.1.04.01.04.0003	Hasil Penjualan Instalasi	-	-	-	-	-
4.1.04.01.04.0004	Hasil Penjualan Jaringan	-	-	-	-	-
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
4.1.04.01.05.0001	Hasil Penjualan Bahan Peledakan	-	-	-	-	-
4.1.04.01.05.0002	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	-	-	-	-	-
4.1.04.01.05.0003	Hasil Penjualan Hewan	-	-	-	-	-
4.1.04.01.05.0004	Hasil Penjualan Biota Perairan	-	-	-	-	-
4.1.04.01.05.0005	Hasil Penjualan Tanaman	-	-	-	-	-
4.1.04.01.05.0006	Hasil Penjualan Barang Koleksi/Mon Benda	-	-	-	-	-
4.1.04.01.05.0007	Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Rencanasi	-	-	-	-	-
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	-	-	-	-	-
4.1.04.01.06.0001	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	233.347.167,00	-	59.578.000,00	-	173.769.167,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	233.347.167,00	-	59.578.000,00	-	173.769.167,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	233.347.167,00	-	59.578.000,00	-	173.769.167,00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	-	-	-	-	-
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	-	-	-	-	-
4.1.04.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	-	-	-	-	-
4.1.04.03.03.0001	Hasil dari Bangun Guna Serah	-	-	-	-	-
4.1.04.03.04	HASIL DARI BANGUN GUNA SERAH	-	-	-	-	-
4.1.04.03.04.0001	PT. TRITUNGKAL LESTARI MAKMUR (PULMAM)	-	-	-	-	-
4.1.04.03.05	HASIL DARI KERJA SAMA PENYEWAAN INFRASTRUKTUR	-	-	-	-	-
4.1.04.03.05.0001	HASIL DARI KERJA SAMA PENYEWAAN INFRASTRUKTUR	-	-	-	-	-
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	-	-	-	-	-
4.1.04.04.01	PENDAPATAN JASA PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL (BALAI PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL)	-	-	-	-	-
4.1.04.04.01.0001	TPA SARIMUTI	-	-	-	-	-
4.1.04.04.01.0002	TPA LEGOKNANGKA	-	-	-	-	-
4.1.04.04.01.0003	TPA NAMBO	-	-	-	-	-
4.1.04.05	Jasa Giro	-	-	-	-	-
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	-	-	-	-	-
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	-	-	-	-	-
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	-	-	-	-	-

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
31 Desember 2023

Kode Rekening	Uraian	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31-Des-2022	PENDAPATAN LRA PER 31-Des-2023	Pendapatan Diterima Dimuka Per 31-Des-2022 (manfaat Untuk Tahun 2023)	PENDAPATAN LRA TA 2023 YANG MENJADI HAK TAHUN 2023	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31-Des-2023
2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	-	-	-	-	-
4.1.04.05.03	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	-	-	-	-	-
4.1.04.05.03.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	-	-	-	-	-
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Kas Rekening Dana BOS	-	-	-	-	-
4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Kas Rekening Dana BOS	-	-	-	-	-
4.1.04.05.05	Jasa Giro Dana Kagitasi pada FKTP	-	-	-	-	-
4.1.04.05.05.0001	Jasa Giro Dana Kagitasi pada FKTP	-	-	-	-	-
4.1.04.06	HASIL PENGELOLAAN DANA BERGULUR	-	-	-	-	-
4.1.04.06.01	HASIL PENGELOLAAN DANA BERGULUR	-	-	-	-	-
4.1.04.06.01.0001	HASIL PENGELOLAAN DANA BERGULUR	-	-	-	-	-
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	-	-	-	-	-
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
4.1.04.08	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	-	-	-	-	-
4.1.04.08.01	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	-	-	-	-	-
4.1.04.08.01.0001	TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP BENDAHARA	-	-	-	-	-
4.1.04.08.02	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	-	-	-	-	-
4.1.04.08.02.0001	TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PECAHAW NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEMBAT LAIN	-	-	-	-	-
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Besok Lain	-	-	-	-	-
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Besok Lain	-	-	-	-	-
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Besok Lain	-	-	-	-	-
4.1.04.10	Penerimaan Keuntungan dari Seloeh Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	-	-	-	-	-
4.1.04.10.01	Penerimaan Keuntungan dari Seloeh Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	-	-	-	-	-
4.1.04.10.01.0001	Penerimaan Keuntungan dari Seloeh Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	-	-	-	-	-
4.1.04.11	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	-	-
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	-	-
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	-	-
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	-	-	-	-
4.1.04.12.01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-	-	-	-
4.1.04.12.01.0001	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan	-	-	-	-	-
4.1.04.12.01.0002	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep	-	-	-	-	-
4.1.04.12.01.0003	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus	-	-	-	-	-
4.1.04.12.01.0004	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus	-	-	-	-	-
4.1.04.12.01.0005	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus	-	-	-	-	-
4.1.04.12.01.0006	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	-	-	-	-	-
4.1.04.12.01.0007	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	-	-	-	-	-
4.1.04.12.01.0008	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	-	-	-	-	-
4.1.04.12.01.0009	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	-	-	-	-	-
4.1.04.12.01.0010	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	-	-	-	-	-
4.1.04.12.01.0011	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	-	-	-	-	-
4.1.04.12.01.0013	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar	-	-	-	-	-
4.1.04.12.02	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga	-	-	-	-	-
4.1.04.12.02.0001	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Bermotor (BBNKB)	-	-	-	-	-
4.1.04.12.02.0002	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	-	-	-	-	-
4.1.04.12.02.0003	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	-	-	-	-	-
4.1.04.12.02.0004	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	-	-	-	-	-
4.1.04.12.02.0005	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus	-	-	-	-	-
4.1.04.12.02.0006	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus	-	-	-	-	-
4.1.04.12.02.0007	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	-	-	-	-	-
4.1.04.12.02.0008	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	-	-	-	-	-
4.1.04.12.02.0009	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	-	-	-	-	-
4.1.04.12.02.0010	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	-	-	-	-	-
4.1.04.12.02.0011	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	-	-	-	-	-
4.1.04.12.02.0013	Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat	-	-	-	-	-
4.1.04.12.02.0014	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga	-	-	-	-	-
4.1.04.12.03	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPBBKB)	-	-	-	-	-
4.1.04.12.03.0001	Pendapatan Denda PPBBKB-Bahan Bakar Bensin	-	-	-	-	-
4.1.04.12.03.0002	Pendapatan Denda PPBBKB-Bahan Bakar Solar	-	-	-	-	-
4.1.04.12.03.0003	Pendapatan Denda PPBBKB-Bahan Bakar Gas	-	-	-	-	-
4.1.04.12.03.0004	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	-	-	-	-	-
4.1.04.12.04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	-	-	-	-	-
4.1.04.12.04.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	-	-	-	-	-
4.1.04.12.05	Pendapatan Denda Pajak Rokok	-	-	-	-	-
4.1.04.12.05.0001	Pendapatan Denda Pajak Rokok	-	-	-	-	-
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	-	-	-	-
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	-	-	-	-	-
4.1.04.13.01.0001	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-	-
4.1.04.13.01.0002	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman/ Kematian	-	-	-	-	-
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-	-	-	-	-
4.1.04.13.02.0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kelayakan Daerah	-	-	-	-	-
4.1.04.13.02.0004	Pendapatan Denda Retribusi Terminal	-	-	-	-	-
4.1.04.13.02.0009	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	-	-	-	-
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	-	-
4.1.04.13.03.0003	Pendapatan Denda Retribusi lain-lain untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	-	-	-	-
4.1.04.13.03.0004	Pendapatan Denda Retribusi lain-lain untuk Penyediaan	-	-	-	-	-
4.1.04.13.03.0005	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lala Lintas	-	-	-	-	-
4.1.04.13.03.0006	Pendapatan Denda Retribusi Pemertajanan lain-lain Mendorong/kerja Kerja Asing (IMTA)	-	-	-	-	-
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-	-	-	-
4.1.04.14.01	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	-	-
4.1.04.14.01.0001	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	-	-
4.1.04.15	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.01	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.01.0001	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.02	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.02.0001	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.02.0002	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.03	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.03.0001	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.04	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.04.0001	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.04.0002	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.04.0003	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.04.0004	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.04.0005	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.04.0006	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0001	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0002	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0003	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0004	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0005	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0006	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0007	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0008	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0009	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0010	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0011	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0012	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0013	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0014	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0015	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0016	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0017	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0018	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0019	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0020	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0021	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0022	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0023	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0024	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0025	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0026	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0027	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0028	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0029	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0030	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0031	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0032	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0033	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0034	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0035	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0036	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0037	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0038	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0039	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0040	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0041	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0042	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0043	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0044	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0045	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0046	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0047	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0048	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0049	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0050	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0051	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0052	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0053	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0054	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0055	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0056	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0057	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0058	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0059	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0060	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.04.15.05.0061	PENDAPATAN DARI PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PISAL 23	-	-	-	-	-
4.1.						

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
31 Desember 2023

Kode Rekening	Uraian	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31-Des-2022	PENDAPATAN LRA PER 31-Des-2023	Pendapatan Diterima Dimuka Per 31-Des-2022 (manfaat Untuk Tahun 2023)	PENDAPATAN LRA TA 2023 YANG MENJADI HAK TAHUN 2023	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31-Des-2023
2	3	4	5	6	7	8 = 4 + 5 - 6 - 7
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	-	-	-
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	-	-
4.2.01.01.01.0002	DBH PPH Pasal 21	-	-	-	-	-
4.2.01.01.01.0003	DBH PPH Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	-	-	-	-	-
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	-	-	-	-
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	-	-	-	-	-
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	-	-	-	-	-
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	-	-	-	-	-
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	-	-	-	-	-
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	-	-	-	-	-
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	-	-	-	-	-
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Iuran Ioin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	-	-	-	-	-
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Dana Rehabilitasi (DRH)	-	-	-	-	-
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	-	-	-	-	-
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	-	-
4.2.01.01.02.0001	DAU	-	-	-	-	-
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan keurahan	-	-	-	-	-
4.2.01.01.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyerataan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	-	-
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK)	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler PAUD	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler SD	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler SMP	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler SMA	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler SLB	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler SAK	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0007	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi SD	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0008	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi SMP	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0009	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi SMA	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penggunaan-SMK	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0012	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Nujukan	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penggunaan-Penurunan AKI dan AKB	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penggunaan-Penguatan Intervensi Stunting	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penggunaan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0019	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penggunaan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/parkutata	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0020	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penggunaan-Pembangunan RS Pratama	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0021	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penggunaan-Puskesmas Parahutata	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0022	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penggunaan-Balai Pelatihan Kesehatan	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0023	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prosesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (STPK)	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0024	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Prosesmas	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penggunaan-Penurunan Stunting (KB)	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Penunahan dan Pemukiman-Reguler-Pengadaan Rumah Saeataya	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0028	DAK Fisik-Bidang Penunahan dan Pemukiman-Afirmasi-Pengadaan Rumah Saadaya	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0029	DAK Fisik-Bidang Penunahan dan Pemukiman-Afirmasi-Pengadaan Rumah Khusus	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penggunaan-Pembangunan Sentra UKM dan Revitalisasi Sentra IKM	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penggunaan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penggunaan	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Perkebunan-Penggunaan	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penggunaan-Jalan	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0036	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penggunaan-Keselamatan Jalan	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0038	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penggunaan	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0041	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Negeri-Penggunaan	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0044	DAK Fisik-Bidang Pasar-Penggunaan	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penggunaan-Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0046	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penggunaan-Kehutanan	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0047	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0048	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0049	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penggunaan	-	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0050	DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler	-	-	-	-	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	-	-	-	-
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	-	-	-	-	-
4.2.01.01.04.0002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	-	-	-	-	-
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kewaja	-	-	-	-	-
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PKSD	-	-	-	-	-
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamril Guro PKSD	-	-	-	-	-
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PKSD	-	-	-	-	-
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	-	-	-	-	-
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	-	-	-	-	-
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	-	-	-	-	-
4.2.01.01.04.0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	-	-	-	-	-
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-	-	-	-
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Penggunaan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Alternatif Puskesmas	-	-	-	-	-
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jeminar Persialan	-	-	-	-	-
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	-	-	-	-
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PKZUKM	-	-	-	-	-
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelagasan Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	-
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelagasan Kependudukan	-	-	-	-	-
4.2.01.01.04.0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BUPS	-	-	-	-	-
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-Dana Fasilitas Pemasaran Modal	-	-	-	-	-
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	-	-
4.2.01.02.01	DID	-	-	-	-	-
4.2.01.02.01.0001	DID	-	-	-	-	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-	-	-
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	-	-
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	-	-
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	-	-	-	-
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	-	-	-	-
4.2.02.02.03	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
4.2.02.02.03.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
4.2.02.02.04	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
4.2.02.02.04.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAK	-	-	-	-	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
4.3.01.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
4.3.01.02.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
4.3.01.02.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
4.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	-	-	-	-	-
4.3.01.03.01	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	-	-	-	-	-
4.3.01.03.01.0001	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	-	-	-	-	-
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	-	-	-	-	-
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	-	-	-	-	-
4.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	-	-	-	-	-
4.3.01.04.02	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Luar Negeri	-	-	-	-	-
4.3.01.04.02.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Luar Negeri	-	-	-	-	-

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
31 Desember 2023

LAMPIRAN 13

Kode Rekening	Uraian	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31-Des-2022	PENDAPATAN LRA PER 31-Des-2023	Pendapatan Diterima Dimuka Per 31-Des-2022 (manfaat Untuk Tahun 2023)	PENDAPATAN LRA TA 2023 YANG MENJADI HAK TAHUN 2023	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31-Des-2023
2	3	4	5	6	7	8 = 4 + 5 - 6 - 7
4.3.01.04.03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	-	-	-	-	-
4.3.01.04.03.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	-	-	-	-	-
4.3.01.04.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri	-	-	-	-	-
4.3.01.04.04.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri	-	-	-	-	-
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-	-	-	-	-
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-	-	-	-	-
4.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-	-	-	-	-
4.3.02	DANA DARURAT	-	-	-	-	-
4.3.02.01	DANA DARURAT	-	-	-	-	-
4.3.02.01.01	DANA DARURAT	-	-	-	-	-
4.3.02.01.01.0001	DANA DARURAT PADA TAHAP PASCA BENCANA	-	-	-	-	-
4.3.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-	-	-	-
4.3.03.01	Lain-Lain Pendapatan	-	-	-	-	-
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	-	-	-	-
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	-	-	-	-
4.3.03.01.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	-	-	-	-	-
4.3.03.01.02.0001	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
4.3.03.01.02.0002	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMD	-	-	-	-	-
4.3.03.01.02.0003	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMD	-	-	-	-	-
4.3.03.01.02.0004	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	-	-	-	-
4.3.03.01.02.0005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	-	-	-	-
4.3.03.01.02.0006	Pendapatan atas Pengembalian Hibah Bantuan Keuangan pada Partai Politik	-	-	-	-	-

Kode	Kode Rekening	Uraian	Pendapatan LRA	Koreksi	Pendapatan	Piutang Yang Timbul Atas	Bagian Laba	Pendapatan Diterima	Pelaksanaan Rujukan	Pendapatan	Pendapatan LO	Pendapatan LO
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTAL	4	PELAYANAN DARAH	5.371.960	70.200.000	0	0	0	62.201.810	70.200.000	2.673.950	64.951.960	62.221.000
SUBTOTAL 1	4.1	PELAYANAN ASIL DARAH (PAD)	5.371.960	70.200.000	0	0	0	62.201.810	70.200.000	2.673.950	64.951.960	62.221.000
SUBTOTAL 2	4.1.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0001	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0002	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0003	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0004	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0005	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0006	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0007	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0008	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0009	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0010	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0011	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0012	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0013	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0014	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0015	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0016	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0017	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0018	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0019	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0020	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0021	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0022	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0023	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0024	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0025	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0026	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0027	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0028	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0029	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0030	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0031	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0032	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0033	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0034	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0035	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0036	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0037	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0038	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0039	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0040	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0041	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0042	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0043	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0044	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0045	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0046	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0047	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0048	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0049	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0050	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0051	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0052	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0053	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0054	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0055	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0056	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0057	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0058	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0059	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0060	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0061	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0062	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0063	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0064	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0065	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0066	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0067	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0068	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0069	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0070	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0071	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0072	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0073	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0074	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0075	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0076	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0077	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0078	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0079	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0080	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0081	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0082	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0083	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0084	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0085	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0086	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0087	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0088	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0089	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0090	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0091	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0092	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0093	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0094	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0095	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0096	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0097	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0098	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0099	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0100	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0101	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0102	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0103	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0104	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0105	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0106	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0107	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0108	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0109	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0110	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0111	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0112	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0113	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0114	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.01.0115	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0						

Kode	Kode Relasiyang	Urutan	Pendapatan LRA	Koreksi	Pendapatan	Plusiag Yang Timbul Atas	Bagian Laba	Pendapatan Diterima	Polusasan Plusing	Pendapatan	Pendapatan LO	Pendapatan LO
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
INPUT	4.1.01.02.08.0001	BHNK-Akasi Barang/Bahan-Truck	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.01.02.08		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.02.09	BHNK-Akasi Barang/Teknik-Berat Van	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.01.02.09		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.02.10	BHNK-Sopda Motor Sengda Motor Roda Dua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.01.02.10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.02.11	BHNK-Sopda Motor Sengda Motor Roda Tiga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.01.02.11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.02.11.0001	BHNK-Sopda Motor Sengda Motor Roda Tiga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.01.02.11.0001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.02.12	BHNK-Kendaraan Bermotor yang Dipersewakan di Air	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.01.02.12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.02.12.0001	BHNK-Kendaraan Bermotor yang Dipersewakan di Air	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.01.02.12.0001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.02.13	BHNK-Kendaraan Pribadi Ane Berat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.01.02.13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.02.13.0001	BHNK-Kendaraan Pribadi Ane Berat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.01.02.13.0001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.02.14	BHNK-Akasi Roda Tiga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.01.02.14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.02.14.0001	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.01.02.14.0001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.02.15	PBBKB-Bahan Bakar Berman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.01.02.15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.02.15.0001	PBBKB-Bahan Bakar Berman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.01.02.15.0001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.02.16	PBBKB-Bahan Bakar Solar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.01.02.16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.02.16.0001	PBBKB-Bahan Bakar Solar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.01.02.16.0001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.02.17	PBBKB-Bahan Bakar Gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.01.02.17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.02.17.0001	PBBKB-Bahan Bakar Gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.01.02.17.0001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.02.18	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.01.02.18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.02.18.0001	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.01.02.18.0001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.02.19	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.01.02.19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.02.20	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.01.02.20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.02.21	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.01.02.21		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.02.22	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.01.02.22		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.02.23	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.01.02.23		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.02.24	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.01.02.24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.02.25	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.01.02.25		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.02.26	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.01.02.26		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.02.27	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.01.02.27		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.02.28	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.01.02.28		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.02.29	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.01.02.29		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.02.30	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.01.02.30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.01.02.31	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.01.02.31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.02.01.01	Beribuat Pelayanan Kesehatan	2.750.000	0	0	0	0	0	0	0	2.750.000	2.750.000
SUBTOTAL 3	4.1.02.01.01		2.750.000	0	0	0	0	0	0	0	2.750.000	2.750.000
INPUT	4.1.02.01.01.0001	Beribuat Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.02.01.01.0001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.02.01.01.0006	Beribuat Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Saja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.02.01.01.0006		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.02.01.12	Beribuat Pelayanan Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.02.01.12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.02.01.12.0001	Beribuat Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Tesis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.02.01.12.0001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.02.01.12.0002	Beribuat Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Tesis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.02.01.12.0002		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.02.01.12.0003	Beribuat Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.02.01.12.0003		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.02.02	Beribuat Jasa Usaha	2.750.000	0	0	0	0	0	0	0	2.750.000	2.750.000
SUBTOTAL 3	4.1.02.02		2.750.000	0	0	0	0	0	0	0	2.750.000	2.750.000
INPUT	4.1.02.02.01	Beribuat Pemakaian Fasilitas Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.02.02.01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.02.02.01.0001	Beribuat Pemakaian Fasilitas Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.02.02.01.0001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.02.02.01.0002	Beribuat Pemakaian Fasilitas Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.02.02.01.0002		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.02.02.01.0003	Beribuat Pemakaian Fasilitas Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.02.02.01.0003		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.02.02.01.0004	Beribuat Pemakaian Fasilitas Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.02.02.01.0004		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.02.02.01.0005	Beribuat Pemakaian Fasilitas Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.02.02.01.0005		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.02.02.01.0006	Beribuat Pemakaian Fasilitas Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.02.02.01.0006		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.02.02.01.0007	Beribuat Pemakaian Fasilitas Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.02.02.01.0007		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.02.02.04	Beribuat Pemakaian Fasilitas Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.02.02.04		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.02.02.04.0001	Beribuat Pemakaian Fasilitas Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.02.02.04.0001		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.02.02.04.0002	Beribuat Pemakaian Fasilitas Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.02.02.04.0002		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.02.02.04.0003	Beribuat Pemakaian Fasilitas Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.02.02.04.0003		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.02.02.04.0004	Beribuat Pemakaian Fasilitas Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.02.02.04.0004		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.02.02.04.0005	Beribuat Pemakaian Fasilitas Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.02.02.04.0005		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.02.02.04.0006	Beribuat Pemakaian Fasilitas Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.02.02.04.0006		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.02.02.04.0007	Beribuat Pemakaian Fasilitas Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.02.02.04.0007		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.02.02.04.0008	Beribuat Pemakaian Fasilitas Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.02.02.04.0008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.02.02.04.0009	Beribuat Pemakaian Fasilitas Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.02.02.04.0009		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.02.02.04.0010	Beribuat Pemakaian Fasilitas Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.02.02.04.0010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.02.02.04.0011	Beribuat Pemakaian Fasilitas Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.02.02.04.0011		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INPUT	4.1.02.02.04.0012	Beribuat Pemakaian Fasilitas Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.1.02.02.04.0012		0	0	0							

[illegible]

Kode	Kode Rekening	Uraian	Pendapatan LRA	Koreksi	Pendapatan	Piutang Yang Timbul Atas	Bagian Laba	Pendapatan Diterima	Pelunasan Piutang	Pendapatan	Pendapatan LO 1103+1497+6498
		2								10	
			3	4		6	7	8	9		12
SUBTOTAL 3	1										
INPUT	4.3.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Abokat Khusus (DAM) Fisik		0	0	0		0	0	0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0001	DAM Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PALUD								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0002	DAM Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0003	DAM Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0004	DAM Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0005	DAM Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SB								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0006	DAM Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0007	DAM Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0008	DAM Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0010	DAM Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perumahan-SMK								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0011	DAM Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Diakarya								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0012	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kesehatan Dasar								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0013	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kesehatan Rujukan								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0014	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kelembagaan								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0015	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kelembagaan AK dan AB								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0016	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kelembagaan Peningkatan Mutu								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0017	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kelembagaan BSN Nasional/Provinsi/Kabupaten/Jayapura								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0018	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kelembagaan BS Tripartita								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0019	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kelembagaan Persepsi								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0021	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kelembagaan Keselamatan								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0022	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kelembagaan Keselamatan								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0023	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kelembagaan Keselamatan								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0024	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kelembagaan Keselamatan								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0025	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kelembagaan Keselamatan								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0026	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kelembagaan Keselamatan								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0027	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kelembagaan Keselamatan								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0028	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kelembagaan Keselamatan								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0029	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kelembagaan Keselamatan								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0030	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kelembagaan Keselamatan								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0031	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kelembagaan Keselamatan								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0032	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kelembagaan Keselamatan								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0033	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kelembagaan Keselamatan								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0034	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kelembagaan Keselamatan								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0035	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kelembagaan Keselamatan								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0036	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kelembagaan Keselamatan								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0037	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kelembagaan Keselamatan								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0038	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kelembagaan Keselamatan								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0039	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kelembagaan Keselamatan								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0040	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kelembagaan Keselamatan								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0041	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kelembagaan Keselamatan								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0042	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kelembagaan Keselamatan								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0043	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kelembagaan Keselamatan								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0044	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kelembagaan Keselamatan								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0045	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kelembagaan Keselamatan								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0046	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kelembagaan Keselamatan								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0047	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kelembagaan Keselamatan								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0048	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kelembagaan Keselamatan								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0049	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kelembagaan Keselamatan								0	0
INPUT	4.3.01.01.03.0050	DAM Fisik-Bidang Kesehatan dan K3-Reguler-Rayasaat Kelembagaan Keselamatan								0	0
SUBTOTAL 3	2			0	0	0		0	0	0	0
INPUT	4.3.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Abokat Khusus (DAM) Non Fisik								0	0
INPUT	4.3.01.01.04.0001	DAM Non Fisik-Bidang Pendidikan								0	0
INPUT	4.3.01.01.04.0002	DAM Non Fisik-Bidang Pendidikan								0	0
INPUT	4.3.01.01.04.0003	DAM Non Fisik-Bidang Pendidikan								0	0
INPUT	4.3.01.01.04.0004	DAM Non Fisik-Bidang Pendidikan								0	0
INPUT	4.3.01.01.04.0005	DAM Non Fisik-Bidang Pendidikan								0	0
INPUT	4.3.01.01.04.0006	DAM Non Fisik-Bidang Pendidikan								0	0
INPUT	4.3.01.01.04.0007	DAM Non Fisik-Bidang Pendidikan								0	0
INPUT	4.3.01.01.04.0008	DAM Non Fisik-Bidang Pendidikan								0	0
INPUT	4.3.01.01.04.0009	DAM Non Fisik-Bidang Pendidikan								0	0
INPUT	4.3.01.01.04.0010	DAM Non Fisik-Bidang Pendidikan								0	0
INPUT	4.3.01.01.04.0011	DAM Non Fisik-Bidang Pendidikan								0	0
INPUT	4.3.01.01.04.0012	DAM Non Fisik-Bidang Pendidikan								0	0
INPUT	4.3.01.01.04.0013	DAM Non Fisik-Bidang Pendidikan								0	0
INPUT	4.3.01.01.04.0014	DAM Non Fisik-Bidang Pendidikan								0	0
INPUT	4.3.01.01.04.0015	DAM Non Fisik-Bidang Pendidikan								0	0
INPUT	4.3.01.01.04.0016	DAM Non Fisik-Bidang Pendidikan								0	0
INPUT	4.3.01.01.04.0017	DAM Non Fisik-Bidang Pendidikan								0	0
INPUT	4.3.01.01.04.0018	DAM Non Fisik-Bidang Pendidikan								0	0
INPUT	4.3.01.01.04.0019	DAM Non Fisik-Bidang Pendidikan								0	0
INPUT	4.3.01.01.04.0021	DAM Non Fisik-Bidang Pendidikan								0	0
SUBTOTAL 2	2			0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	2			0	0	0		0	0	0	0
INPUT	4.3.01.02.01.0001	DID								0	0
SUBTOTAL 1	4.3.09	Pendapatan Transfer Antar Daerah		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 2	4.3.02.02	Bantuan Keuangan		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.02	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.03	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.04	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.05	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.06	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.07	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.08	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.09	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.10	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.11	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.12	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.13	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.14	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.15	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.16	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.17	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.18	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.19	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.20	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.21	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.22	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.23	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.24	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.25	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.26	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.27	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.28	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.29	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.30	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.31	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.32	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.33	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.34	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.35	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.36	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.37	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.38	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.39	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.40	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.41	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.42	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.43	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.44	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.45	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.46	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.47	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.48	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.49	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.50	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.51	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.52	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.53	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.54	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0	0	0
SUBTOTAL 3	4.3.02.02.55	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Populasi		0	0	0		0	0		

[illegible]

[illegible]

PROVINSI JAWA BARAT
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI SERTA BEBAN PENYISIHAN PIUTANG
TAHUN 2023

URAIAN	BEBAN TAHUN 2023	BEBAN TAHUN 2022
1	2	3
A. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI		
A.1 BEBAN PENYUSUTAN		
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.531.010.746	1.649.846.874
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	118.480.811	105.390.576
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.292.088	10.292.088
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	6.694.404	6.694.404
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	0	0
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN	1.666.478.049	1.772.223.942
A.2. BEBAN AMORTISASI		
Beban Amortisasi	0	0
JUMLAH BEBAN AMORTISASI	0	0
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	1.666.478.049	1.772.223.942
B. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG		
Beban Penyisihan Piutang Pajak	0	0
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	0	0
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang SAH	0	0
Beban Penyisihan Piutang Lainnya PPKD	0	0
JUMLAH BEBAN PENYISIHAN PIUTANG	0	0

MENGETAHUI
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


H. Sumasna, ST., MUM
NIP. 19681216 199803 1 003

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA


Enny Rustini, SE., MM
NIP. 19711112 200112 2 001

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
PERBANDINGAN REALISASI BELANJA MODAL NERACA DAN LRA
Badan Kepegawaian Daerah
PER 31 Desember 2023

NO	URAIAN	LRA	NERACA	SELISIH	KETERANGAN
		(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)
1	TANAH	-	-	-	
2	PERALATAN DAN MESIN	1.704.393.778,00	1.805.393.778,00	(101.000.000,00)	Reklas dari GB Renovasi Ge
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	2.882.588.000,00	2.781.588.000,00	101.000.000,00	Reklas dari GB Renovasi Ge
4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	-	-	-	
5	ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-	-	
7	ASET LAINNYA	-	-	-	
JUMLAH		4.586.981.778,00	4.586.981.778,00	-	

Mengetahui,

Kepala Badan Kepegawaian Daerah


H. Sumasna, ST., MUM

NIP. 19681216 199803 1 003

Kepala Sub Bagian Tata Usaha


Enny Rustini, SE., MM

NIP. 19711112 200112 2 001

[illegible]

**PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Jum'at Tanggal 29 Desember 2023 Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama lengkap : H. SUMASNA, ST., MUM

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku Pengguna Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia/Peraturan Daerah.

Nomor 77 Tahun 2020 , kami melakukan pemeriksaan setempat pada:

Nama lengkap : DENY KUSNIADI, S.ST

Jabatan : Bendahara Pengeluaran

berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 30/KU.12.01.01/KEP.BPKAD/2023 tanggal 27 Februari 2023
ditugaskan mengurus uang berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada
dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut:

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah:

a Uang kertas	= Rp. 0,00
b Uang logam	= Rp. 0,00
c SP2D dan alat pembayaran lainnya yang belum dicairkan	= Rp. 0,00
d Saldo Bank	= Rp. 0,00
e Surat/barang/benda berharga yang diizinkan	= Rp. 0,00
	=
Jumlah	= Rp. 0,00

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah, Register dan lain sebagainya berjumlah	= Rp. 0,00
Perbedaan positif/negatif antara saldo kas dan Saldo buku	= Rp. 0,00
Penjelasan perbedaan positif/negatif	-
	-

**Bendahara Pengeluaran/
Penerimaan**



DENY KUSNIADI, S.ST
NIP. 19760909 200701 1 006

**Mengetahui,
Pengguna Anggaran**



H. SUMASNA, ST., MUM
NIP. 19681216 199803 1 003

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
REGISTER PENUTUPAN KAS**

Tanggal penutupan kas : 29 Desember 2023
 Nama Penutup Kas : DENY KUSNIADI, S.ST
 Tanggal penutupan kas yang lalu : 30 November 2023
 Jumlah transaksi s.d. bulan : 29 Desember 2023

1. Jumlah Penerimaan s.d. tanggal 29 Desember 2023 77.053.560.670,00

terdiri atas:

SP2D UP	:	3.550.459.800,00	
GU	:	13.271.641.671,00	
TU	:	0,00	
LS	:	14.119.361.424,00	
LS gaji	:	41.727.957.027,00	(+)
			72.669.419.922,00

Penerimaan pajak

PPN	:	965.694.335,00	
PPh-21	:	3.192.433.041,00	
PPh-22	:	35.051.648,00	
PPh-23	:	134.423.001,00	
PPh-4	:	55.381.996,00	
PPh-Final	:	1.156.727,00	(+)
		4.384.140.748,00	(+)
		77.053.560.670,00	

Jumlah Pengeluaran s.d. tanggal 29 Desember 2023

76.813.738.617,00

terdiri atas:

SPJ UP/GU	:	16.582.279.418,00	
TU	:	0,00	
LS	:	14.119.361.424,00	
LS Gaji	:	41.727.957.027,00	(+)
			72.429.597.869,00

Pengeluaran pajak

PPN	:	965.694.335,00	
PPh-21	:	3.192.433.041,00	
PPh-22	:	35.051.648,00	
PPh-23	:	134.423.001,00	
PPh-4	:	55.381.996,00	
PPh-Final	:	1.156.727,00	(+)
		4.384.140.748,00	(+)
		76.813.738.617,00	

Saldo buku

Setor Ke kas Daerah

239.822.053,00 (-)

239.822.053,00 (-)

0,00

2. Saldo Bank

Setor Ke kas Daerah

0,00

0,00 (-)

0,00

Perbedaan positif/negatif

NIHIL

Penjelasan perbedaan saldo:

Bandung, 29 Desember 2023

Mengetahui,

Bendahara Pengeluaran



DENY KUSNIADI, S.ST

Penata

NIP. 19760909 200701 1 006

Pengguna Anggaran



H. SUMASIN, ST., MUM

Pembina Utama

NIP. 19681216 199803 1 003



PAYMENT RECEIPT
PROVINCE / CITY / DISTRICT RETRIBUTION

Print Date : 29 Dec 2023 13:44:30
Transaction Date : 29/12/2023 13:43:14
Trace No : 967249
Transaction Status : Executed Successfully
Source Account : 0006031293001
Billing Id : 2132732912235805
Taxpayer Name : DENY KUSNIADI
Taxpayer Address :
SKPD Code : 3.04.01.
SKPD Name : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH - BKD
Account Code : 4.1.4.15
Account Name : PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN
Bill Amount : IDR 239,822,053.00
Fine / Penalty : IDR .00
Bank Administration Fee : IDR .00
Total Debit Amount : IDR 239,822,053.00
NTB : BJB20231229967249
NTP : 03039655

Transaction Reference Number : C20231229893350777

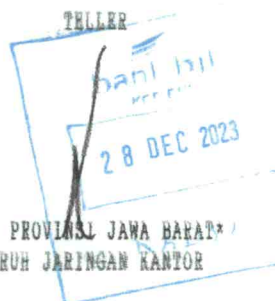
PLEASE SAVE THIS RECEIPT AS PAYMENT RECEIPT OF PROVINCE/CITY/DISTRICT RETRIBUTION.
PROVINCE/CITY/DISTRICT RETRIBUTION PAYMENT CAN BE DONE AT THE ENTIRE bjb BANK BRANCH,
bjb INTERNET BANKING CORPORATE, bjb-NET, bjb ATM AND THE NEAREST bjb ELECTRONIC CHANNELS.

USER ID : L069
BANK BJB
KODE CABANG : 0001
KC UTAMA BANDUNG

TGL CETAK : 28/12/2023
JAM CETAK : 11:14:22

BUKTI PEMBAYARAN PAJAK/RETRIBUSI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR BAYAR	: 2132732812232191	TGL. BAYAR	: 28/12/2023 11:13:20
NAMA WP / OP	: DADANG SOFYAN	KODE SETOR	: 2132732812232191
ALAMAT	:	NTP	: 31445590
		NTB	: 20231228431078
KODE SKPD	: 3.04.01.	TAGIHAN	: RP. 2,623,950
NAMA SKPD	: BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH - BKD	DENDA	: RP.
KODE REKENING	: 4.1.4.01.03.01	BIAYA ADMIN	: RP.
NAMA REKENING	: HASIL JUAL BMD - HASIL PENJUALAN BANGUNA	TOTAL TAGIHAN	: RP. 2,623,950



HARAP SIMPAN TANDA TERIMA INI SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN PAJAK/RETRIBUSI PROVINSI JAWA BARAT
*PEMBAYARAN PAJAK/RETRIBUSI PROVINSI JAWA BARAT DAPAT DILAKUKAN DI SELURUH JARINGAN KANTOR
DAN JARINGAN ELEKTRONIK BANK BJB TERDEKAT*
BUKTI TRANSAKSI INI SEBAGAI DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN DENGAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon (022) 4235026
Fax (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung - 40115

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 698 /PL.04/Sekre/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami masing-masing :

1. a.. Nama : H. SUMASNA, ST., MUM
b. Jabatan : Kepala Badan
c. Kedudukan : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. a. Nama : **Drs. H. ASEP SUKMANA, M.Si**
b. Jabatan : Kepala Dinas
c. Kedudukan : Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) dan 1 (satu) unit Notebook, dengan data sebagai berikut :

1. Merek kendaraan : Toyota Altis 2.0 A/T
Jenis kendaraan : Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang Roda 4
Tahun pembuatan : 2015
Nomor rangka : MR053REE3D4301775
Nomor mesin : 3ZRX339771
Nomor Polisi : D 1730 E
Harga perolehan : Rp. 397.710.000,00
2. Nama Barang : Notebook
Merk/Type : HP Spectre X360 i3-AW000JTU
Tahun perolehan : 2020
Harga perolehan : Rp. 19.750.000,00

Pasal 2

Barang tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Berita Acara ini merupakan aset / kekayaan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dikelola/dipergunakan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Harga perolehan sebagaimana tercantum pada Pasal I Berita Acara ini merupakan nilai tercatat sesuai Daftar Barang Milik Daerah..

Pasal 4

Dengan serah terima barang sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Berita Acara ini, maka PIHAK KEDUA wajib:

1. Mencatat Barang tersebut dalam Kartu Inventaris Barang (KIB);
2. Melakukan pemeliharaan dan pengamanan;
3. Bertanggungjawab atas segala resiko akibat penggunaan kendaraan dan peralatan kantor tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditandatangani dalam rangkap 4(empat), untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Drs. H. ASEP SUKMANA, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690612 198803 1 002

PIHAK KESATU



H. SUMASNA, ST.,MUM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19681216 199803 1 003

Mengetahui/Mengesahkan,
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Dra. NANIN HAYANI ADAM, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690420 198803 2 004



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Diponegoro No. 22 Telp./Fax. (022) 4205561 (Gedung A)
Website : www.bpkad.jabarprov.go.id
Bandung 40115

BERITA ACARA SERAH TERIMA
Nomor : 87 / RT.05.01 / BAST / BMD / 2023

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Dra. NANIN HAYANI ADAM, M.Si : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 22 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. H. SUMASNA, ST., MUM : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Ternate No. 2 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU aset berupa peralatan dan mesin jenis kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 1 (satu) unit sebagai penghargaan juara 2 (dua) kategori Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Asset Award 2023, dengan rincian sebagai berikut:

No	Merk/ Type	No. Rangka	No. Mesin	No. Polisi	Bulan	Tahun	Harga Perolehan (Rp)
1.	Yamaha All New X-RIDE ABS	MH3SE88BOPJ158014	E3R4E-0758171	D 2805 A	7	2023	20 326 200,00

Pasal 2

Aset peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Berita Acara Serah Terima ini merupakan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk dikelola oleh PIHAK KEDUA dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 3

Nilai Perolehan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Berita Acara Serah Terima ini merupakan nilai tercatat sesuai Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 4

Dengan serah terima aset peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Berita Acara Serah Terima ini, maka PIHAK KEDUA wajib:

- a. Mencatat aset peralatan dan mesin tersebut dalam Daftar Pengguna Barang.
- b. Melakukan Pemeliharaan dan Pengamanan.
- c. Bertanggung jawab atas segala resiko akibat penggunaan aset peralatan dan mesin tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditandatangani dalam 4 (empat) rangkap, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



H. SUMASNA, ST., MUM
Pembina Utama Madya
NIP. 19681216 199803 1 003

PIHAK KESATU,



Dra. NANIN HAYANI ADAM, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690420 198803 2 004



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Diponegoro No. 22 Telp./Fax. (022) 4205561 (Gedung A)

Website : www.bpkad.jabarprov.go.id

Bandung 40115

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 56 /RT.05.01/BAST/BPKAD/2023

Dasar : Surat dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat nomor: 241/PL.04/Sekre, tanggal 6 Maret 2023, Hal : Permohonan Kendaraan Dinas Oprasional

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Empat** bulan **Mei** tahun **Dua ribu dua puluh tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Dra. NANIN HAYANI ADAM, M.Si : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 22 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya di **PIHAK KESATU**.
- 2 H. SUMASNA, ST., MUM : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat berkedudukan di Jalan Ternate No. 2 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) kondisi baik dan layak pakai, dengan perincian sebagai berikut :

No	MERK/ TYPE	NO. RANGKA	NO. MESIN	NO. POLISI	BULAN PENGADAAN	THN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	PERUNTUKAN
1	TOYOTA NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN	MHFJW8EMXN240 5294	1TRB047905	D 1116 B	12	2022	371.700.000,00	KENDARAAN OPERASIONAL KEPALA BADAN
TOTAL							371.700.000,00,-	

Pasal 2

Kendaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Berita Acara ini merupakan barang milik/kekayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk dikelola sebagai kendaraan operasional oleh PIHAK KEDUA dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 3

Harga Perolehan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Berita Acara ini merupakan nilai yang tercatat sesuai Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 4

Dengan serah terima kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Berita Acara ini, maka PIHAK KEDUA wajib :

- a. Mencatat kendaraan tersebut dalam Kartu Inventaris Barang (KIB);
- b. Melakukan pemeliharaan dan pengamanan;
- c. Bertanggung jawab atas segala resiko akibat penggunaan kendaraan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditandatangani dalam rangkap 5 (lima), untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



H. SUMASNA, ST., MUM
Pembina Utama Madya
NIP. 19681216 199803 1003

PIHAK KESATU



Dra. NANIN HAYANI ADAM, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690420 198803 2 004



TANDA BUKTI PENYERAHAN KENDARAAN DINAS

BPKAD PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Jalan Diponegoro No. 22 Bandung

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor 50/RT.05.01/BAST/BPKAD/2023 Tanggal 04 Mei 2023, pada hari ini Kamis.... Tanggal 04... Bulan Mei Tahun 2023, telah diserahkan 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 (dua) dengan spesifikasi dan peruntukan sebagai berikut :

No	MERK/ TYPE	NO. RANGKA	NO. MESIN	NO. POLISI	THN	PERUNTUKAN
1	TOYOTA NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN	MHFJW8EMXN2405294	1TRB047905	D 1116 B	2022	KENDARAAN OPERASIONAL

Kendaraan tersebut diserahkan dalam kondisi baik, berikut dengan segala kelengkapannya.

Demikian tanda bukti penyerahan kendaraan dinas ini di buat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,



ROBY BUDIMAN

NIP. 19800806 200604 1009

Yang Menyerahkan ,
SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



SITI SYAMSINUR, SE., M.Acc., AAP
Pembina

NIP. 19810327 200604 2 011



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan : Kawalayaan Indah Raya Nomor 6 Telepon : (022) 87328066 - 87326081
Faksimile : (022) 87327001 Website : www.bp2d.jabarprov.go.id E-mail : bp2d@jabarprov.go.id
Bandung - 40286

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor: 24/PL.04.02/Sekre

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. LINDA AL AMIN, S.T., M.T. : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Kawalayaan Indah Raya Nomor 6 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. H. SUMASNA, S.T., M.U.M. : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Ternate Nomor 2 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU aset berupa tanah dan gedung bangunan milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Volume	Jumlah Luasan (m ²)	Jumlah Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1.	Tanah	1 Bidang	2.100	25.609.500.000,00	Rincian Terlampir
2.	Gedung dan Bangunan	4 Unit	2.085,28	3.602.349.075,00	Rincian Terlampir
TOTAL			4.185,28	29.211.849.075,00	

Pasal 2

Aset tanah dan gedung bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Berita Acara Serah Terima ini merupakan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk dikelola oleh PIHAK KEDUA dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 3

Nilai Perolehan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Berita Acara Serah Terima ini merupakan nilai tercatat sesuai Daftar Barang Milik Daerah. Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana terlampir merupakan satu bagian dengan Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 4

Dengan serah terima aset tanah serta gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Berita Acara Serah Terima ini, maka PIHAK KEDUA wajib:

- a. Mencatat aset tanah serta gedung dan bangunan tersebut dalam Daftar Pengguna Barang.
- b. Melakukan Pemeliharaan dan Pengamanan.
- c. Bertanggung jawab atas segala resiko akibat penggunaan aset tanah serta gedung dan bangunan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditandatangani dalam 4 (empat) rangkap, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



H. SUMASNA, S.T., M.U.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19681216 199803 1 003

PIHAK KESATU,



LINDA AL AMIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670630 199803 2 005

Mengetahui,
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Barat



Dra. NANIN HAYANI ADAM, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19690420 198803 2 004

PROVINSI : JAWA BARAT
 PENGUNA BARANG :
 KUASA PENGUNA :
 SUB KUASA PENGUNA :
 TANGGAL LAPORAN :

DAFTAR BARANG PENGUNA/MIK DAERAH INTRAKOMPTABLE TANAH

No.	Kode Barang/ ID Barang	Reg.	Nama Barang	Spesifikasi Barang			Sertifikat	Bulan Perolehan	Tahun Perolehan	Jumlah				Nilai Perolehan (Pembelian)	Koreksi Pembulatan	Keterangan/ Tgl. Baku/ Tahun Sensus
				Alamat	Merk / Tipe	No. Sertifikat / No. Pabrik / No. Chasis / No. Mesin / No. Pelat / No. Rantai / No. Daerah Istimewa				Volume	Nilai Perolehan Sebelum Atribusi	Nilai Atribusi	Nilai Perolehan Setelah Atribusi			
1.3.1.01.01.04.001			Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Tubagus Ismail Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat		10.15.01.05.4.00032/ Hak Pakai No. 32	10.15.01.05.4.00032/ Hak Pakai No. 32	1	2001	2.100	25.609.500.000,00	0,00	25.609.500.000,00	25.609.500.000,00	0,00	

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 PROVINSI JAWA BARAT

[Signature]
 H. SUMASNA, S.T., M.U.M.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19631216 199803 1 003

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 PROVINSI JAWA BARAT

[Signature]
 LINDA AL JAHIN, S.T., M.T.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660330 199803 2 005

Mengetahui,
 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 PROVINSI JAWA BARAT

[Signature]
 DRA. NANIN HAYATI ADAM, M.Si.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19690330 198803 2 004

PROVINSI	22	JAWA BARAT
PENGUNDA BARANG	23	
KUASA PENGGUNA	24	
SUB KUASA PENGGUNA	25	
TANGGAL LAPORAN	26	

No.	Honor		Spesifikasi Barang		Jumlah	Volume	Nilai Perolehan	Nilai Atribusi	Nilai Perolehan Setelah Atribusi	Umur Ekonomis	Penyusutan s.d Tahun Berkenaan	Nilai Buku	Keterangan/ Tgl. Buku/ Tahun Sensus
	Kode Barang/ ID Barang	Bag.	Nama Barang Sesuai Permendagri 108	Alamat									
1	1.3.3.01.01.01.001		Bangunan Gedung Kantor Permanaen	Jl. Tubagus Irmali Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat	1	2001	3.001.125.075,00	0,00	3.001.125.075,00	20	3.001.125.075,00	-	Bangunan Utama 3 Lantai
2	1.3.3.01.01.01.001		Bangunan Gedung Kantor Permanaen	Jl. Tubagus Irmali Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat	1	2001	320.775.000,00	0,00	320.775.000,00	20	320.775.000,00	-	Bangunan Besokan 2 Lantai
3	1.3.3.01.01.02.001		Bangunan Gudang Terutup Permanaen	Jl. Tubagus Irmali Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat	1	2001	192.465.000,00	0,00	192.465.000,00	20	192.465.000,00	-	Bangunan Gudang 1 Lantai
4	1.3.3.01.01.06.001		Bangunan Gedung Tempat Badah Permanaen	Jl. Tubagus Irmali Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat	1	2001	87.984.000,00	0,00	87.984.000,00	20	87.984.000,00	-	Bangunan Masjid/Tempat Badah
							3.603.348.075,00	-	3.603.348.075,00	80	3.603.348.075,00		

[Signature]

H. SUMASNA, S.T., M.U.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631216 196803 1 003

6

LINDA EL AMIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670630 199803 2 005

Mengetahui,

KEPALA BADAN PENGELUARAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Dra. NANIN HAYANI ADAM, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19690420198503 2 004



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Ir. H. Juanda No. 287 Telp. (022) 2516061 Fax. (022) 2510731

Website: bappeda.jabarprov.go.id, E-mail: bappeda@jabarprov.go.id, bappeda.jabar@gmail.com

BANDUNG - 40135

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH

Nomor: 6197/KU.03.07/Kepegumhum

Pada hari ini Senin tanggal sebelas bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. IENDRA SOFYAN, S.T., M.Si. : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 287 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II. H. SUMASNA, ST., MUM. : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat berkedudukan di Jl. Ternate No. 2 Bandung 40115 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU barang milik daerah dengan rincian terlampir tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Pasal 2

Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, semula merupakan barang milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang tercatat dalam Daftar Barang PIHAK KESATU.

Pasal 3

PARA PIHAK menyepakati alihstatus penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 untuk dipergunakan sebagai penunjang kegiatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 4

Dengan serah terima barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

1. Mencatat barang tersebut dalam Daftar Barang Pengguna;
2. Melakukan pemeliharaan dan pengamanan terhadap barang tersebut;
3. Bertanggung jawab atas segala risiko akibat penggunaan barang tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah ini, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK KEDUA,


H. SUMASNA, ST., MUM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19681216 199803 1 003

PIHAK KESATU,


Dr. IENDRA SOFYAN, S.T., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720419 199803 1 007

Mengetahui/Menyetujui,
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,


Dra. NANIN HAYANI ADAM, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19690420 198803 2 004

DATA BARANG MILIK DAERAH

NO.	KODE BARANG	KODE REGISTER	NAMA BARANG	MERK/TIPE	JUMLAH	JENIS	NILAI PEROLEHAN	NILAI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	LOKASI	LUAS	TAHUN PEROLEHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	1.3.2.10.01.02.009	-	Tablet PC	MHQY3P/A Apple iPad Pro 11-inch (3rd Gen) Wi-Fi 1TB Space Gray Model A2377 S/N: XCV722RCY0 + MUJFZP/A Apple Pencil (2nd Gen) Model A2051 S/N: HJHJ6W2JXW0	1 Paket	Peralatan dan Mesin	36.314.260	5.295.829	31.018.421	Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat, Jl. Ir. Juanda No. 287 Kode Pos 40135	-	2022
2	1.3.2.10.02.03.009	-	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	MXQT2B/A Apple iPad Magic Keyboard Black - British Model A2281 S/N: FTGRO0VP2TG	1 Unit	Peralatan dan Mesin	7.603.500	1.108.846	6.494.655	Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat, Jl. Ir. Juanda No. 287 Kode Pos 40135	-	2022
3	1.3.2.10.02.05.999	-	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	MMMQ3D/A Apple Magic Mouse - Black Model A1957 S/N: CC22098002W1G20AQ	1 Unit	Peralatan dan Mesin	2.220.000	323.750	1.896.250	Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat, Jl. Ir. Juanda No. 287 Kode Pos 40135	-	2022

Sumber: Daftar Barang Pengguna Bappeda Provinsi Jawa Barat, Semester I 2023, diolah



PIHAK KEDUA,

H. SUMASNA, ST., MUM.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19681216 199803 1 003



PIHAK KESATU,

Dr. IENDRA SOFYAN, S.T., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720419 199803 1 007

Mengetahui/Menyetujui,
 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 PROVINSI JAWA BARAT,



Dra. NANIN HAYANI ADAM, M.Si.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19690420 199803 2 004